EDISI NO 29/TH.XIV/1998

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PALAPA

"LET'S GO INDONESIA!"

MENUJU MASYARAKAT MULTI IDEOLOGI

BEBAS HAMBATAN IDEOLOGI KIRI

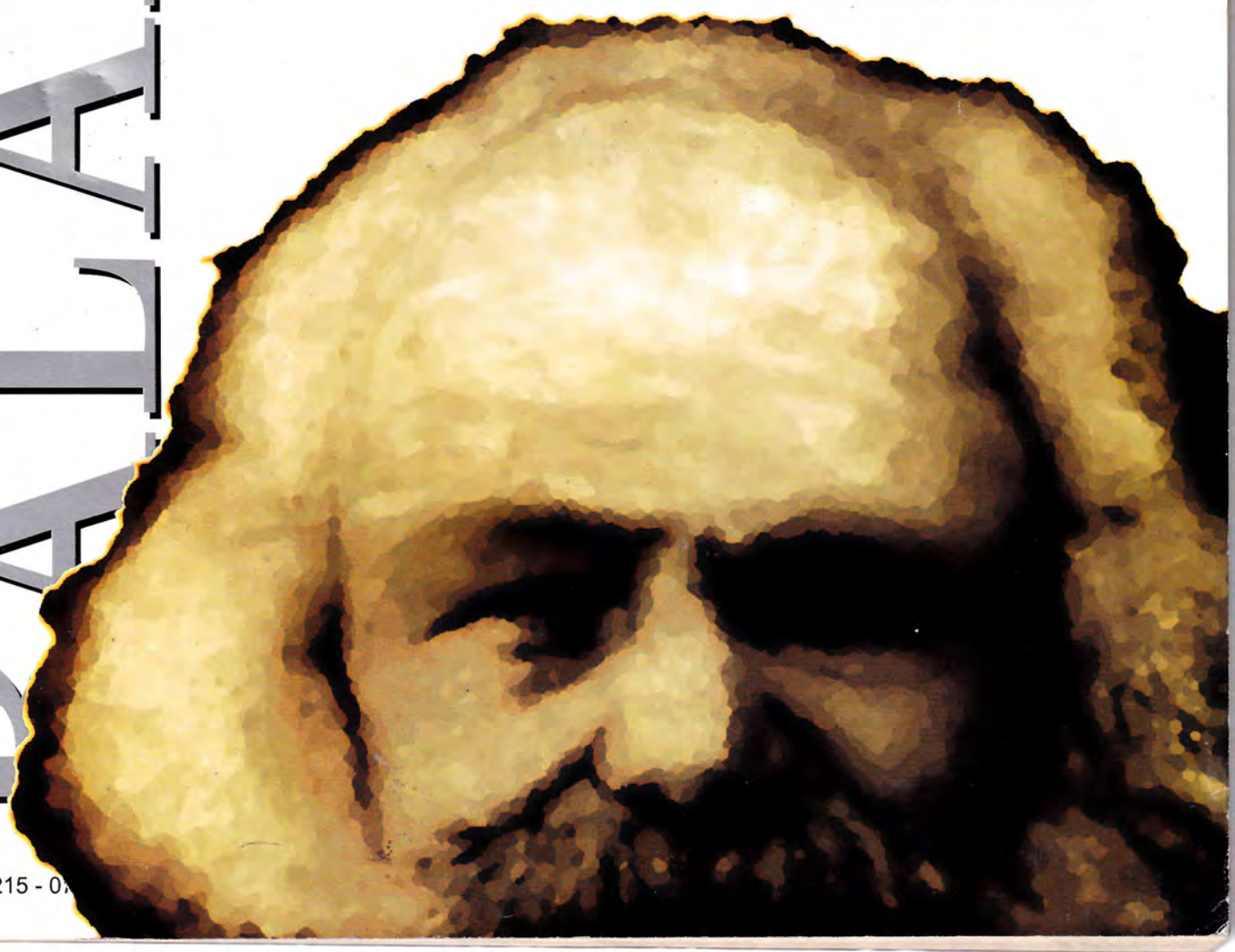

ISSN : 0215 - 0

VICO Indonesia
A Division of Virginia Indonesia Company

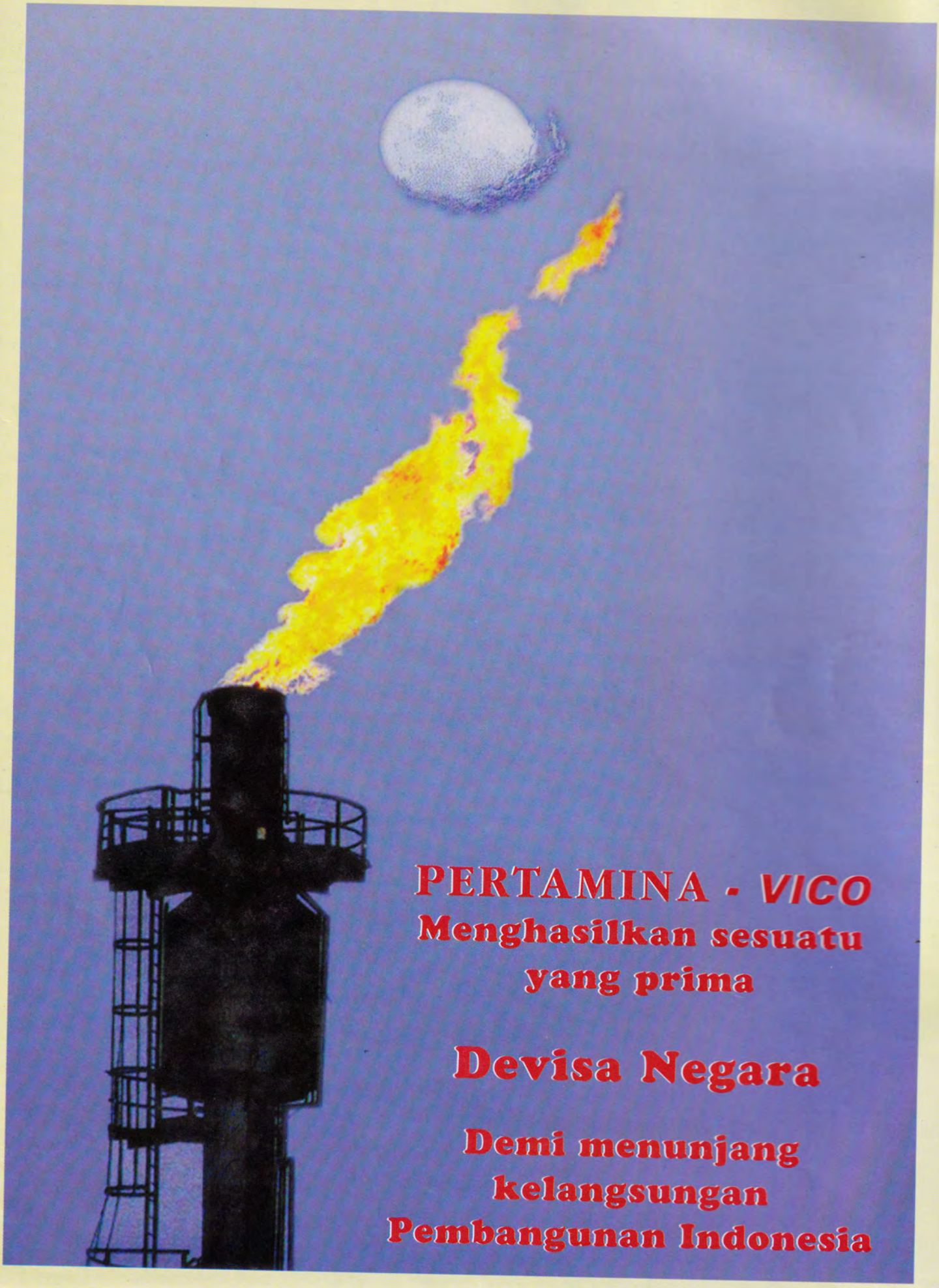

PERTAMINA - VICO
Menghasilkan sesuatu yang prima

Devisa Negara

Demi menunjang kelangsungan Pembangunan Indonesia

DAPUR

Tentu di luar perhitungan kami, memasuki usia ke-13 *Balairung* menghadapi kesulitan baru dan sempat membuat para pegiatnya berpikir keras. Bagaimana tidak? Tepat pada angka usia yang kata orang membawa sial itu, akibat era kebebasan pers yang dibuka seluas-luasnya terus terang kami (mungkin juga persma yang lain) merasa kedodoran bila harus bersaing dengan pers umum.

Sarasehan pers mahasiswa se-Jawa-Bali
Gara-gara Soeharto turun

Dulu, pers mahasiswa (persma) masih bisa unjuk gigi bahwa ia memang manifestasi dari pers yang ideal dengan keberaniannya. Suntikan keberanian, inilah yang pernah diakui Rosihan Anwar ikhwal peran pers mahasiswa terhadap perkembangan pers Indonesia. Atau kalau mau mengutip lagi, Dhaniel Dhakidae pernah mengatakan jurnalisme mahasiswa cukup konsekuen memanfaatkan kebebasan yang ada pada dirinya. Dia tidak terikat pada keadaan dimana kebebasan itu diberikan atau tidak diberikan. Tetapi kebebasan itu selalu dipakai.

Itulah pembaca bila persma masih mau beromantisme dengan masa lalu. Tetapi tidak untuk saat ini, menyusul kejatuhan Soeharto dimana banyak ruang-ruang 'sakral' yang dulu tabu disentuh pers umum (dan pers mahasiswa memanfaatkan itu) telah tidak ada lagi. Keberanian pers umum untuk saat ini bahkan sudah melebihi kami yang lebih dulu berani. Julukan pers alternatif agaknya perlu segera kami pertimbangkan layak tidaknya.

Dari kegelisahan itulah kami kemudian mengambil keputusan untuk melakukan reorientasi pada paradigma penerbitan. Untuk mencari formatnya kami juga menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya *Balairung* yang menghadapi. Makanya kami sengaja mengemas upaya reorientasi dalam bentuk sarasehan pers mahasiswa se Jawa-Bali pada tanggal 2 Nopember ini. Dengan tema: *Reorientasi Pers Mahasiswa, Mencari Ruang Baru dalam era Keterbukaan* kami berharap bahwa persoalan ini dapat kita selesaikan bersama. Sesama pers mahasiswa. Acara tersebut dapat dihadiri pengelola penerbitan mahasiswa dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Solo, Jember, Surabaya, Denpasar, dan Yogya sendiri.

Di samping itu, *Balairung* juga menyadari perlunya kita memperbaiki pengelolaan pers mahasiswa masa depan. Untuk itulah dalam waktu dekat kami juga tengah mempersiapkan untuk mencoba membuat Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI). Insya Allah, PIPMI nanti bisa On-line di internet dan bisa diakses oleh siapapun terutama kawan-kawan persma yang memerlukan informasi.

Rencananya PIPMI ini nanti berisi profil dari masing-masing persma yang ada di Indonesia serta hasil terbitannya tiap edisi. Untuk itulah pada tahap awal kami akan berusaha menyebarkan kuisioner untuk mendapatkan informasi itu pada masing-masing persma. Selanjutnya kami juga akan berusaha melengkapi informasi yang diperlukan oleh persma, dari informasi soal nara sumber, tempat singgah bila reportase di kota lain, hingga pada informasi soal berbagai referensi yang diperlukan, atau apapun yang nanti diperlukan kami mempersilakan para pembaca untuk memberi masukan.

Di bagian lain, tentu kami tidak melupakan penerbitan edisi kali ini. Bertepatan dengan ulang tahun majalah *Balairung* ke-13, (kami tidak mempercayai takhayul tentang kesialan angka itu). Sengaja kami mengangkat sebuah tema besar: *Multi Partai, Multi Ideologi* untuk coba menyikapi kondisi aktual bangsa ini. Dengan asumsi bahwa diakuinya multi partai konsekuensinya adalah multi ideologi. Dekonstruksi wacana dari pemaksaan ideologi tunggal Pancasila sebagai syarat bagi partai yang ingin hidup di Indonesia layak dilakukan. Apalagi bila kita semua sepakat bahwa kita mau membangun sebuah negara yang demokratis.❐

Penjaga Dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❐**Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ❐ **Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/82/7789/UM/01/37 tanggal 14 Desember 1985, *International Standard Series Number* (ISSN): 0215-076X ❐**Pelindung:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.(Rektor UGM)❐ **Penasehat:** Ir. Bambang Kartika (Pembantu Rektor III UGM), Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❐**Pemimpin Umum:** Irfan Muktiono ❐ **Sekretaris Umum:** Nurhidayati ❐**Pemimpin Redaksi:** Hery Trianto ❐**Pjs. Sekretaris Redaksi:** M. Bustom ❐**Ka. Litbang:** Ajianto Dwi Nugroho ❐**Staf Litbang:** Mashudi, Farah Adibah ❐**Pemimpin Perusahaan:** F. Ika Yuniarti ❐**Wk. Pemimpin Perusahaan:** Priyo Sudarmo❐**Sekretaris Perusahaan:** Agung Widyatmoko ❐**Kabag. Keuangan:** Sholihah❐**Kabag. Iklan:** Yusuf Waluyo Jati ❐**Kabag. Distribusi:** Rima Rahmania ❐**Kabag. Promosi:** Yuki Susanti ❐**Staf Perusahaan:** Houtmand Parulian, Uki Hernuning, Lisa R. Rahmad ❐ **Redaktur Bahasa:** Asep Mulyana ❐ **Redaktur Pelaksana:** Melanie Wahyu Wulandari, Irma HIdayana❐**Penjaga Rubrik:** Radyah Maharastri, M. Ugoran Prasad, Lukman Hakim Arifin, Dedy Sushandoyo, Eka Rinanda, Monica Eviandaru, Ibrahim Z. Fahmi B, Agung Christianto, Bekti Dwi Andari❐**Staf Redaksi:**Dirmawan Hatta, Imam Risdiyanto, Aris Mustafa, Rio BTM Hutagaol, Iwan Hermanto, Rhiska P Irawan, Shohiffulloh, Yohanes Putra Mbama ❐ **Redaktur Artistik:**Titik Puji Lestari ❐**Staf Artistik:** Agung Arief Budiman, Riza Afifi, Afiaty Dian Irfanti, Andy Seno Aji, Lalu Rizki Rahman ❐**Redaktur Foto:** Bambang Pamungkas ❐**Alamat Redaksi:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901703 Faks. (0274) 566171❐ **E-mail:** *balairung.ugm@eudoramail.com* ❐**Rekening:** TAPLUS BNI 1946, No.Rek. 228.007 816 062.901(atas nama Sholihah) ❐**Percetakan:** Cahaya Timur Offset, Jl. Taman Siswa No 63 Yogyakarta 55151, Telp. (0274) 376730. **Isi diluar tanggungjawab percetakan.**

***Balairung* on-line, URL: http://members.tripod.com/balairung**

Redaksi menerima tulisan dan foto tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan program pengolah kata microsoft word atau wordstar. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya. Tulisan maksimum 100 kb, juga dapat dikirim melalui e-mail (dalam format extension RTF=*Rich Text Format*), semua file (teks dan gambar) dijadikan satu folder.

BALAIRUNG
Nafas Intelektual Mahasiswa

ISI

Dapur	3
Isi	4
Kontak	6
Panggung	9
Isu	10
Berita Tema	11
Wawancara Tema	22
Temu Wicara	26
Artikel Tema	29
Kampus	32
Lintas	35
Opini	36
Jepret	39
Iptek	43
Humaniora	47
Lingkungan	52
Kesehatan	56
Apresiasi	59
Laporan Daerah	61
Artikel Lepas	65
Insan Wawasan	69
Kolom	74
Budaya	75
Jerat	78
Anekdot	80

Bagong Kussudiardja:
Presiden Nggak Tahu Seni

Bagong kecil terus bertahan menggambar walaupun tidak mampu membeli *konte*. Ia mengumpulkan *langes*, serbuk hitam pekat dari cerobong asap kereta api, bersusah payah memanjat gerbong yang sedang langsir di stasiun Lempuyangan. Bahkan berjualan *theklek* dan *kelom* di pasar Ngasem pun pernah dijalaninya. Di usianya tujuh puluh tahun ini, ia belum kehilangan semangat untuk berkarya. '*Semeleh*' prinsip hidup yang ia pertahankan hingga kini.

Kiri yang Diabaikan

Masa lalu bukanlah barang usang yang tidak perlu dipakai. Bukan pula sesuatu yang bisa diterima saja sebagai kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Upaya penyeragaman terhadap pemahaman masa lalu seperti yang terjadi selama ini, lebih dari cukup menjelaskan betapa orang Indonesia dipaksa memahami sejarahnya dari satu sisi.

Menjadi Seni Komedi

Apa jadinya dunia tanpa tawa. Hidup dengan kerutan di kening setiap saat. Atau, bila orang jadi super serius hingga melupakan tawa. Komedi, bisa menjadikan hidup berwarna, dinamis dan mengendurkan syaraf setelah begitu lama tegang. Komedi tanpa disadari juga menyimpan energi yang kemudian menjadi stimulator pada penontonnya akan realita kehidupan, pun menjadi sarana paling efektif untuk menyampaikan pesan sosial. Sekaligus, mencatat evolusi sejarah bangsa melalui temanya yang selalu kontekstual.

HOTEL WISATA ANCOL
Hotel KHUSUS mahasiswa

Percaya atau tidak, di saat krismon saat ini di kota megapolitan seperti Jakarta Anda bisa mendapatkan hotel yang relatif murah tapi lengkap. Selain itu juga sehat dan bersuasanakan kekeluargaan. Tak perlu banyak ongkos yang terbuang, Anda sudah bisa menginap dengan nyaman. Itulah Hotel Wisata Ancol, hotel dengan nuansa wisata yang terletak di kawasan Ancol Jakarta Utara.

Letaknya yang bersebelahan dengan Taman Impian Jaya Ancol, membuat Anda mudah menjangkau pusat rekreasi terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara tersebut. Ingin ke **Dunia Fantasi**, **Gelanggang Samudra**, atau **Seaworld** ? Atau ingin menikmati sunrise atau sunset dari Pantai Ancol dan belanja berbagai karya seni di **Pasar Seni** ? Mudah saja, Anda cukup melangkah kaki. Jarak dari hotel menuju tempat rekreasi keluarga ini hanya sekitar 500 meter. Jarak ke pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua juga dekat.

Hotel Wisata Ancol mudah dijangkau dari stasiun kereta api Gambir dan Jakarta Kota, Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa. Tol lingkar Luar Timur dan Tol Prof. Sedyatmo menjadikan hotel ini makin mudah dijangkau dari Bandara Soekarno Hatta. Letaknya yang strategis memudahkan Anda untuk pergi kemana saja di Jakarta, apalagi fasilitas transportasi umum ke segala jurusan tersedia 24 jam.

Bagi pelajar dan mahasiswa, hotel ini merupakan pilihan yang tepat. Selain tersedia kamar spesial yang berisi 2 dan 3 tempat tidur, tersedia juga tempat tidur kolektif, khusus untuk tamu rombongan. Jumlah tempat tidur di hotel ini berjumlah 326 buah lengkap dengan AC.

Hotel Wisata Ancol juga menyediakan berbagai sarana ruangan komisi / rapat dengan kapasitas mulai dari 20 sampai 60 orang, lengkap dengan AC, proyektor, white board, serta sound system. Untuk reuni maupun seminar tersedia ruang serba guna yang mampu menampung sekitar 500 orang.

Suasana nyaman dan asri akan Anda rasakan begitu Anda memasuki halaman hotel dengan luas areal 5,5 hektar ini. Kehijuan tanamannya menyiratkan hotel ini peduli terhadap lingkungan.

Kelengkapan fasilitas di hotel ini membuat para pengunjung dapat memilih beberapa sarana olah raga seperti lapangan bola volley, basket, tenis meja, bulu tangkis, bahkan senam aerobik

Hingga kini berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, perusahaan swasta, sekolah dan perguruan tinggi dari berbagai daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan, telah memanfaatkan. fasilitas ini untuk pendidikan dan latihan atau berbagai training serta pertemuan-pertemuan lain. (Advertorial)

Reservation :
Nani (021) 6406712 atau 6406711.

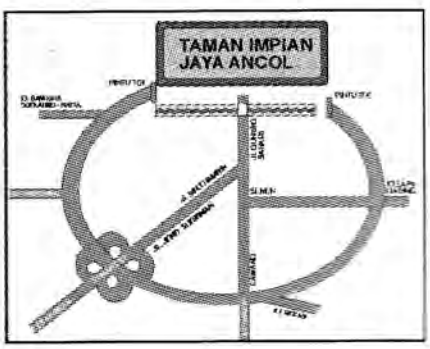

Seaman Resort
JAYA ANCOL

KONTAK

KELIK SUPRIYANTO, S.Si.

Di jaman modern menghormati patung mungkin hanya terjadi di Yogya
*Dalam kasus pembangkangan kaum sipil (*civil disobidience*) seperti ini, Yogya memang pelopor*

Surat dari *Mahardika*

Fri, 30 Oct 1998 23:38:24 PST

Salam Pembebasan!

Salam kenal dari kru *Mahardika*, majalah mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung.

Kami kabarkan, kini Unpad telah memiliki penerbitan tingkat universitas yang mengupas kondisi sosial, politik, budaya. Tapi karena berbagai kendala, kami baru bisa terbit pada minggu kedua november tahun ini (1998).

Selain *pingin* kenal, maksud kami mengirim surat ini antara lain untuk memastikan kabar tentang pertemuan pers mahasiswa se-Jawa-Bali pada 2 November mendatang. Informasi tentang pertemuan itu kami dapat, ketika berkunjung ke redaksi *Didaktika* dan *Transformasi* IKIP Jakarta.

Bila pertemuan tersebut jadi digelar, kami sangat berharap dapat menghadirinya. Sebab, kami ingin kenal dan berbagi pikiran dengan teman-teman pers, apalagi forum silaturahmi yang dihadiri teman-teman pers mahasiswa se-Jawa-Bali itu belum pernah kami datangi.

Untuk itu, kami meminta kabar kepastian acara tersebut secepatnya.

Terimakasih atas perhatian teman-teman *Balairung*.

•Wasallam

Sri Lestari<eci77@hotmail.com>
pemimpin umum

Perlu kami beritahukan bahwa Sarasehan Pers Mahasiswa se-Jawa-Bali tersebut telah terselenggara pada 2 November 1998, dengan dihadiri oleh pengelola penerbitan mahasiswa dari Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, Jember, Malang dan Yogya sendiri. Sayang e-mail Anda baru sampai tanggal 30 November 1998, sehingga kami kesulitan mengundangnya. Sebelumnya kami juga tidak mempunyai alamat Mahardika. *Kami berharap kerjasama antara* Balairung *dan* Mahardika *segera terwujud. Selamat datang* Mahardika *di belantara pers mahasiswa Indonesia. Jawaban detail telah dikirim lewat e-mail*

Redaksi

Mahasiswa buka dompet Krisis Moneter

Lebih dari 10.000 mahasiswa Indonesia terancam putus kuliah. Biaya kost naik, buku-buku kuliah mahal, SPP tidak akan dihapus, pekerjaan sulit dan harga sembilan kebutuhan pokok makin sulit terjangkau. Padahal konon merekalah calon-calon pemikir dan pemimpin bangsa ini. Di tangannya-lah nasib masa depan bangsa ini berharap. Sementara proyeksi yang paling optimis memberikan waktu tak kurang dari 3-5 tahun bagi ekonomi kita untuk pulih kembali.

Lalu, berapa banyak lagi mahasiswa Indonesia yang mesti berjatuhan akibat krisis moneter yang melanda negeri ini? Selebihnya tinggal menunggu masa depan gelap yang terhampar di hadapan mereka.

Masihkah kita menyebut diri orang beriman, jika kita tidur nyenyak sementara mereka menghadapi kesulitan?

Merespon problem besar ini, KASMI (Komite Aksi untuk Sosial dan Kemanusiaan Mahasiswa Indonesia) membuka dompet Krisis Moneter. Sebentuk kepedulian para dermawan yang memiliki kelebihan amanah

Erata

Ada beberapa kesalahan yang mengganggu pada *Balairung* edisi 28:

1. Rubrik halaman 03 seharusnya adalah Dapur
2. Wawancara tema halaman 21 seharusnya ada keterangan bahwa Edward Aspinall adalah peneliti gerakan mahasiswa Indonesia dari *University of New South Wales*, Australia.
3. Pada rubrik kesehatan halaman 54, seharusnya ada kepala judul: Pemanfaatan Obat Tradisional: Murah...dst
4. Pada iklan ucapan selamat halaman 36 yang tertulis Sari Laksmi Dewi,S.E. seharusnya Karyani Laksmi Dewi,S.E.

Dengan demikian kesalahan telah dibetulkan. Semoga pembaca maklum.

Redaksi

rezeki tentunya akan sangat berarti bagi mahasiswa yang tengah terjepit kesulitan membayar SPP, biaya hidup dan lain-lain.

Salurkan sumbangan Anda melalui:

1. Rekening BNI UGM Yogyakarta-Indonesia atas nama: S. Basuki, No. rekening: 228.005149558.901 atau
2. Wesel Pos: KASMI, PO Box 6401 YKGK 55221

Demikian besar harapan kami untuk kepedulian dan kepekaan para dermawan terhadap nasib masa depan mahasiswa Indonesia. Semoga tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan perlindungan sehingga tanah air tercinta kita segera bebas dari bencana sosial ini. Amin

Salam demokrasi dan reformasi

Suratno Basuki
KASMI (Komite Aksi Sosial dan Kemanusian Mahasiswa Indonesia)
PO Box 6401 YKGK 55221
Faks. (0274)886346

Lowongan Kerja

Yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa UGM. Salam Reformasi !

Dalam waktu dekat saya bekerjasama dengan ILO-*Women Expansion Compartemen* akan mengadakan proyek Pemberdayaan Wanita di bidang daur ulang sampah untuk lokasi proyek di Bantar Gebang Bekasi.

Untuk keperluan tersebut saya memerlukan beberapa staf yang tertarik pada bidang :

a. Pembuatan kerajinan dari kertas daur ulang.

b. Pembuatan kompos dari sampah organik.

c. Sisi kesehatan para pemulung: mungkin dokter muda/mahasiswa kedokteran/biologi.

Atau, bisa juga adik-adik yang mau ambil skripsi dari berbagai topik di atas, Insya Allah saya akan sediakan dana untuk beasiswa sebesar 200 ribu per bulan selama setahun.

Bila ada yang tertarik silakan kirim lamaran lengkap dengan foto dan pengalaman kerja ke :

Drs.Muhammad Rudi Wahyono
Divisi Lingkungan Hidup CIDES
Jl. Kebonsirih 85 lt.2 Jakarta 10340
Telp.390-8988 Faks. 390-8990 E-mail:mrwahyono@hotmail.com

Terobosan di Era Reformasi

Menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tahun 2003 serta membanjirnya arus informasi yang penuh persaingan dan tantangan ini, maka kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja, tapi harus benar-benar siap bersaing dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Namun waktu berbicara lain. Negara kita saat ini dilanda krisis berkepanjangan yang mengakibatkan porak-porandanya sendi-sendi perekonomian. Banyak usaha macet, bangkrut, collaps, bahkan hancur sama sekali. Pemutusan hubungan kerja di mana-mana, menambah angka pengangguran. Harga-harga naik tak terkendali, sembilan bahan pokok susah didapat, dan sebagainya.

Masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah sangat merasakan akibat krisis moneter ini. Tiada jalan lain kecuali kita harus menghadapinya dengan penuh tawakal, tegar, sabar, mawas diri, berusaha dengan cara yang halal, berdo'a serta memanfaatkan/mencari terobosan peluang-peluang baru.

Untuk itulah melalui rubrik ini saya ingin membantu pembaca dengan informasi peluang/terobosan usaha di era reformasi ini. Baik Anda karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, wirausaha, pengangguran, pegawai negeri/swasta dan sebagainya, apapun status dan profesi Anda silahkan kontak. Niat saya ikhlas membantu siapa saja tanpa memadang suku, ras, agama, keturunan dan sebagainya. Cukup kirimkan/hubungi lewat surat ke alamat di bawah ini, dan sertakan perangko balasan secukupnya. Jangan lupa sertakan nama, alamat kode pos yang jelas guna memudahkan balasan/kirimannya. Atas perhatian redaksi serta termuatnya surat ini saya ucapkan banyak terima kasih.

Suwandi N Prayitno
Tromol Pos 01 NYS
Karanganyar Solo 57793

Menparsenibud Ucapkan Selamat

Bersama ini saya ucapkan selamat kepada Majalah *Balairung* UGM atas penghargaan yang diberikan oleh Institut Studi Arus Informasi sebagai juara I lomba pers alternatif se-Indonesia.

Selain itu disampaikan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia. Semoga dengan upaya yang mulia ini, dapat memberikan pengaruh yang positif bagi sektor pariwisata Indonesia, khususnya bagi pembangunan pariwisata Yogyakarta.

Marzuki Usman
Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya
Republik Indonesia

Ucapan Terima kasih dari Internews

Dengan surat ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan *Balairung* untuk meluangkan waktu bagi kunjungan Internews yang diwakili seorang aktivis pers/radio/film Rusia Aleksey Simonov, dan memfasilitasi diskusi bertema *Pers Uni Soviet di Era Transisi, Perbandingan dengan Indonesia,* 31 Oktober 1998.

Kami berharap bahwa kerjasama ini akan dapat terus berlangsung di masa depan.

Rama Ardana
Fixer
PO Box 4448
Arcata, CA 95518
Tel +1 707 826-2030
Fax +1 707 826-2136

Selamat

Mengucapkan selamat atas wisuda:

Agung Widiatmoko, S.P
Mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Tri Rahayu Susanti,A.Md.
mantan staf perusahaan Majalah *Balairung*
Wisnu Martha Ade Putra,S.I.P.
mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
beserta wisudawan/wati UGM

Keluarga besar BPPM UGM

❐**Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM)** ❐**Ketua Presidium,merangkap anggota**:Ahmad Nasir(Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar)❐**Anggota presidium**: Irfan Muktiono (Ketua Departemen Penerbitan Majalah), Retno Indrawati (Sekretaris Umum SKM *Bulaksumur*), Nur Hidayati (Sekretaris Umum Majalah *Balairung*)

Magister Manajemen Gadjah Mada University *products*

KELOLA
Gadjah Mada University Business Review

enrich your business horizons

KELOLA *Gadjah Mada University Business Review* **merupakan jurnal akademik yang bukan hanya mempresentasikan analisis teoritis saja, namun juga aplikatif dan informasi praktis.**
Terbit 3 kali setahun (akhir Januari, Mei dan September)

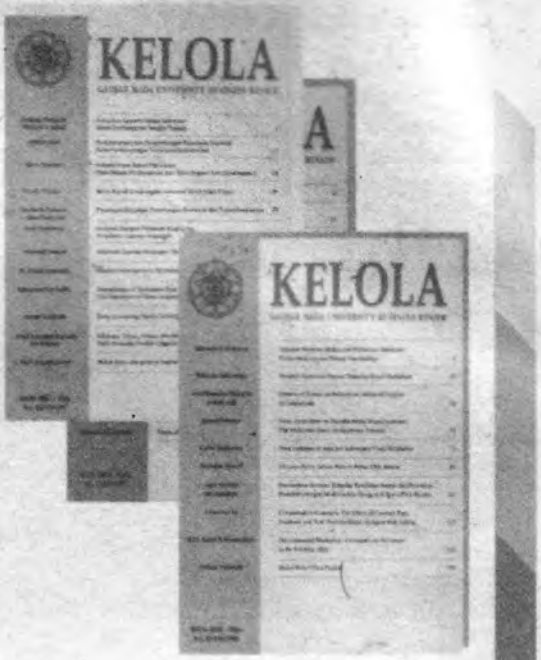

Biaya Langganan

	1 TAHUN	2 TAHUN
INDONESIA		
- Institusional	Rp50,000.00	Rp95,000.00
- Individual	Rp30,000.00	Rp55,000.00
ASIA		
- Institusional	US$40	US$75
- Individual	US$25	US$45
AUSTRALIA		
- Institusional	US$40	US$75
- Individual	US$25	US$45
U.S.		
- Institusional	US$60	US$110
- Individual	US$35	US$60
EUROPE		
- Institusional	US$50	US$90
- Individual	US$30l	US$50l

Cases in
Strategic Management

enhance your management skils

Contents:
- Aqua Golden Mississipi - Multi Bintang - Sari Husada - Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko - The Indonesian Clove Cigarette Industry - Ina Publikatama - Tigaraksa - Hero Supermarket - Gadjah Tunggal - The Indonesian Automobile Industry

Harga Rp 40.000,00 per eksemplar
plus ongkos kurir: untuk P. Jawa Rp 5.000,00; Luar P. Jawa Rp 10.000,00

telah terbit

Buku kumpulan artikel-artikel pilihan Program Studi MMUGM dalam

Telaah dan Studi Empiris
- Keuangan & Perbankan
- Manajemen Sumberdaya Manusia
- Pemasaran
- Kebijakan Pembangunan Ekonomi

dicetak terbatas

Ordering and Subscription to
Academic Publication MMUGM
Magister Manajemen Building,
Jl. Teknika Utara, Barek,
Yogyakarta 55281
Phone (0274) 511035, 515536,
Fax. (274) 564388
e-mail addres: mmper@yogya.wasantara.net.id
http://www.exindo.com/mm_ugm

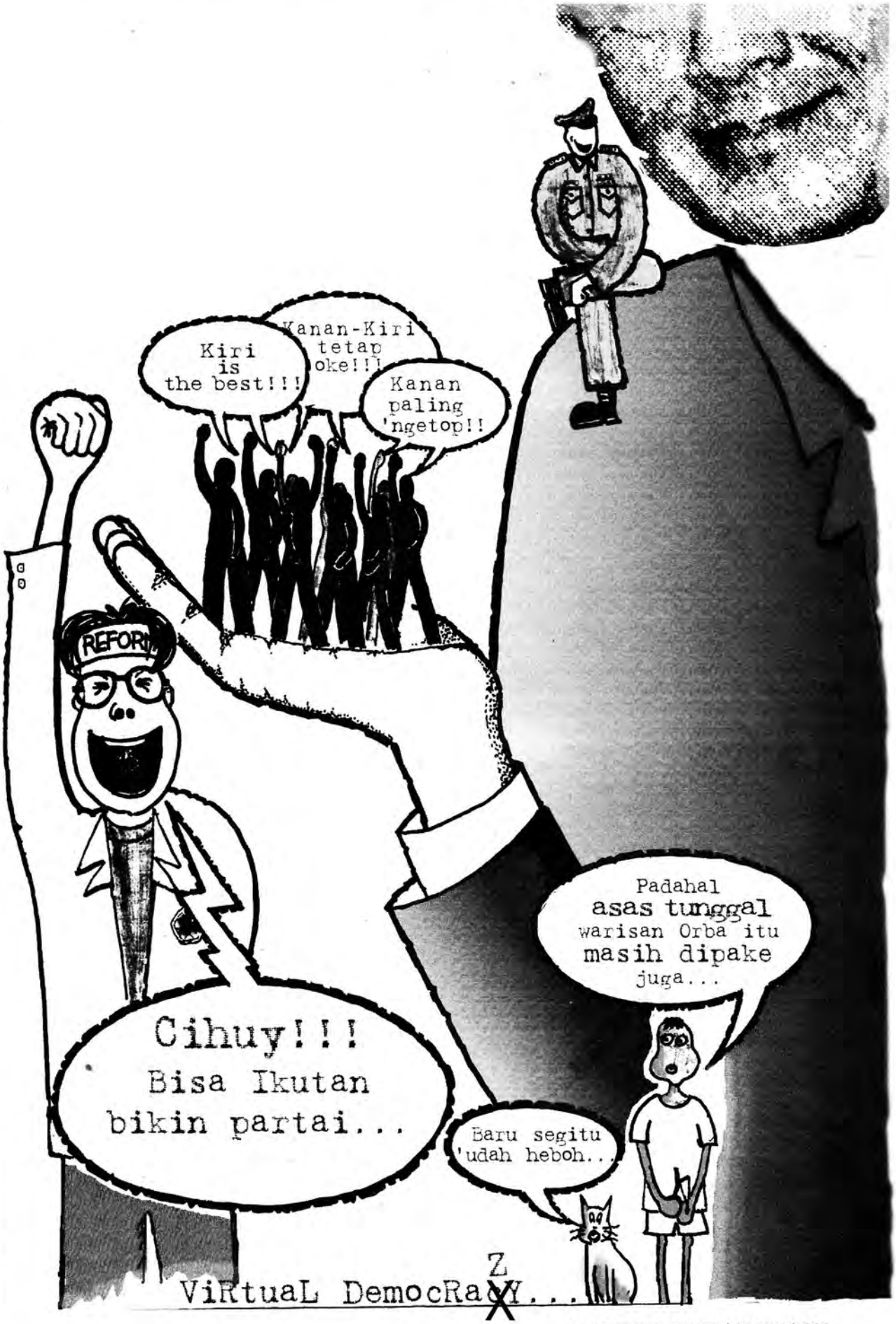

LALU RIZKI RAHMAN

Kiri Jalan Terus

Adalah filsafat sejarah Hegel, kemajuan dan perkembangan manusia hanya disebabkan oleh konflik-konflik, peperangan-peperangan, revolusi. Yaitu melalui perjuangan yang tertindas melawan penindasnya. Perdamaian dan Harmoni biasanya tidak membuat perkembangan apa-apa. Filsafat itu telah benar-benar mempesona Karl Marx, seorang ahli filsafat Yahudi-Jerman, bahkan ia mampu memecahkan kemandekan perdebatan pikiran Hegel. Kata Marx, "Filsafat Hegel berjalan atas kepalanya." Filsafat itu harus diputarbalikkan, yang dibutuhkan adalah tindakan politik, praxis. Lalu, mengalirlah ide-ide cerdasnya hingga lahir Marxisme.

Pemikirannya telah menjadi perdebatan dunia. Melahirkan kontroversi dan telah membagi dunia menjadi dua kubu, yang membenci dan mereka yang menempatkan segala harapannya terhadap Marx. Mengutip YB Mangunwijaya, anda tidak bisa memahami masyarakat dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin tanpa Marx. Siapa sih para perintis kemerdekaan kita yang tidak mempelajari Marxis.

Di Indonesia, sejak tahun 1965 jarum jam bergerak terbalik. Ajaran Marx yang sebelumnya mengilhami perjuangan para pendiri bangsa mendadak dilarang, menyusul kegagalan PKI melakukan kudeta (atau konspirasi militer dalam menumbangkan Soekarno dengan menjadikan PKI sebagai kambing hitam). Ajaran Marxisme lalu disimplikasi sebagai komunisme, justru paham yang dituduhkan oleh para ahli sebagai penyelewengan ajaran Marxis. Kegiatan sepihak penguasa waktu itu (Orba) berimbas pada upaya mengaburkan sejarah dengan mereduksi peranan kaum kiri dalam upaya memperebutkan kemerdekaan hingga pada lahirnya Pancasila, yang kalau dicermati benar-benar sangat bernuansa kiri.

DIALECTICS TRIAD, ANDY SENO AJI

Parahnya lagi, upaya seragamisasi pemaknaan itu kemudian menabrak persoalan-persoalan lain yang harusnya mensyaratkan kebebasan demi tumbuhnya demokrasi. Lihat saja, betapa secara sistematisnya rejim Soeharto melakukan pengejawantahan terhadap Pancasila dalam berpuluh-puluh butir sebagai aturan normatif yang serba tidak. Berikutnya juga berhasil memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya azas partai politik yang ada. Belum lagi dijadikannya stigma kiri sebagai senjata untuk membabat habis orang atau kelompok yang mencoba berbeda dengan sang diktator Soeharto.

Hegemoni wacana yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ternyata sangat membekas dan kentara. Ideologisasi serba satu telah menjadikan pembatasan itu sebagai kebenaran bagi sebagian masyarakat Indonesia yang kesadaran politiknya masih rendah rendah. Apalagi, kesadaran itu terus dihegemoni dan seperti dikatakan Hegel tidak terjadi dialektika yang sehat, dan larut dalam harmoni, maka tidak akan terjadi perubahan-apa apa.

Nah, perkembangan Indonesia untungnya tidak hanya sampai di situ. Penindasan telah melahirkan konflik hingga melahirkan perubahan yang cukup besar. Setidaknya bebat-bebat luka telah (terpaksa) dilonggarkan oleh rejim baru. Menjamurnya partai sementara ini diakui berbagai pihak sebagai pertanda baik bagi kelangsungan demokratisasi di Indonesia. Era multi partai, dimana banyak golongan masyarakat yang reaksioner memanfaatkan untuk menggalang kekuatan politik telah pula terjadi. Pertanyaannya kemudian apakah multi partai ini kemudian linear dengan multi ideologi?

Pertanyaan yang sebenarnya mendasar namun melahirkan jawaban yang lebih multi pula. Apalagi orang Indonesia ternyata belum seluruhnya siap untuk menerima perbedaan sebagai bagian hidupnya. Sementara di sisi lain salah satu persyaratan demokratisasi itu adalah kebebasan, termasuk kebebasan memilih ideologi tertentu. Memberikan ruangan yang sama terhadap perkembangan ide-ide yang diyakini membawa perubahan yang lebih baik.

Ideologi kiri, yang konon menjadi musuh negarapun mestinya juga diperlakukan sama. Kiri yang banyak diinspirasi oleh Marxisme, selama ini telah diperlakukan secara tidak adil. Pada tingkat ini, berarti ada pekerjaan besar untuk membongkar kultur yang sengaja dijejalkan untuk membangun kebencian terhadap ideologi kiri. Dengan cap-cap radikal, revolusioner, menghalalkan segala cara, bahkan dengan sepihak kiri selalu disamakan dengan komunis.

Tidak. Ide-ide perlawanan terhadap penindasan, kesejahteraan sosial itupun bagian dari kiri. Bahwa membongkar sejarah yang keliru terhadap pemahaman kiri adalah agenda yang penting. Juga menghilangkan ketakutan terhadap ide-ide Marxis karena ketakutan negara waktu itu semata-mata karena Marxisme akan menjadikan manusia itu kritis. Ini berarti, kiri bisa jalan terus.□

Hery Trianto

Masyarakat Multi Ideologi

Wacana "traumatik" komunisme terus saja direproduksi dalam perjalanan sejarah 32 tahun terakhir. Belakangan, isu ini dikorek lagi ke permukaan. Bicara tentang Kiri, lagi-lagi bisa subversif. Tak bisa ditawar, kondisi ini membuat proses demokratisasi lewat multi partai, menjadi tersendat-sendat.

Bebas Hambatan Ideologi Kiri

REPRO: FORUM

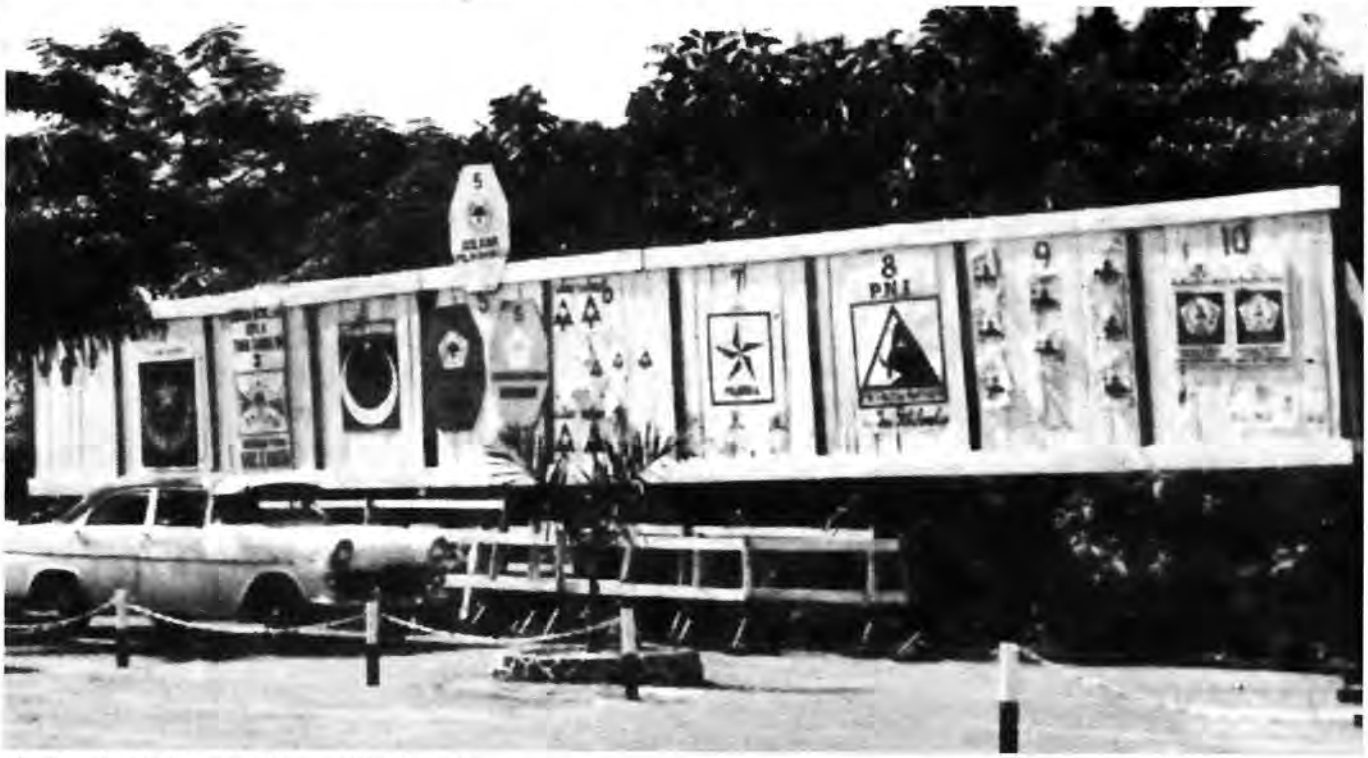

Multi partai mensyaratkan multi ideologi

Selama lebih dari tiga dekade, negara Orde Baru memperoleh pembenaran untuk mengamankan status quo dengan mereproduksi tiga bentuk "ancaman": separatisme, ekstrim Kanan (baca: Islam), dan komunisme. Upaya itu dilestarikan, bahkan pada era rejim Habibie ini, lewat pembentukan wacana secara konsisten dan sistematis, baik pada level struktural maupun kultural.

Ada baiknya kita kembali membuka catatan panjang tendensi politik yang dimunculkan selama Orde baru tersebut. Mulai dari pembantaian sekian ribu jiwa dengan isu komunisme pasca jatuhnya Soekarno, *holocoust* di Aceh, Timtim, dan Irian Jaya dengan tuduhan separatisme, sampai tuduhan ekstrim Kanan pada peristiwa Tanjung Priok. Ini belum ditambah stigma "Komunis", "Kekiri-kirian", "OTB", "Komunisme Gaya Baru", "Kiri Baru", serta cap-cap lain untuk membekukan kelompok-kelompok yang secara radikal menuntut perubahan. Partai Rakyat Demokratik adalah salah satu kelompok yang kena getahnya. Mereka dituduh "komunis" pasca 27 Juli 1996.

Contoh paling kontemporer adalah kasus Forum Kota. Kelompok yang getol menuntut mundurnya Habibie dan pembentukan Komite Rakyat Indonesia ini dianggap menggunakan cara-cara G.30.S/PKI dalam upaya pendudukan gedung DPR/MPR (*Republika*, 25/9). *Headline* pada harian itu menuliskan, "ABRI Waspadai Gerakan 30-S Forkot".

Ironis memang. Sebagai sebuah catatan sejarah yang tak kunjung lengkap dan terbuka, kisah G.30.S/PKI ternyata masih menjadi instrumen pemberangus gerakan pro-demokrasi yang cukup efektif.

Trauma atas ancaman komunisme yang terus direproduksi secara konsisten itu agaknya memang cukup hegemonik. Ini terlihat dari kuatnya isu tersebut menghiasi ruang publik. Dengannya, negara tetap memperoleh legitimasi untuk membungkam oposisi. Celakanya, kondisi seperti ini membuat sistem politik kita jauh dari wacana multi ideologi. Apalagi sejak awal, stigma "komunis" ini memang dihadirkan bersamaan dengan sikap anti wacana multi ideologi. Kedua hal itu dianggap sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Wacana multi ideologi kemudian secara sepihak digeser keluar dari "Demokrasi Pancasila" hingga sekarang.

Padahal di sisi lain, fenomena multi partai yang saat ini berkembang, bersinggungan dengan multi ideologi. Sebab, ruang aspirasi yang bebas bagi artikulasi kepentingan setiap partai, mensyaratkan adanya kebebasan cara pandang dan pola pikir setiap partai itu sendiri. Artinya, semua ideologi yang melekat pada setiap partai semestinya diberi ruang lebar untuk hidup secara wajar. Kondisi ini menjadi penting dalam kerangka pemenuhan prasyarat esensial dari demokrasi.

Dari sinilah sikap-sikap pesimis bermunculan. Akankah misalnya, sistem multi partai saat ini memberi ruang hidup bagi semua ideologi?

Liberalisasi Politik Malu-Malu

Partai baru yang sampai saat ini terus bermunculan, jumlahnya sudah lebih dari 100 partai. Pembentukan partai dari mulai tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat komisariat desa, dengan mudah bisa ditelusuri di media massa, atau undangan terbuka lewat selebaran dan poster di jalan-jalan.

Namun demikian, partai-partai baru ini hampir pasti akan mengalami kegamangan dalam sistem politik yang ada, apalagi arah dan bentuk revisi UU politik masih samar-samar.

Melihat fenomena ini, kecurigaan adanya stagnasi dalam transisi menuju demokrasi, tampaknya tidak bisa disepelekan.

Eep Saefullah, dosen Ilmu Politik UI, mengatakan bahwa meledaknya jumlah partai tak lepas dari reaksi atas jatuhnya Soeharto. Dua dekade teakhir selama Soeharto berkuasa ditandai dengan politik penyeragaman yang sangat ketat dan represif. Eep beranggapan bahwa politik penyeragaman yang mengalami pembalikan, akan ditandai dengan ledakan partisipasi politik yang tak tertahankan. "Itu keniscayan sejarah!" tandasnya.

Hampir senada, Soedjati Djiwandono menganggap kondisi ini masih wajar sebagai hasil represi politik selama ini. Pengamat politik CSIS ini beranggapan, banyaknya partai dengan sendirinya akan menyusut secara kuantitatif pasca pemilu. "Partai-partai kecil mungkin akan bisa berkoalisi, untuk menyalurkan aspirasinya," tambahnya.

Namun pada bagian lain, kejatuhan Soeharto yang cukup mengagetkan itu memunculkan semacam surplus kepercayaan diri pada semua komunitas. Kondisi ini melahirkan gelombang besar aspirasi politik yang tidak berangkat dari rumusan kolektif tentang aspirasi politik masyarakat. "Ada semacam kegagapan politik yang kemudian melanda, baik pada level massa maupun elite," ujarnya.

REPRO: ADIL

Eep Saefullah Fatah
Pembalikan politik penyeragaman

Pada level masyarakat sendiri, Eep melihat bentuk publik kita masih *prototype*. Publik diartikannya sebagai sebuah masyarakat yang punya aspirasi politik dan kemampuan mengartikulasikannya, serta memiliki perangkat-perangkat sosial yang mampu mendesakkan artikulasi politik mereka ke dalam sistem. "Yang kita miliki adalah kelahiran publik secara *caesar* pada usia kandungan yang belum cukup," papar Eep dalam sebuah analogi.

Menyoal Gerakan Kiri

Melihat kondisi di atas, sulit untuk kemudian mengharapkan adanya wacana aspirasi politik yang dibangun dengan bebas dan wajar. Termasuk di dalamnya, pemberian ruang bagi setiap ideologi untuk tumbuh.

"Kita tidak punya tradisi kompetisi, tradisi berbeda, tradisi kompromi politik," ungkapnya. Kesepakatan atas segala sesuatu, kata Eep, selalu dibangun dengan tekanan dan paksaan.

REPRO: FORUM

Soedjati Djiwandono
Menyusut setelah pemilu

Kesulitan yang sama juga akan ditemui ketika kita bicara tentang ideologi Kiri. Penggunaan isu-isu anti-Kiri, tetap sebuah reduksi besar dari aspirasi bernegara. Bahkan generalisasi Kiri yang secara serampangan biasa dilakukan penguasa, membuat bias besar atas *term* Kiri itu sendiri.

Wilson, Kepala Departemen Kerjasama Kepal PRD, memaparkan bahwa sejarah konsep Kiri dan Kanan, lahir dari Revolusi Perancis. Yaitu menggambarkan, dua kelompok yang ada di parlemen, masing-masing duduk di sebelah kiri dan kanan. Pihak di sebelah kanan mendukung monarki, sedangkan yang di kiri mendukung Revolusi Perancis. Sebuah revolusi dengan semangat kebebasan, emansipasi, persamaan, dan persaudaraan. "Nah, karena mereka yang di sebelah kiri itu radikal dan menentang monarki, kemudian *term* kiri dipakai untuk identitas suatu gerakan yang menghendaki anti kemapanan, suatu kekuatan yang menghendaki suatu revolusi sosial," tandas pentolan PRD yang pernah menghuni LP Cipinang ini.

Bisa dilihat bahwa keberadaan konsep Kiri, sejak semula berdiri sebagai oposisi dalam sebuah mekanisme kekuasaan. Keberadaan oposisi secara alamiah akan menjadi penyeimbang bagi proses pengambilan keputusan.

Pada perjalanan sejarah, makna gerakan Kiri dilanjutkan dalam tradisi melawan rejim otoriter di Amerika Latin atau Korea selatan. *Term* kiri dipakai untuk menunjuk suatu watak gerakan yang menghendaki suatu perubahan yang luas dan cepat. Dalam prakteknya, mereka banyak menggunakan metode-metode perjuangan kaum Kiri. Maka, perjuangan melawan rejim-rejim otoriter —baik program maupun figur-figurnya— biasanya muncul dari kaum Kiri.

Merujuk dari penggambaran ini bisa dilihat bahwa perjuangan gerakan Kiri secara essensial adalah perjuangan anti penindasan. Pada gilirannya, tak bisa dipungkiri ide-ide anti penindasan pada jaman global ini tak berhenti dan masih terus berkembang.

Sementara Aberson Marle Sihaloho, tokoh PDI Perjuangan merujuk pada sejarah menunjukkan bahwa ide-ide kenegaraan kita juga berangkat dari penggabungan ide-ide besar, Kiri ataupun Kanan. "Bung Karno sendiri mengakui, bahwa Pancasila adalah sublimasi yang mengangkat lebih tinggi, dari *Declaration of Independence* dan Manifesto Komunis," tuturnya. Ia menambahkan, beberapa praktek Orde Baru sendiri justru merujuk pada negara komunis. Seperti adanya partai tunggal yang terus menerus menjadi mayoritas, atau jargon "kepentingan negara di atas segala-galanya". Dengan legitimasi ini pulalah rejim Orde Baru mengeruk keuntungan kekuasaan dengan penguasaan dan kepemilikan modal.

Y.B. Mangunwijaya, bisa dikatakan orang yang paling konsisten "melegalisasikan" Kiri sebagai suatu alat perjuangan. Ia selalu memberikan catatan bahwa perjuangan kemerdekaan dan *nation building* adalah suatu cara Kiri. Sementara negara-negara komunis yang otoriter dan sentralistis dibangun dari ide yang paling Kanan. (Lihat Wawancara Tema: *Komunis itu Kanan*).

Penting juga untuk dibedakan

antara negara komunis dengan ide-ide komunisme-sosialisme. Gerakan-gerakan Kiri di Amerika Latin yang menggunakan ide-ide Marxisme didasarkan pada filsafat Marx yang anti penghisapan terhadap rakyat kecil. Marxisme sendiri, dengan ide-ide yang dikandungnya, seharusnya hadir memperkaya wacana kebangsaan kita.

Sayangnya, sejak awal negara telah memotong sosialisasi ide-ide Marxisme secara sistematis lewat berbagai regulasi. Regulasi yang sebetulnya diperlukan, bukan dalam bentuk pelarangan atas hak hidup ideologi tertentu, tetapi mengatur bagaimana mekanisme artikulasi politik dari setiap ideologi itu di dalam sistem.

"Kalau ternyata kelompok-kelompok kiri itu ingin hidup di sini, selama ada mekanisme politik yang sistemik yang mengatur sehingga artikulasi politik Kiri itu tidak merusak negara bangsa dan dasar-dasar fundamental yang sudah disepakati, saya kira tidak masalah," imbuh Eep.

Setelah dua penjelasan, lanjut Eep, barulah kita manfaat dari pemikiran radikal dengan basis Marxian. Walau sebagai ideologi politik, banyak negara -- Soviet Rusia dan China -- selalu mengalami distorsi yang besar terhadap ideologi Marxian. Sejumlah negara di Amerika menunjukkan praktek kekuasaan yang jelas bertentangan dengan pandangan ideologi Marxian. Chili, negara yang dianggap representasi dari sistem politik yang paling ideal dan sempurna, ternyata tak sempat berkembang karena terinterupsi oleh kekuasaan militer. Bahkan pada beberapa negara Eropa Barat, ideologi ini memberi banyak perubahan dan kebijakan politik yang sejalan dengan proses demokratisasi.

Arbi Sanit, dosen Ilmu Politik UI, mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap ideologi Kiri itu terlalu mengada-ada. "Hanya orang tolol yang mempelajari ideologi Kiri, atau mengangap ideologi Kiri jadi bahaya."

Perbedaan konsep antar partai juga memerlukan proses pengendalian konflik. Pancasila yang selama ini dianggap sebagai ideologi negara, menurut Arbi, tidak lagi harus dikembalikan saja pada fungsinya sebagai dasar negara, sehingga partai punya ideologinya sendiri," ujarnya.

Tawar menawar politik yang dibangun dari perdebatan ideologis, sebenarnya adalah suatu jalan menuju demokrasi. Sehingga, segala bentuk hegemoni anti Kiri, jelas merupakan reduksi terhadap konsep demokrasi. Membaca sejarah bisa disebutkan bahwa demokrasi liberal dan Pemilu 1955, adalah sebuah upaya yang paling demokratis yang pernah terjadi pada tatanan politik kita. Tidak seperti kekhawatiran saat ini, perbedaan pandangan dan ideologi kala itu justru mendekati kehendak demokrasi ketimbang kekerasan sosial, yang 43 tahun kemudian menjadi *phobia* bersama.

> **Ideologi yang berhasil mendapat dukungan dari rakyat adalah ideologi yang bisa memberikan solusi-solusi sosial, ekonomi dan politik yang terbaik pada rakyat**

Bagi Faisal Basri, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), kebebasan berideologi secara prinsipil diperbolehkan, sebagaimana kebebasan untuk tidak berideologi. Namun untuk konteks Indonesia, proses sosialisasi dan pendidikan politik adalah pilihan realistis. Sebab, kapabilitas sosial masyarakat saat ini belum teremansipasi. "Isu negara federal saja sudah kacau-balau. Betapa takutnya masyarakat itu. Apalagi komunis, trauma!" ungkapnya. "Pada prinsipnya, kafir juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan apa-apa. Apalagi yang namanya ideologi buatan manusia," tambahnya.

Tindakan-tindakan pemerintah yang merespon tuntutan masyarakat kalau dicermati tidak berangkat dari kerangka perubahan yang mendasar. Kalaupun kesan-kesan perubahan dimunculkan, tak lebih hanya konsesi-konsesi terbatas yang hanya menyentuh persoalan di permukaan. Permasalahan yang lebih substansial selalu saja tidak sungguh-sungguh disikapi. Penyikapan terhadap asas tunggal misalnya, tidak membangun wacana yang dialogis. Persoalan ideologi partai dianggap selesai, terumuskan dan mencapai sebuah standar idealnya. Hal itu justru menunjukkan wacana-wacana demokratis menjadi asing bagi kebudayaan kita secara keseluruhan.

Dwifungsi ABRI Kontra Multi Ideologi

Tentu bukan tanpa kepentingan politik, Syarwan Hamid beberapa waktu lalu kembali menegaskan keharusan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi partai di Indonesia.

"Jelas, mereka tetap menginginkan ideologi tunggal," tegas Arbi Sanit. Ia menegaskan, keberadaan asas tunggal adalah bagian dari strategi ABRI untuk mengontrol partai, dengan melakukan pengendalian ideologi.

Senada dengan pendapat ini, Faisal Basri berpendapat bahwa Dwifungsi menjadi penghambat utama proses demokratisasi. "Tidak ada gunanya suatu tatanan, kalau tatanan itu memberi *previlege*," ungkapnya.

Perjalanan ABRI yang menegaskan keberadaan asas tunggal, bukan hanya upaya menciptakan "musuh politik", namun juga mengisyaratkan adanya kepentingan militer atas kekuasaan.

Kemunculan ABRI di pentas kekuasaan terwujud justru ketika perdebatan politik dibangun dalam wacana ideologis. Wacana yang ideologis ini dipropagandakan bukan saja sebagai biang retaknya stabilitas politik dan ekonomi kala itu, tapi juga dijelmakan sebagai "trauma". Maka pada pertengahan 60-an, dengan alasan stabilitas nasional dan perbaikan ekonomi, ABRI makin mulus naik ke puncak kekuasaan di negeri ini.

Kemudian, hegemoni ABRI atas persatuan dan kesatuan bangsa yang dipertegas dengan doktrin Dwifungsi, makin mengkristalkan kekuasaan di tangan ABRI.

Karenanya, dalam menyikapi gelombang tuntutan demokratisasi belakangan ini, tampaknya ABRI akan menggunakan manuver-manuver yang sama. "ABRI akan mempunyai alasan untuk mempersatukan bangsa. Dan ABRI akan makin dominan

peranannya," papar Soedjati Djiwandono.

Pada bagian lain, Wilson memberi pilihan kepada partai-partai yang ada untuk lebih dulu berupaya mencabut Dwifungsi ABRI bersama-sama. Menurutnya, persoalan ini adalah persoalan semua partai, mencakup semua golongan dan ideologi, baik Kiri atau Kanan.

Tentang pencabutan Dwifungsi ABRI, Eep Saefullah berpendapat, hal itu merupakan sebuah kebutuhan sejarah, terkait atau tidak dengan multi partai. Proses ABRI menjadi instrumen kekuasaan, celakanya juga beriringan dengan proses sakralisasi Dwifungsi ABRI itu sendiri. Ia menunjuk kasus Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974, dan bagaimana militer Portugal mampu menjadi katalisator bagi transisi menuju demokrasi.

Pada konteks Indonesia, mengharapkan kehadiran ABRI sebagai katalisator, berbenturan dengan Dwifungsi ini. "Kalau disinggung soal Dwifungsi ABRI, seperti ada penolakan yang inheren dalam tubuh setiap militer," jelasnya. Ia beranggapan bahwa suasana psikologis rakyat sendiri tidak lagi berpihak pada militer. Bagaimanapun, penyimpangan lewat Dwifungsi yang menjadi alat legal kekuasaan ini, telah menjadi momok besar bagi bangsa ini. Bukan hanya itu, penguasaannya terhadap modal mengisyaratkan adanya kepentingan ekonomi yang sangat besar di belakang setiap penyikapan militer.

REPRO: JAWA POS

Faisal Basri
Kafir juga tidak apa-apa

Bagi Wilson, Dwifungsi ABRI harus dilihat sebagai musuh bersama. Sebab, ia tidak hanya menjadi bahaya bagi kaum Kiri, tapi juga berbahaya bagi ideologi-ideologi lain. "Tahapannya sekarang adalah bagaimana semua gerakan, dengan semua asas perjuangannya, membuat suatu koalisi yang luas untuk menghadapi musuh bersama itu," tegasnya.

"Pengalaman berjuang bersama menghadapi musuh bersama biasanya akan menumbuhkan kultur yang demokratis di antara sesama gerakan. Mereka merasakan jatuh bangunnya melawan kekuasaan yang memusuhi mereka," tambah Wilson.

Setelah perjuangan ini terselesaikan, barulah demokrasi multi partai bisa terwujud. Lebih jauh, proses perjuangan ideologi juga akan mendapat tempat. Ideologi yang berhasil mendapat dukungan dari rakyat adalah ideologi yang bisa memberikan solusi-solusi sosial, ekonomi dan politik yang terbaik pada rakyat. Di situlah seleksi alamiah terjadi. Wilson juga menambahkan bahwa hanya pada situasi demokrasilah, persaingan secara *fair* tanpa kekerasan, serta melalui mekanisme politik yang adil, bisa dilakukan.

TIMBUL/ DOK BAL

Arbi Sanit

Kebebasan Bersiasat

Di beberapa negara maju, diskursus tentang ideologi dianggap terlalu mengada-ada, omong kosong dan ketinggalan jaman. Catatan yang paling menarik dari kondisi ini, justru karena diskursus tentang ideologi di sana sempat berlangsung panjang dan berliku-liku.

Merujuk pada negara-negara Eropa Barat, saat ini semakin terasa bias-bias ideologi yang bermain dalam peta politiknya. Lihatlah kemenangan Partai Buruh, yang jelas sosialis, di parlemen Perancis atau Inggris. Atau teriakan keras Kanselir baru Jerman Gerhard Schroeder, "Saya seorang Marxis!"

Padahal tak bisa dipungkiri bahwa negara-negara itu memberlakukan sistem ekonomi pro-pasar yang kapitalistik. Jalan tengah yang mereka ambil adalah diberlakukannya program peningkatan kesejahteraan buruh, suatu imbas kritik atas kapitalisme. Di lain sisi, untuk menutupi kebangkrutan kapitalisme, siasat yang mereka lakukan adalah imperialisme modal ke negara-negara dunia ketiga.

Eep Saefullah membedah fenomena ini dengan merujuk pada kenyataan bahwa kesepakatan atas bangunan sistem politik di sebagian negara Eropa telah selesai. Baru kemudian terjadi pluralisasi ideologi ke tengah sistem politik. Karenanya, ketika ideologi komunis masuk, bukan sistem politik Eropa yang terdekonstruksi, tapi justu sebaliknya. Ideologi komunis telah beradaptasi, dan menghasilkan *Euro Communism*. Beberapa cirinya antara lain, menerima model parlementer, dan tidak menempuh jalan revolusi.

Bahkan menurut Soedjati, bisa dikatakan perjuangan ideologi di Eropa, Amerika atau negara maju lainnya sudah selesai. "Saat ini yang ada adalah sama-sama menegakkan demokrasi," tambahnya.

Untuk konteks Indonesia, penerimaan *taken for granted* atas ideologi kapitalisme bisa dikatakan suatu lompatan sejarah yang belum tentu baik pula. Bagaimanapun, wacana global yang dibangun dengan senjata imperialisme modal saat ini telah berpengaruh dalam wacana sosial-politik Indonesia. Ia menjadi satu-satunya proses ideologisasi terselubung, dan menjebak kita dalam ketergantungan terhadap dunia Barat.

Bukan itu saja, imbas ke dalam sendiri menjadi catatan panjang yang cukup menyedihkan. Ideologi pertumbuhan ekonomi menjadi alat penguasaan ekonomi dari penguasa dan kapitalis konconya.

Wacana perdebatan ideologi sudah saatnya dikedepankan. Menutup mata dari upaya melakukan redefinisi atas bagaimana suatu negara melakukan penyikapan ekonomi, sosial-politik, atau kebudayaan, dengan mekanisme yang demokratis, adalah bunuh diri!□

M.Ugoran Prasad
Aris Mustafa, Asep Mulyana, M. Bustom, Melanie Wahyu W

REPRO : FORUM

Kiri yang Diabaikan

Tuduhan komunis untuk kelompok kritis
Simplikasi gerakan Kiri oleh Orba

Sejarah memang milik orang-orang yang menang dalam pertarungan-pertarungan kepentingan. Karenanya, sejarah selalu mengalami **rekonstruksi**, tergantung siapa yang berkuasa. Demikian pula dengan riwayat perlawanan rakyat menghadapi kolonialisme Belanda. Wacana **gerakan radikal (baca: Kiri)** yang sebenarnya punya peran penting kala itu, telah tenggelam dalam catatan-catatan sejarah resmi.

Rejim Orde Baru secara sistematis amat sukses mengkonstruksi fakta-fakta sejarah secara sepihak untuk mendukung *status quo* kekuasaannya. Penerbitan buku putih G.30.S/PKI adalah contoh betapa rejim menginginkan tafsir tunggal atas sejarah. Ini dibuktikan dengan pelarangan sejumlah buku dengan versi lain yang mengungkap peristiwa kelam itu.

Lebih jauh, rekonstruksi sejarah yang bias itu bukan saja dilakukan lewat penyusunan buku-buku sejarah, tapi juga lewat wacana kultural yang lain. Dalam film-film perjuangan misalnya, digambarkan bahwa perlawanan rakyat mengusir kolonialisme seolah-olah lekat dengan perjuangan bersenjata. Sementara perlawanan melalui cara-cara sipil, seperti diplomasi, tulisan-tulisan kritis di media-media alternatif, dan pembentukan wadah-wadah politik yang ideologis waktu itu, hampir tidak mendapat tempat.

Penulisan sejarah dengan derajat bias yang sangat lebar semacam itu jelas mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya. Apalagi jika itu disertai tendensi politik tertentu. Peran gerakan Kiri menentang kolonialisme Belanda yang tak pernah terekspos dalam catatan sejarah yang resmi, mengindikasikan hal itu.

Tentang Kiri

Kiri, sebuah terminologi yang masih diperdebatkan, ternyata pernah sangat kental mewarnai perjalanan kebangsaan Indonesia. Dalam sejarah pemikiran Barat, Kiri sangat identik dengan ide-ide Karl Marx, filsuf Jerman yang berhasil mengungkap

penghisapan manusia lewat determinasi ekonomi.

Namun demikian, gerak kaum Kiri di Indonesia memberi makna lain bagi *term* Kiri itu sendiri. Menurut Taufik Abdullah, golongan Kiri adalah orang atau kelompok yang menentang kekuasaan, dan kritis terhadap pergerakan kebangsaan.

Pendapat serupa diungkap oleh Prof. Dr. Deliar Noer. "Yang Kanan *establish*, yang Kiri itu menolak. Yang menolak itu biasanya adalah orang-orang berhaluan lebih merakyat, lebih keras terhadap *establishment*, radikal, dan vokal," ungkapnya.

Pramoedya Ananta Toer punya definisi lebih tegas. Kiri, menurutnya, adalah golongan yang berpihak pada massa besar rakyat. Dan, Marxisme memberi kontribusi besar bagi golongan ini. "Tanpa mengenal ide-ide Marxisme, tak mungkin terjadi perlawanan oleh rakyat. Sebab, ide Marx inilah yang membuka mata rakyat bahwa selama ini mereka tertindas," ujar sastrawan Lekra ini.

Salah satu ajaran pokok Marx, membagi masyarakat dalam dua kelas, kelas borjuis dan proletar. Kelas pertama adalah kelas yang melakukan penghisapan terhadap kelas yang lain untuk akumulasi modalnya. Sedangkan kelas proletar merupakan orang-orang yang dieksploitasi oleh sistem kapitalisme.

"Ide-ide semacam inilah yang kemudian banyak menginspirasi para tokoh gerakan kemerdekaan seperti Hatta, Tan Malaka, Soekarno," tandas Taufik.

Gagasan yang ideologis ini tentu tidak lahir begitu saja. Ada basis material masyarakat yang melandasinya. Jauh sebelum pergerakan nasional muncul, kemiskinan telah sedemikian akut. Tentang hal ini, Ir. Soekarno berkata, "Kita ini hidup hanya sebenggol. Kemerdekaan ini tidak dimulai karena karena kita ingin merdeka tapi dimulai dengan kesadaran akan adanya kemiskinan dan keterbelakangan."

Menurut catatan Soe Hok Gie (1990), kemiskinan waktu itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang menindas rakyat, seperti kebijakan agraria di bidang perkebunan. Rakyat diharuskan menyerahkan sawahnya untuk ditanami tebu dan kopi. Selanjutnya, lahan petani menjadi ladang utama perkebunan-perkebunan Belanda. Akibatnya, rakyat tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan menurut laporan komisi Belanda, pada tahun 1900 kehidupan rakyat makin parah. Makanan pokok rakyat dari beras berganti jagung dengan apar pisang. Juga banyak dijumpai para ibu yang menjual anaknya ke pasar. Belum lagi wabah pes akibat buruknya perkampungan penduduk.

Kondisi itu kemudian menimbulkan ketidakpuasan secara umum. Inilah akar pergerakan nasional Indonesia. Ketika kondisi buruk rakyat bersinggungan dengan ide marxisme, para tokoh pergerakan menyadari bahwa rakyat telah dieksploitasi. Kesadaran ini mendorong para tokoh gerakan mengadopsi ide-ide [illegible]. Hal ini diakui Onghokham. "Masalah-masalah sosial ini, menjadi basis atau landasan bagi berkembangnya gerakan Kiri," katanya.

Awal Pergerakan Kiri Indonesia

Pada dekade awal abad XX, ruat-ruat pergerakan nasional mulai tampak. Dimulai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) tahun 1912, wadah organisasi bagi pedagang-pedagang pribumi.

SI yang pada awal pendiriannya hanya untuk menandingi para pedagang Tionghoa, kemudian menjadi radikal. Terutama setelah Semaoen, tokoh *Indische Sociaal Democratishe Vereeninging* (ISDV), duduk dalam Central Sarekat Islam (CSI). Masuknya orang-orang ISDV dalam SI, menurut Parakitri, karena ISDV tidak dapat berkembang tanpa dukungan orang-orang pribumi.

SI tak hanya menggarap pedagang, tapi juga buruh pabrik, percetakan, dan pegawai kereta api. Pemogokan yang dilakukan SI, di antaranya pemogokan buruh mebel di Semarang, dan buruh percetakan harian *Niew Courant* tahun 1918. Menurut Takashi Shiraishi, SI merupakan organisasi pertama yang

REPRO: FORUM

Perintis kemerdekaan sedang berpose
Siapa di antara mereka yang tidak Kiri?

menggunakan pemogokan untuk mendesakkan tuntutannya. Bahkan menurut Parakitri, ketika itu dikenal raja mogok dari Yogyakarta, yaitu Soerjopranoto dengan wadah *Personeel Fabriek Bond* (PFB). Soerjopronoto memimpin beberapa pemogokan terutama di pabrik gula untuk menuntut kesamaan upah, persamaan hak buruh Belanda dengan buruh pribumi, perbaikan kondisi kerja, pengurangan jam kerja, serta tambahan gaji lembur.

Dalam waktu enam tahun, SI telah berubah dari organisasi kelas menengah (pedagang) menjadi organisasi kerakyatan. Perubahan ini tak lepas dari pecahnya SI menjadi SI Merah (Semarang) dan SI Putih (Surakarta). SI Semarang lebih condong ke ISDV, sedang SI Surakarta lebih dekat dengan Tjokroaminoto. ISDV didirikan tanggal 4 Mei 1914. Bersama SI, ISDV membawa angin baru dalam pergerakan Indonesia. ISDV-lah yang pertama kali menawarkan ide-ide Marxisme untuk perjuangan rakyat Indonesia. Mereka berpendapat, penderitaan rakyat Indonesia diakibatkan struktur masyarakat yang ada, yaitu struktur masyarakat jajahan yang diperas oleh kaum kapitalis Belanda. Bagi ISDV, solusinya adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang penting untuk hajat hidup orang banyak. Gagasan–gagasan inilah yang disebarkan oleh propagandis ISDV.

Tahun 1920-an, pemerintah Belanda makin represif. Namun, situasi tersebut tidak memadamkan api perlawanan. Ini dibuktikan dengan berdirinya Partai Komunis di Hindia (1920), yang kemudian tahun 1923 berganti nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Tokoh yang memprakarsai kelahiran PKI, antara lain Sneevlit, Semaoen, Bergsma dan de Baars.

Munculnya PKI makin menguatkan pengaruh marxisme dalam kancah pergerakan nasional. Terutama secara ideologi. PKI mulai membangun hubungan dengan Komunisme Internasional (Komintern) di Uni Soviet. Bahkan tercatat nama Tan Malaka sebagai agen Komintern untuk wilayah Asia. Khusus mengenai Tan Malaka, ia dikenal seorang komunis yang nasionalis karena ia meletakkan perjuangan komunis sesuai dengan dialektika masyarakat Indonesia sendiri.

REPRO : TEMPO

Pramoedya Ananta Toer

Menurut Pram, PKI adalah partai politik pertama yang menggunakan nama Indonesia. M.C. Ricklefs (1991) mencatat, dalam propagandanya PKI lebih banyak menarik kaum abangan dengan menggunakan jargon-jargon yang bersifat lokal. Seperti ungkapan "sama rata, sama rasa" dan "rawe-rawe rantas malang-malang putung" oleh Mas Marco Kartodikromo. Sebuah ungkapan yang sarat ide-ide sosialisme menuntut solidaritas perjuangan.

Atau, Haji Misbach. Tokoh SI Surakarta yang berubah haluan menjadi salah satu propagandis PKI. Dia populer karena pemikirannya tentang "Islamisme Komunisme". Dua hal yang dianggap sangat kontradiktif, bagi Misbach adalah dua hal yang sifatnya sama bahkan saling mengisi.

REPRO : FORUM

Taufik Abdullah

Sampai kurun waktu tahun 1926, pergerakan Indonesia benar-benar menunjukkan sifat revolusionernya. Mereka melawan penindasan, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Puncaknya adalah pemberontakan PKI tahun 1926. Sebuah usaha pemberontakan pertama yang menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, pemberontakan ini gagal karena ketidaksiapan PKI sendiri.

Tan Malaka menyebutnya pemberontakan yang abortif. Atau, *Infantile disorder*, demikian disebut Arnold C. Brackman dalam "*Indonesian Communism: A History*". Akibatnya, setelah pemberontakan itu pemerintah kolonial melarang keras kegiatan politik yang berbau menghina, menyebarkan kebencian dan melawan pemerintah. Pelarangan ini memaksa semua wadah perlawanan bergerak di bawah tanah.

Pada tahun 1927, karena ketidaksesuaiannya dengan Komintern tentang Pan Islamisme, Tan Malaka keluar dari PKI. Secara rahasia, ia mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, dengan sejumlah pemikirannya yang dirumuskan dalam Madilog.

Tahun-tahun setelah pemberontakan 1926 sampai 1935 sering disebut tahun yang hilang (*The lost year*). Banyak pemimpin pergerakan yang pergi ke luar negeri, dibuang ke Boven Digul, Irian Jaya, atau menghilang. Haji Misbach misalnya, dibuang ke Tanah Merah dan meninggal di sana.

Dalam rentang waktu tahun 1927-1932, kualitas perjuangan politik di Indonesia mengalami peningkatan. Perjuangan ketika itu diwujudkan lewat pembentukan partai politik modern dengan strategi-taktik politik tertentu. Nasionalisme atas nama kemerdekaan Indonesia dilontarkan dalam setiap rapat umum. Setiap tokoh gerakan mendirikan partainya sendiri menurut pemikiran yang dianutnya. Soekarno dengan PNI, Tan Malaka lewat PARI, atau Hatta dengan PNI-Baru.

Partai-partai itu melontarkan gagasan mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka bergerak dengan metode non-kooperatif lewat koalisi partai, seperti Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI). Namun ketika Soekarno ditangkap tahun 1933, serta Hatta dan Sjahrir dibuang, pergerakan Indonesia mengalami moderasi dengan sangat dominannya metode kooperatif.

Ketika kekuasaan Jepang mulai

ditancapkan di Indonesia tahun 1942, semua gerakan baik Islam, Komunis maupun Nasionalis dilarang. Tetapi menurut Pram, PKI pada masa itu masih bergerak. "Waktu pendudukan Jepang masih ada PKI yang melakukan sabotase dan pemberontakan tangki minyak, menenggelamkan kapal dan lain sebagainya," tutur Pram.

Para pemimpin pergerakan yang lain banyak terjun dalam organisasi buatan Jepang, seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka terlibat dalam Badan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Sedang perjuangan bawah tanah dilakukan Amir Syarifudin lewat Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).

Kekuatan gerakan Kiri mampu mendesak diproklamasikannya kemerdekaan di luar skenario Jepang. Kaum muda yang digerakkan oleh Wikana, Sukarni dan lain-lain berhasil menuntut Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Kiri Pasca Kemerdekaan

Menurut Imam Yudotomo, kekuatan gerakan Kiri mampu mendesak diproklamasikannya kemerdekaan di luar skenario Jepang. Kaum muda yang digerakkan oleh Wikana, Sukarni dan lain-lain berhasil menuntut Soekarno Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka ini dikenal sebagai pemuda-pemuda Kiri. Sehingga kalau dilihat konstelasi politik waktu itu, maka orang-orang Kirilah yang mendorong kemerdekaan ini.

Kekuatan Kiri ini juga tercermin dari kepercayaan yang besar terhadap Partai Sosialis, terutama ketika Sjahrir memegang kekuasaan di awal pemerintahan RI. Era demokrasi liberal-parlementer pasca proklamasi, golongan Kiri empat kali memegang tampuk pemerintahan. Kabinet pertama, kedua, ketiga dipegang oleh Sjahrir, dan keempat oleh Amir Syarifudin.

Namun demikian persaingan antar ideologi politik pun makin memuncak. "Waktu itu terjadi persaingan ideologi, partai-partai cakar-cakaran sehingga melemahkan sistem pemerintahan pada waktu itu," ungkap Taufik Abdullah.

Namun peran Kiri tetap signifikan, terutama menghadapi pembentukan negara serikat dalam perjanjian Renville dengan Belanda pasca agresi militer. Gerakan Kiri yang tergabung dalam FDR (PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, Partai Murba) menolak konsep federalisme yang ditawarkan Belanda.

Adapun persaingan politik itu memuncak pada peristiwa Madiun ketika Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berubah menjadi PKI berusaha mendirikan pemerintahan Front Nasional di Madiun.

Namun, usaha ini gagal karena ketidaksiapan PKI dan simpati rakyat yang minim, sehingga dengan mudah tentara RI menggulung pelaku-pelaku pemberontakan Madiun.

Pemimpin PKI/FDR seperti Amir Syariffudin, Tan Ling Djie, Muso ditangkap dan ditembak mati. Peristiwa Madiun ini, menurut Sok Hok Gie (1997), tak bisa dilihat hanya dari satu sisi, yaitu sebagai usaha PKI untuk merebut kekuasaan RI. Namun, ada teori lain yang menyatakan bahwa PKI dijebak. Teori ini dikenal sebagai Teori Konspirasi yang diyakini oleh sumber-sumber PKI. Teori ini menyatakan, ada ketakutan Amerika Serikat akan pengaruh komunis di Indonesia, sehingga PKI harus dihancurkan. Apalagi Amerika pada waktu itu sangat berpengaruh dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Jaman di mana persaingan antar partai sangat keras dan ideologis ini, disebut Sok Hok Gie sebagai masa revolusi politik, yang ironisnya menelan anak-anak revolusinya.

DOK BAL

Parakitri T. Simbolon

Demokrasi Terpimpin

Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1950, peran kaum Kiri masih kentara, khususnya pada pemilu tahun 1955. Pemilu yang dikatakan paling demokratis ini memunculkan 4 partai besar, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Partai Kiri lain selain PNI dan PKI, seperti PSI dan Murba hanya mendapat suara yang kecil. Menurut Imam Yudotomo, Kekalahan PSI karena partai ini elitis dan tidak populis. "Sementara Murba, dengan tawaran ideologi yang kurang menarik, ia gagal menarik massa," demikian diungkap staf ahli *Central For Social Democatic Studies* (CSDS) ini dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

Setelah pemilu 1955, intensitas konflik antar partai sangat tinggi, namun tidak ideologis. Hal ini dibuktikan dengan jatuh bangunnya kabinet. Mosi tidak percaya dengan gampang dijatuhkan oleh partai oposisi, sehingga Badan Kontituante gagal untuk merumuskan UUD.

Selain itu, terjadi polarisasi kekuatan politik antara Soekarno dengan Angkatan Darat (AD). Soekarno yang merasa terancam dengan AD, kemudian mengukuhkan kekuasaannya lewat Dekrit 5 Juli 1959. Dengannya, Soekarno menjalankan kekuasaan secara penuh atas nama demokrasi terpimpin. Hal ini ditentang oleh PSI dan Masyumi, sehingga Soekarno menyapu bersih keduanya. PSI dan Masyumi dibubarkan tahun 1960.

Lewat demokrasi terpimpin ini pula, Soekarno membubarkan Badan Konstituante, dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang diwakili oleh PNI, PKI, dan NU. Pada masa ini, menurut Ricklefs, Soekarno menguraikan ideologinya yang disebut Manipol Usdek.

Soekarno menghendaki adanya persatuan antara Nasionalisme,

Agama, dan Komunisme. Dengan pemikiran ini, Soekarno menyatakan Nasionalisme (PNI, Agama (NU), dan Komunisme (PKI) merupakan kekuatan yang sama-sama berperan dalam pemerintahan. Komposisi ini menguntungkan PKI. Ketika PSI dan Murba dilarang pada tahun 60-an, PKI yang didukung Soekarno berhasil meraih massa besar. Hal ini dibuktikan dengan anggota organisasi-organisasi *underbouw*-nya yang berjumlah ribuan. Tahun 1962, PKI tercatat sebagai partai komunis terbesar kedua setelah Uni Soviet. Tapi sekali lagi, PKI berhasil ditindas. Peristiwa berdarah G.30.S menjadi alasan AD untuk menghabisi gerak PKI. Apa yang sebenarnya terjadi di bulan berdarah ini tak pernah diketahui secara pasti. Menurut Parakitri, secara umum ada beberapa teori besar yang menganalisa kekalahan PKI. *Pertama*, karena PKI lebih mengutamakan nama ketimbang menggalang kekuatan massa. *Kedua*, Karena dalam masyarakat Indonesia tidak tercipta dikotomi kelas. Sebab buruh Indonesia masih bisa pulang kampung. Sehingga, buruh yang diperkirakan akan melawan ketika alat produksinya diambil, tidak terjadi.

Sebuah Perjalanan

Menyimak sejarah Indonesia tak bisa lepas dari pengaruh perkembangan sejarah dunia. Seperti anggapan bahwa kemenangan kaum Bolshevik di Rusia tahun 1917 (Revolusi Oktober) menginspirasi berdirinya PKI. Namun demikian, menurut Soe Hok Gie, hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena ketika terjadi kemenangan kaum Bolshevik, nama-nama seperti Marx, atau Lenin masih sangat jarang di telinga tokoh-tokoh waktu itu. Hanya Sneevit-lah yang secara eksplisit menulis tentang Marx untuk menanggapi kemenangan tersebut. Lagi pula, munculnya gagasan Marxisme di Indonesia bermula dari suatu kondisi ekonomi yaitu kemiskinan. Jadi tidak bersifat ideologis.

Bagaimana gagasan ini berkembang bisa dilihat dalam dua proses. *Pertama*, melalui perbenturan dengan kondisi sosial masyarakat. Kemiskinan telah membuka mata rakyat bahwa mereka ditindas. *Kedua*, bisa dikatakan lebih ideologis karena melalui jalur pendidikan. Para pemuda Indonesia yang bersekolah di Belanda terlibat dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Mereka mengenal Marx lewat diskusi-diskusi dan persentuhannya dengan organisasi-organisasi sosialis di Belanda. Dari dua proses ini kemudian lahir banyak varian dalam gerakan Kiri.

REPRO: KOMPAS

Dr. Onghokham
Masalah sosial basis gerakan Kiri

Secara umum, Imam Yudhotomo membagi gerakan kiri dalam empat varian. *Pertama*, golongan komunis yang menjadi anggota PKI, berhaluan komunis internasional, menganut ajaran marxisme-leninisme, pemikiran Mao, ataupun Stalin. Tokohnya Semaoen, Darsono, Aidit, Muso dan lain-lain. *Kedua*, golongan sosialis. Mereka tergabung dalam PSI dan lebih memilih jalan seperti kaum sosial demokrat Eropa. Dalam perkembangannya, PSI pecah menjadi Partai Sosialis (PS) dan PKI. Tokohnya antara lain, Sjahrir, Supeno, Subadio dan lain-lain. *Ketiga*, kaum Murba yang tergabung dalam Partai Murba. Dalam konstelasi gerakan Kiri, kaum Murba ini sering disebut Trotskys. Yaitu, penganut ajaran perjuangan senjata tanpa henti. Tokoh utamanya adalah Tan Malaka, Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik dan lain-lain. Sedangkan *Keempat*, kaum Marhenis. Marhaenis berasal dari ajaran Soekarno sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Tokohnya, Sukarno sendiri, Mr. Sunaryo dan lain-lain.

Selain keempat pengelompokan besar di atas, banyak kelompok kecil yang menamakan diri sebagai orang Kiri. Misalnya, Angkatan Komunis Muda (Akoma), Partai Buruh, PKI Merah, dan ada juga yang sama sekali tidak tergabung dalam partai manapun.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan Kiri bukan hanya PKI semata. Paling penting, gerakan Kiri di Indonesia, ternyata tidak bisa digeneralisir dengan sangat sederhana—seperti yang dilakukan Orde Baru selama ini. Perlu pemahaman yang kompleks, detail dan integral agar tidak terjadi bias dalam memahami gerakan Kiri.

Menurut Onghokham, Kiri itu sebuah gerakan yang pernah besar di Indonesia tetapi tidak pernah menang. Khusus PKI, ia memang pernah sebagai partai besar tetapi tidak pernah mengakar. Hanya besar nama tetapi tidak pernah besar dalam arti yang sebenarnya. Hal yang amat berbeda dengan gerakan komunis di Vietnam.

Garis umum yang dijadikan patokan gerakan Kiri adalah anti imperialisme, anti kapitalisme, dan pro gotong-royong.

Stigma Kiri yang dikenakan Orde Baru terhadap lawan politiknya, bukan saja telah membuat reduksi besar atas *term* Kiri, tapi juga telah mengaburkan sejarah. Sejarah yang bercerita tentang sebuah bangsa yang sedang membangun jati dirinya. Dan, orang-orang Kiri pernah punya catatan penting di sana.❐

Paling penting, gerakan Kiri di Indonesia, ternyata tidak bisa digeneralisir secara sangat sederhana seperti yang dilakukan Orde Baru selama ini. Perlu pemahaman yang kompleks, detail dan integral agar tidak terjadi bias memahami gerakan Kiri.

Melanie Wahyu Wulandari
M. Bustom, Aris Mustafa, M. Ugoran Prasad, Asep Mulyana

YOU CAN BE MORE THAN JUST A BUSINESSMAN

Globalisasi tidak hanya berdampak pada makin menipisnya batas-batas negara sebagai akibat dari pencapaian teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Proses mendunia ini secara perlahan tapi pasti akan segera mengubah peran kepemimpinan dari pemimpin - pemimpin politik negara kepada pemimpin bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional, *Multi National Corporation (MNC).* Pemimpin bisnis akan memimpin para pemimpin. Inilah **visi *BLC-Business Leadership Center ,to lead the leaders.***

Dalam kasus kepemimpinan di Indonesia misalnya, sumber rekrutmen seorang menteri kabinet tidak lagi terbatas pada kalangan militer, partai politik atau akademisi. Para pemimpin bisnis mulai diperhitungkan, dan hasilnya, mereka tak hanya sekedar bisa menjadi menteri, lebih dari itu mereka bahkan mampu mencetak berbagai prestasi mengagumkan. Argumennya, kecuali menguasai secara genuine substansi masalah atau product knowledge, mereka- karena terbiasa hidup mapan-juga lebih terhindar dari kecenderungan korup. Inilah dunia yang berubah secara positif. Perubahan sebagai hasil kreasi pemimpin bisnis selama berbilang tahun.

BLC berobsesi tidak cuma bisa bikin sekadar menteri.

Ke arah perubahan positif inilah **BLC** akan menjejakan langkahnya dengan **komitmen BLC untuk terus berlatih dan bersaing tanpa henti.** Berlatih dan bersaing membangun sosok pemimpin bisnis yang tak semata-mata mencari harta dan kekuasaan, namun pada saat yang sama mengembangkan **misi BLC mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan umat manusia.** Model pemimpin-pemimpin bisnis murah hati, *the generous business leaders !*

STRATEGI

 # Melatih anggota menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan bisnis, visi, strategi dan kebijaksanaan bisnis serta ketrampilan berwirausaha di era global.

 # Menawarkan berbagai kesempatan dan fasilitas mengembangkan usaha dan profesi

PROGRAM

 # Business Leadership Training
 # Joint Venture
 # Loan
 # Advising and Capital Injection
 # Agency and Commissioner
 # Contacts

AFI/BAL ADVERTISING

BLC
Business Leadership Centre
Wisma G E H A, Jl.Timor No. 25 Jakarta Pusat 10310 Telp.62-21-3100965 (Hunting), Fax. 62-21-2305461

YB Mangunwijaya:

Komunis itu Kanan

ISRAR A/THE JAKARTA POST

Bagaimana anda melihat Pancasila yang di-ideologi-kan?

Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah *platform* bersama, lapangan sepakbola bersama dimana orang punya aturan yang sama. Pancasila itu aturan. Kalau di kampus mungkin disebut pegangan kerja. Semua negara begitu. Amerika juga punya. Negara dengan ideologi berbeda punya aturan yang sama. Saya pernah bilang pada Dita Indahsari (Ketua Persatuan Perjuangan Buruh Indonesia, PRD-red), kenapa *nggak* suka Pancasila? Karena mereka, katanya, sosial demokrat. *Lho* Pancasila itu sosial demokrasi. Baca saja keadilan sosial, kerakyatan, kemanusiaan. Itu Kiri.

Artinya, ideologi Kiri bisa diberi ruang?

Bisa saja. Pancasila itu Kiri. Keliru, kalau Pancasila itu tidak Kiri. Pancasila itu diciptakan orang-orang Kiri. Soekarno itu Kiri, Hatta Kiri. Para perintis kemerdekaan itu Kiri, yang Islam Kiri, yang Kristen Kiri. Kalau Orde Baru itu Kanan.

Sebenarnya, batasan Kiri dan Kanan itu seperti apa?

Kiri itu orang, golongan, atau kelompok yang memperjuangkan orang tertindas dari rejim kapital, sistem imperialisme, sistem eksploitasi. Ia melawan ketidakadilan, feodalisme. Itu Kiri. Pancasila juga tak pernah Kanan. Baru tahun 1965 itu, Pancasila disebut Kanan. Kiri itu internasional. Kiri-Kanan itu suatu kesepakatan bersama dari komunitas internasional. Kaum Kanan itu selalu kaum kapitalis kaya raya, feodal, fasis, militeristik.

Mengapa selama ini Kiri tampaknya kalah pengaruh?

Siapa bilang kalah. Itu *kan* omongannya P4. Di Eropa, saat Hatta sekolah di sana, orang Belanda, Inggris, Perancis itu banyak orang miskinnya. Lebih dari orang Jawa. Berkat gerakan Kiri, kaum sosialis Eropa Barat makmur, ada keadilan sosial.

Bukan karena kapitalisme di sana yang agak manusiawi dengan Walfare State-nya?

Itu karena dipaksa, bukan karena sadar sendiri. Di Amerika, sosialisme tidak berkembang dan kemiskinannya jauh lebih ngeri dari Eropa Barat. Jutaan orang tidak punya rumah, tidur

di stasiun. Di Eropa nggak ada karena pernah mengalami fase sosialis. Apalagi di Skandinavia. Kenapa? Karena dulu memakai gerakan buruh. Sosialisme itu yang membuat keseimbangan.

Bukankah Eropa saat ini Kanan?

Ya, Kiri di sana itu. Kiri terhadap bangsanya sendiri. Kalau terhadap orang Asia dan Afrika, mereka itu Kanan.

Di sini, Kiri sering diidentikkan dengan komunis?

Komunis itu Kanan. Kelirunya orang kita '*kan* di situ. Komunis itu musuhnya orang Kiri. PKI tidak kenal demokrasi. Semua harus patuh pada Moskow, Beijing. Penyelewengan kaum komunis itu seperti Orde Baru yang menyelewengkan Pancasila. Menyatakan Pancasila, tapi perbuatannya anti Pancasila. Kaum komunis menyatakan Marxis, tapi perbuatannya anti Marxis.

Orde Baru sering berkampanye tentang bahaya ekstrim Kiri sambil menunjuk PKI...

Orde Baru itu *kan* anti komunis tapi gerakannya sendiri (Orde Baru—red) seperti komunis juga. Antara yang diomongkan dan kenyataan, berbeda. RRC dan Rusia itu klaimnya demokrat, bahkan republik demokratik. Jangan dilihat omongannya, tapi lihat apa yang mereka lakukan.

Kiri itu sebenarnya diinspirasi oleh siapa?

Antara lain oleh Karl Marx. Agama juga. Agama itu mestinya selalu Kiri.

Sejauh mana peran Marx dalam gerakan Kiri ?

Besar sekali. Anda tidak bisa memahami masyarakat di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin tanpa Marx. Para perintis kemerdekaan kita sadar terhadap eksploitasi dan kolonialisme setelah mempelajari ajaran Karl Marx.

ISRAR A/ THE JAKARTA POST

Romo Mangun
Agama mestinya selalu Kiri

Mengapa ideologi Kiri sering digunakan untuk melawan penindasan?

Karena kiri itu melawan penindasan. Lalu tidak disukai oleh orang-orang yang menindas, diktator, feodal. Pasti, karena kaum kiri melawan mereka.

Apakah Kiri itu inheren dengan demokrasi?

Kiri itu prinsipil demokratik. Anda harus tahu bahwa Karl Marx itu mendasarkan diri pada Hegel, tesis-antitesis-sintesis. Kalau *nggak* demokratik tidak akan ada tesis, antitesis, dan sintesis. Macet. Macet pada tesis. Demokrasi itu justru ada yang punya tesis, setuju, ada yang antitesis, tidak setuju, lalu dari itu ada sintesa baru. Demokrasi seperti itu.

Adakah di Indonesia saat ini kelompok yang bisa diidentifikasikan sebagai Kiri?

PRD. Mereka memperjuangkan referendum di Timor Timur, itu Kiri. Membuka diri terhadap wacana negara federal, itu Kiri. Megawati saja mestinya Kiri, tapi saya heran Marhenisme *kok nggak* disebut. Megawati tanpa marhenisme itu apa? Dulu PSI itu Kiri, Murba itu juga Kiri. Kalau PNI itu priyayi, Soekarno yang Marhaenis.

Kapan masyarakat bisa memahami wacana ini?

Tergantung generasi muda. Jangan tanya yang tua.

Bagaimana membangun gerakan Kiri?

Nggak sulit. Jadilah orang kiri.□

Hery Trianto, Asep Mulyana

Kiri *itu orang, golongan, atau kelompok yang* **memperjuangkan orang tertindas** *dari rejim kapital, sistem imperialisme, sistem eksploitasi. Ia* **melawan ketidakadilan, feodalisme.** *Itu Kiri. Pancasila juga tak pernah Kanan. Baru tahun* **1965 itu, Pancasila disebut Kanan**

DR. Deliar Noer:

Kita Terima Sosialisme Demokrasi

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan Kiri?

Istilah Kiri dan Kanan itu cerminan dari pertentangan. Kalau kita lihat parlemen Inggris, orang pemerintah duduk di kanan, oposisi duduk di kiri. Karena mulanya pemerintah itu konservatif, lawannya itu yang menolak sifat konservatif, dengan maksud supaya ada perubahan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan konservatif untuk kepentingan orang-orang yang *establish,* seperti pengusaha dan bangsawan. Lambat laun itu berubah, tapi sifat Kiri dan Kanan terus melekat. Yang kanan *establish*, yang kiri itu menolak. Yang menolak itu biasanya adalah orang-orang berhaluan lebih merakyat, lebih keras terhadap *establishment*, radikal, vokal. Kiri itu begitu. Belakangan ada partai-partai tertentu yang dianggap Kiri dan Kanan.

Di Indonesia, Kiri mengalami distorsi makna...

Di Indonesia, yang Kiri itu seakan-akan komunis saja. Belakangan ini, Pangab Wiranto dan tokoh-tokoh masyarakat bilang, "Hati-hati, ada sikap dan tindakan kekiri-kirian, pengaruh komunisme." Kalau hanya sikap keradikalan, mahasiswa itu *'kan* muda. Tuntutannya biasa radikal. Dari zaman sebelum perang seperti itu. Tidak bisa kita katakan, mahasiswa itu Kiri ke arah komunis. Umat Islam (Masyumi-red) pada permulaan Soeharto berkuasa dianggap Kanan. Padahal program Masyumi itu lebih dekat ke PSI dahulu. Mereka setuju dengan pasal 33 UUD 45. Itu lebih sosialis. Kebetulan Islam ingin meningkatkan rakyat bawah. Jadi bisa dilakukan lewat pasal 33 UUD '45. Tapi Suharto bikin konglomerasi, rakyat dibiarkan saja. Klaim terhadap suatu rumusan di Indonesia sering kabur.

Partai mana saja di Indonesia yang berhaluan Kiri?

Komunis sudah jelas. Sosialis dianggap Kiri. Kiri yang agak ke tengah, dalam arti tidak ekstrim. Karena Kiri ekstrim itu komunis. Murba itu Kiri independen. Tan Malaka (Murba-red) itu Kiri, tapi tidak mau terlalu berseberangan dengan agama. Murba tidak diterima oleh Stalin. Tan Malaka pernah dikeluarkan dari Komunisme Internasional karena ia termasuk orang yang berani menentang Stalin. Ia tidak setuju PKI memberontak tahun 1926. Stalin setuju sekali. Alimin dan kawan kawan sama dengan apa yang dikehendaki Stalin.

REPRO: FORUM

Deliar Noer

Kalau PNI?

Tergantung cara kita mencap sesuatu. Dalam hal nasionalisme, ia Kanan. Ia tidak mau seperti Komunisme Internasional. Nasionalisme yang bersifat internasional *'kan* nggak pernah dikemukakan. Ia keras dengan nasionalisme. Tapi dalam masalah kesejahteraan, ia cenderung sosialis. Ia mau menegakkan Marhaenisme. Itu berarti menegakkan rakyat bawah.

Sutan Syahrir dengan PSI-nya dianggap agak Kanan. Menurut anda?

Ia sosialis. Di Indonesia ini banyak tukang cap. Ia dicap sosialis Kanan. Kalau di Barat, ia termasuk Kiri. Kalau di Indonesia karena hidupnya kurang merakyat, dia dianggap Kanan. PSI itu *'kan* tidak turun ke bawah. Kalau *intens* keluar, ia banyak pengikut.

Apa perbedaan mendasar di antara partai-partai Kiri itu?

Saya tidak melihat. Seperti PNI dalam hal kesejahteraan sama. Semuanya menerima pasal 33 UUD

45. Pasal 33 itu *'kan* ciptaan Hatta yang memang didukung PSI. Dalam hal ini, PNI setuju, partai-partai agama juga setuju, sehingga kita tidak bisa main cap-capan. Ada pembauran dalam bidang-bidang tertentu yang disepakati oleh kebersamaan paham dan pendapat.

Kiri itu diinspirasi oleh siapa, apakah oleh Karl Marx?

Oh, tidak. Umpama, Hatta dikatakan seorang sosialis, tapi agamanya kuat. Tapi kalau Marx *'kan nggak* ada persoalan agama, malah Marx benci pada agama. Lenin dan Stalin juga. Di kalangan Eropa Barat ada yang mentolerir agama. Itu lebih dianggap persoalan individu. Tapi di Indonesia, orang seperti Hatta *'kan* tekun beragama. Kalau Syahrir, ia begitu mentolerir agama, tapi nampaknya kurang terikat. Jadi kita *nggak* bisa kita perbandingkan mereka dengan Barat, di samping kenyataan bahwa sosialisme di desa kita sudah ada sejak dulu. Hatta menganjurkan kita mengangkat kebiasaan gotong-royong yang semacam sosialis pada tingkat nasional. Dia *nggak* berhasil. PSI juga begitu. Ia ingin merakyat dan ingin rakyat itu terangkat. Masyumi dan partai-partai Islam juga begitu. Tahun 20-an, Cokroaminoto menulis tentang Sosialisme dan Islam. Bedanya cuma Islam itu dengan Tuhan, Sosialisme itu dengan akal, dan tidak mempersoalkan Tuhan. Tapi ajaran kemasyarakatannya sama.

Bagaimana sebenarnya Sosialisme memposisikan agama?

Agama diserahkan pada individu. Ia tidak anti agama. Sosialisme di Inggris tidak anti tradisi, oleh sebab itu juga mendukung kerajaan. Di Indonesia bergantung masyarakat kita juga. Feodalisme, terang kita *nggak* suka, sebab feodalisme tidak mempersamakan bangsawan dengan rakyat banyak. Kita juga tidak suka Kapitalisme, karena kapitalis-kapitalis itu terpisah hidupnya dengan rakyat banyak.

Masalah agama pada sosialisme, ada yang berpendapat itu soal individu. Ada juga yang berpendapat, masyarakat harus beragama dan harus ditingkatkan kehidupan beragamanya, walaupun diserahkan pada kehidupan masyarakat dan tidak dipaksakan oleh pemerintah.

Mengapa kapitalisme dulu ditolak oleh para founding fathers *kita?*

Karena kapitalisme dibawa secara otomatis oleh kolonialisme yang mengeksploitasi negeri dan bangsa kita. Di negeri jajahan, mereka *nggak* peduli dengan rakyat banyak. Kapitalisme di Barat mulai akhir tahun 30-an sudah kembali peduli dengan rakyat.

Mengapa?

Itu karena terpaksa, bukan karena belas kasihan. Gaji buruh harus cukup menghidupi buruh dan keluarganya. Kalau tidak, ia tidak bisa bekerja di pabrik, dan pabrik bisa hancur. Lambat laun jadi pertimbangan kemanusiaan juga.

Pergerakan nasional kita banyak terinspirasi oleh sosialisme, apa yang dicitakan sosialisme?

Kehidupan rakyat itu meningkat. Sosialisme yang bisa kita terima itu sosialisme demokrasi. Ada sosialisme diktator. Komunisme itu juga semacam Sosialisme. Sosialisme Barat yang mempengaruhi orang-orang kita ini sosialisme demokrasi seperti yang dicapai oleh partai buruh, atau sosialisme di Denmark yang koperasinya luar biasa. 90% penduduknya anggota koperasi. Jadi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak terjadi. Rakyat itu pada umumnya mendapat kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan yang merata, dan itu gratis.

Mengapa sosialisme atau Marxisme selalu dipakai sebagai alat perlawanan terhadap penindasan?

Oh, itu *'kan* belakangan saja setelah PKI macam-macam di masa revolusi. PKI terbukti mau memberontak, mau berkuasa, dan mau ciptakan pemerintahan diktator. PKI, sesuai dengan sifat-sifat partai komunis di mana saja, kalau menang, ia harus menang terus. Diktator itu harus menguasai segala-segalanya sampai bisa tercipta kebersamaan. Apa akan tercipta, orang meragukan. Di Uni Soviet, dulu sosialis republik, bukan komunis, karena masih memerlukan pemerintahan. Kalau komunis itu pemerintah tidak perlu lagi, orang sadar sendiri. Apa bisa orang sadar sendiri? Apa begitu manusia itu? Ini yang diragukan orang untuk dapat dicapai.

Jadi cita-cita komunis itu utopia?

Komunisme itu juga semacam Sosialisme. Sosialisme Barat yang mempengaruhi orang-orang kita ini sosialisme demokrasi seperti yang dicapai oleh partai buruh, atau sosialisme di Denmark yang koperasinya luar biasa. 90% penduduknya anggota koperasi. Jadi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak terjadi.

Utopia karena terlalu bagus masyarakatnya. Dalam teori disebutkan, kekuasaan itu menggoda. Maukah orang komunis yang berkuasa itu dengan rela menghilangkan kekuasaannya? Kalau *nggak* didesak *nggak* mau diganti. Sudah alamiah. Makanya, komunisme itu utopia saja. Dalam khayalan barangkali bisa, kenyataannya manusia tidak begitu.

Beberapa kalangan khawatir akan munculnya kembali politik aliran, menurut anda?

Itu *'kan* istilah mereka. Lihat dahulu waktu revolusi. Beragam partai dengan beragam asas. Islam, Kristen, Katolik, Sosialis, Nasionalis sama-sama berjuang untuk RI, sama-sama memenangkan revolusi. Tapi asas tunggal di masa Soeharto menghancurkan Indonesia. Mana yang lebih baik? Keyakinan itu *nggak* bisa dipasung. Kalau dipaksakan, orang jadi munafik. Lebih baik, keyakinan itu dibebaskan.❐

M.Bustom, Melani, Asep M

Sosial Demokrat:

Merangkak menggapai Harapan

Dalam tradisi marxisme seringkali dijumpai tafsiran yang berbeda satu sama lain. Baik dalam penerjemahan maupun dalam strategi dan taktik. Sosialisme, harapan Marx tentang masyarakat, penafsirannya pun sangat berlainan. begitu pula dengan sosial demokrat, varian dari sosialisme.Di satu pihak ideologi ini dianggap sebagai pilihan akhir perwujudan masyarakat yang sosialis, tetapi di lain pihak, sosial demokrat seringkali dianggap sebagai tahapan menuju komunisme penuh (*full communism*). Kelompok terakhir ini bertumpu pada ajaran Marxis-Leninisme.

Jika diruntut dari sejarahnya, Istilah sosialisme diperkenalkan pertama kali pada abad ke - 19 oleh Proudhon, dari Perancis mengemukakan "hak milik orang perseorangan itu sama dengan pencurian" (*La propiete c' est le vol*). Pendapat Proudhon didukung oleh Robert Owen (1771-1858) , yang dalam perkembangan selanjutnya dikenal sebagai sosialisme utopis. Setelah itu Karl Marx (1818-1883) mengkritik gagasan kedua pemikir di atas yang dianggap tidak memberi solusi apapun dalam perubahan masyarakat. Ini dapat dilihat dari salah satu karangannya *La misere de la philosophie* (kesengsaraan daripada filsafat). Perkembangan selanjutnya Karl Marx bersama dengan Friedrich Engels terus berusaha mengembangkan teori itu.

Sementara, dalam dialektika selanjutnya para kaum sosialis yang berpegangan pada teori Marx mengalami pergesekan dalam memandang sebuah masyarakat yang di cita-citakan. Puncaknya, terjadi perdebatan di dalam menafsirkan ajaran-ajaran Marx tersebut. Lalu lahirlah kaum revisionis, kaum reformis, dan kaum ortodok-marxist. Begitu pula dalam hal pendirian dan alirannya. Kita kenal dengan Leninis,Stalinis, Trotskis, Maois, spartakis, Syndikalis, austro-marxis dan banyak aliran lainnya yang sampai sekarang terus berkembang.

Jika diruntut lebih dalam, perdebatan tersebut berawal dari persoalan ada tidaknya proletarisasi atau *verelendung*. Patokan inilah se bagai salah satu timbulnya gerakan buruh , gerakan sosialis (baca : parat atau lembaga sosialis). Begitu pula dalam pendirian sebuah partai yang berpegangan pada marxisme,

DOK BAL

Imam Yudhotomo

Pada awalnya berdirinya, partai-partai Marxis di akhir abad ke-19 memakai nama sosial demokrat. Penggunaan nama tersebut dalam arti sebagai sosialisme moderat yang muncul tahun 1903, sementara di Rusia sosial demokrat juga dipilih sebagai bentuk partai-partainya, misalnya partai buruh sosial demokrat.

Hadirnya sosial demokrat sebagai sebuah ideologi tidak begitu saja diterima oleh penganut sosialisme. Pengkritik demokrasi sosial baik yang berhaluan kanan maupun yang berhaluan kiri menganggap bahwa bentuk ini bukanlah bentuk dari sosialisme sebenarnya. Kaum komunis sangat menolak bentuk sosial demokrat dan menganggapnya sebagai 'pengkhianat' perjuangan kaum buruh.

Ideologi ini, dalam satu dekade terakhir sangat diminati oleh partai-partai di eropa barat. Partai Sosial Demokrat (SPD) Jerman adalah salah satu contohnya.

Sementara dalam perkembangan sosial politik Indonesia, terlebih pada era reformasi telah membawa beberapa angin segar menuju demokratisasi. Munculnya multipartai membuka peluang bagi hadirnya idelogi yang beragam. Artinya spektrum kiri, tengah, kanan dapat berperan serta dalam "memeriahkan" percaturan politik Indonesia.

Sosial demokrat nampaknya juga menjadi sebuah pilihan ideologi dari beberapa partai. Katakanlah, Partai Murba, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan (menurut pengakuan Megawati di sebuah terbitan Mesir). Yang menarik kemudian adalah tingkatan penerapan ideologi dari partai–partai tersebut sangat berlainan. Baik pemaknaan ataupun dalam tataran praktisnya.

Kali ini Majalah *Balairung* guna melengkapi Laporan Utama Multi Partai Multi Ideologi menyelenggarakan temu wicara bertema Sosial Demokrat dengan pembicara Lance Castle, Pengamat politik dan Haris Rusli ketua Komite Perjuangan Rakyat Untuk perubahan (KPRP) Yogya. Untuk semakin melengkpai kajian Balairung melakukan wawancara khusus dengan Imam Yudotomo, Ketua Center for Social Democratic Studies (CSDS). Temu wicara ini dipandu dan ditulis ulang oleh Ajianto.

Membedah Ideologi Sosial Demokrat

Bagi Haris Rusli untuk melihat sosial demokrat dapat dilihat dahulu akar sejarah dari manusia itu sendiri. Pada hakekatnya semua manusia itu serakah. Pada tingkat ini Adam Smith dan Karl Marx berusaha menafsirkan sifat manusia tersebut. Adam Smith mengatakan keserakahan manusia dikarenakan memang sudah menjadi sifat yang alamiah ada di setiap manusia. Sedangkan Marx lebih melihat keserakahan manusia dibentuk dari sejarah sehingga perlu ada sistem yang mengaturnya. Disinilah perbedaan sosialisme dan kapitalisme. "Sosial demokrat nantinya menjadi salah satu varian dari sosialisme," katanya lebih lanjut.

Lance Castle berbeda, ia sama sekali tidak menganggap kapitalisme sebagai sebuah ideologi, melainkan hanyalah sebuah praksis dari jual beli barang, mereka hanya memanfaatkan mekanisme pasar. "Saya pikir, semua orang memanfaatkan sistem pasar termasuk komunisme. Makanya saya mengatakan jika sebenarnya ideologi itu sudah mati," tandasnya

Imam Yudotomo lebih melihat sosial demokrat sebagai ideologi adalah terjemahan Marxisme yang ditempatkan secara demokratis. Sedangkan Marxisme yang diterjemahkan tidak demokratis dan penuh kekerasan, itu yang disebut komunisme. Salah satunya komunisme melawan alat. Semua orang mempunyai naluri tertentu, tetapi oleh komunisme dianggap sebagai kemewahan atau borjuasi. "Orang sosialis menerjermahkan Marx secara demokratis. Perjuangannya tidak bersenjata, menghadapi kapitalisme bukan berarti menghancurkannya tetapi misalnya dengan jaminan kehidupan buruh yang baik. hak–hak diberi, jika keuntungannya besar dikenai pajak progresif," kata Imam

Sosial Demokrat : Kompromi atau Taktik Menghadapi Kapitalisme

Perdebatan panjang untuk menafsirkan sosial demokrat sebagai ideologi pilihan sebagai lawan dari kapitalisme belumlah selesai. Kaum komunis percaya untuk meruntuhkan kapitalisme harus melalui perjuangan kelas atau yang lebih dikenal dengan diktatur proletariat sehingga sosial demokrat seringkali dipakai sebagai strategi dan taktik untuk mewujudkan cita–cita pembebasannya. Sedangkan kaum sosialis tidak percaya pada tahapan perubahan yang dianut pengikut komunisme dalam melawan kapitalime.

"Sosial demokrat dapat dilihat dari dua pengamatan. Pertama kaum Marxis-Leninis menganggap bahwa sosial demokrat hanyalah sebuah tahapan menuju komunisme. Sebagai

Lance Castle

contoh, Lenin pernah mendirikan partai buruh sosial demokrat." Ungkap Haris.

Hal itu, masih menurut Haris dilakukan sebagai taktik untuk mewujudkan cita-cita komunis. Dengan tahapan sosial demokrat mereka dapat bermain di parlemen dan berusaha memenangkan partainya. Setelah itu baru komunisme yang dimunculkan sebagai ideologi perjuangannya karena kaum ini menganggap parlemen hanyalah sekumpulan orang-orang borjuis. Kedua, Kaum sosial demokrat revisionis lebih melihat cara-cara yang dipakai kaum Leninnis tidak demokratis dan mengorbankan banyak orang, sehingga perlu adanya revisi ulang dari teori marx dan Lenin untuk melakukan masyarakat revolusi sosialis. Bagi mereka, untuk melakukan perubahan tanpa harus melalui revolusi proletariat, dengan parlemen pun mereka percaya dapat membangun masyarakat yang adil dan parlemen adalah metode untuk melakukan perubahan tadi.

Sementara ImamYudotomo lebih melihat sosal demokrat sebagai hasil akhir dari kaum sosialis untuk melewan kapitalis. "Saya menolak jika dikatakan sosial demokrat dipakai sebagai tahapan menuju komunisme", ujarnya. Jika sosial demokrat dikatakan sebagai tahapan atau strategi untuk menuju komunisme, mengapa partai-partai sosial demokrat yang ada di Eropa Barat tidak menjadi komunis setelah menang. Jadi sosial demokrat memang sebuah pilihan bukan sebuah tahapan.

Dengan tegas dikatakannya di Rusia sosial demokrat tidak cocok diterapkan tetapi lebih cocok dengan formasi Leninis karena memang di Rusia pada waktu itu harus menghadapi pemerintahan Tsar yang sangat kejam. "Dan yang harus diingat adalah Partai Buruh Sosial Demokrat yang pernah dipimpin Lenin bukan dari kelompok Bolsyevik, tetapi Mensyevik" ujarnya lebih lanjut. Lance Castle sendiri dalam diskusi ini sekali lagi menekankan mengatakan bahwa ideologi–ideologi tersebut telah berakhir, sayang sekali Lance Castle tidak begitu merinci apa maksud ucapannya.

Jika kita amati perkembangan akhir-akhi ini memang di beberapa negara eropa kaum sosilais telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam melakukan counter kapitalisme.

Haris Rusli menolak anggapan bahwa kaum sosial demokrat di Eropa Barat melakukan counter terhadap kapitalisme. "Mereka memakai sistem pasar dalam salah satu mekanismenya." ujarnya. Buruh dalam konteks sosial demokrat di Eropa seringkali dijadikan alat perubahan. Tetapi jika di sebuah negara sosialis "murni" buruh dijadikan penggerak revolusi. Di Eropa Barat gerakan buruh diperbolehkan, tetapi tidak radikal karena sudah ditumpulkan dan dimanipulasi kesadarannya. "Jadi Saya *nggak* bisa mengatakan jika mereka sosialis, tetapi demokrasi yang berbasis sosial," Ketua KPRP ini menjawab penuh semangat.

Uraian Haris ditanggapi oleh Antariksa, salah satu peserta diskusi "SPD di Jerman pada awalnya juga komunis, mereka ikut internationale. Tetapi ketika pemilu Jerman sudah demokratis akhirnya SPD beberapa kali kalah dalam pemilu dan memaksa merubah cara pandang, dari perjuangan kelas yang sekarang

mereka anggap utopi menjadi membuat program kesejahteraan buruh".

Imam Yudotomo mempunyai analisa yang berbeda. Di Eropa Barat jika dilihat dari pengamatan luar memang seolah olah telah terseret ke dalam kapitalisme, tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, Di Jerman misalnya nasib buruh sangat terjamin. Artinya disana ada tax minimum yang layak untuk hidup dan jika kita lihat tax pajak progresifnya, saya pikir sangat besar. "Misalnya anda punya penghasilan satu juta dalam satu tahun atau dua puluh lima ribu gulden setahun, maka pajak tunjangan kesehatannya paling–paling 15% , tetapi jika kamu punya penghasilan seratus ribu gulden setahun, maka pajaknya bisa 60 %. Nah disini prinsip–prinsip sosialisme bermain, dimana orang yang semakin kaya harus menyumbang lebih besar kepada negara." Masih menutut Imam tidak benar jika negara negara sosial demokrat yang ada di Eropa Barat telah bergeser ke kapitalime. Jika dilihat dari masyarakatnya, antitesa dari kapitalisme. Memang kapitalis ada, sosialisme sebagai antitesanya. Kondisi sekarang ada yang mengatakan bahwa *welfare state* adalah kemurahan hati kapitalisme, artinya proses perkembangan dari kapitalisme. Sedangkan kaum sosialis mengatakan menafsirkan untuk membatasi kapitalisme tidak berhenti begitu saja dan sosialisme juga harus terus menerus berkembang, tambah pria setengah baya ini.

Bagaimana Indonesia?

Jika dilihat dari akar sejarah dan lahirnya sosial demokrat, apakah bisa negara Indonesia yang kondisi matrialnya bisa dibeda dengan kondisi di negara–negara eropa menerapkan ideologi tersebut Di samping itu pula apakah siap masyarakat menerima tawaran ideologi tersebut? bagaimana pula pensikapan terhadap modal asing?

Bagi Imam, dalam konteks Indonesia sosial demokrat sudah dapat diterapkan, tentang modal asing kita harus kritis dalam melihat persoalan tersebut. Modal asing hanyalah sebagai pelengkap kita harus pandai memilih atau berinvestasi.

Haris Rusly Moti

Hitungannya itu hanya untung rugi, masih menurut Imam "Kita butuh modal asing itu benar, tetapi kita harus mensiasatinya. Kesalahan Indonesia adalah tidak memiliki industri dasar, padahal ini sangat penting. Beda dengan Cina yang sudah mempunyai industri dasar."

Kacamata berbeda coba dipakai Haris, "Di Indonesia 50% petani, 25% lebih buruh dan 75% rakyat Indonesia hidup di bawah rata-rata. Selama ini sistem yang terjadi sangat tidak adil. Sudah saatnya kita membantu mereka melawan kaum kapitalis dengan revolusi demokratik.

Imam Yudotomo mengusulkan sudah saatnya kita meninggalkan referensi gerakan kiri Indonesia yang lama. "Karena jaman sudah berubah, kita harus menemukan bentuk sosial demokrat yang baru. Masa depan Indonesia sudah selayaknya memakai ideologi sosial demokrat, karena yang bisa mengerti dan mengatasi persoalan kapitalis hanya orang-orang sosialis", ujar Imam optimis.

Tidaklah berlebihan jika dalam proses menuju demokatisasi ini, kekuatan politik yang ada dapat menempatkan kelompok kiri sebagaimana layaknya kelompok-kelompok lainnya hidup. Serta ideologi apapun yang dipilih dari setiap partai, selain Pancasila, perlu juga diberi ruang yang bebas. Termasuk sosial demokrat.❐

Ajianto

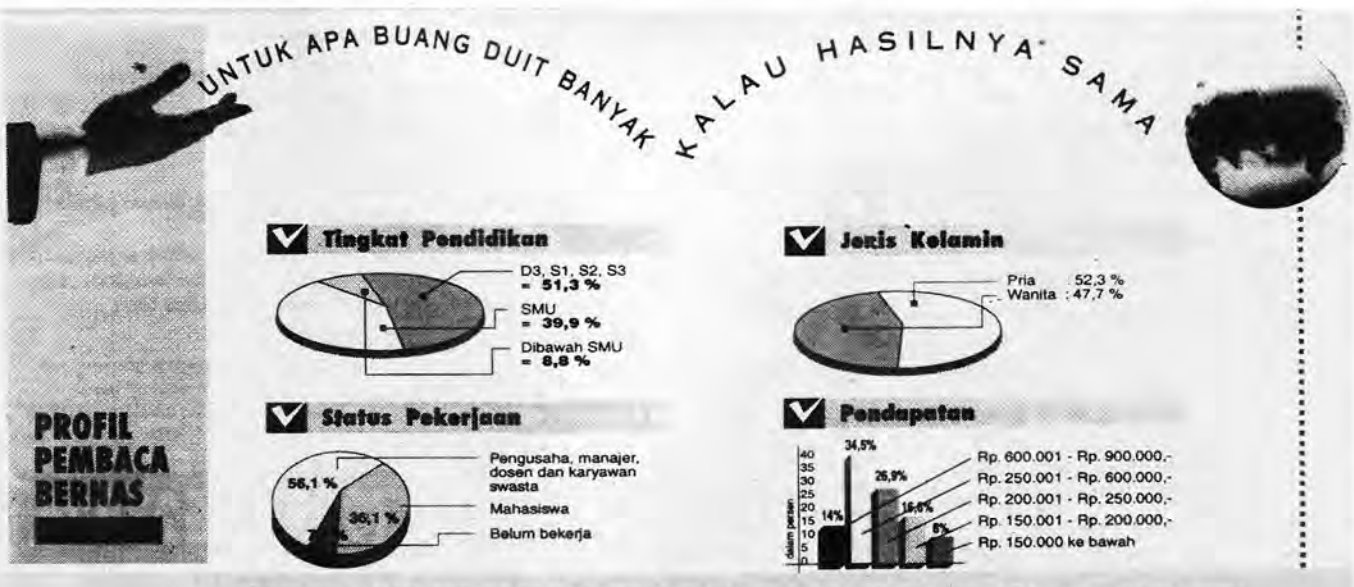

Mencari Format Gerakan Kiri Era Reformasi

oleh: Imam Yudotomo
Staf Centre for Social Democratic Studies, Yogyakarta

Sejak terpuruknya seluruh gerakan kiri tahun 1965, berbagai peristiwa telah terjadi dan mengakibatkan banyak perubahan dalam konstelasi politik, ekonomi dan sosial baik ditingkat nasional maupun internasional. Perubahan-perubahan tersebut tentunya harus dicermati dengan teliti, mengingat ini sangat erat dengan pembahasan golongan kiri itu sendiri. Sedang perubahan terbesar yang muncul pada masa orde baru adalah munculnya kapitalis nasional, yang tumbuh berkat modal yang berasal dari sumber kekayaan nasional kita, yang hakekatnya milik seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang, penetrasi kaum kapitalis sudah menjamah semua bidang kehidupan serta telah menjadikan kekuasaan dan birokrasi sebagai perpanjangan tangannya. oleh penguasa yang melindungi kaum kapitalis tersebut, kekuatan politik rakyat disterilkan dan partai-partai hanya dijadikan ornamen dalam sistem politik yang tidak demokratis.

Selain itu, selama pemerintahan orde baru bercokol, telah meningkat pula frekwensi peran militer dalam semua bidang kehidupan politik negara. Keinginan ini mulai diwujudkan dalam peristiwa 17 Oktober 1952, dimana sejumlah perwira militer dibawah pimpinan Nasution menuntut agar presiden membubarkan parlemen. Secara demonstratif mereka menghadapkan moncong senjata ke istana kepresidenan dan memporak-porandakan gedung parlemen. Usaha ini, akhirnya dapat digagalkan, dan Nasution sendiri kemudian dicopot dari jabatannya sebagai KSAD.

Keinginan itu muncul lagi ketika Soekarno mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD dalam rangka usahanya untuk mendapat dukungan dari kaum militer. Posisi ini membuat Nasution berhasil menggalang kekuatan militer untuk mendukung Soekarno, bahkan menempatkan Soekiarno pada kekuasaan yang hampir tanpa batas, sekaligus memperkuat kedudukan Nasution sendiri, serta melembagakan peran militer dalam kehidupan politik dan ekonomi. Keberhasilan kaum militer menempatkan sejumlah perwira dalam kedudukan politik seperti gubernur, bupati dan anggota MPR serta kedudukan yang secara ekonomis sangat strategis seperti memimpin perusahaan asing yang dinasionalisir, dapat dilihat lewat sosok Ibnu Sutowo di ex-BPM kemudian ke Pertamina, Suhardiman di ex-*Big Five*/kemudian PT Berdikari, pemegang monopoli ekspor impor. Ini semua menjadikan posisi militer dalam dunia politik makin kuat. Ditunjang dengan usaha pembentukan lembaga-lembaga militer untuk penguasaan teritorial yakni Babinsa, Koramil, dan pembentukan organisasi massa lainnya yang jelas-jelas disponsori oleh militer. Penguasaan yang semakin meluas disegala bidang ini kemudian diberi landasan yang bernama dwi fungsi ABRI dan sekarang menjadi instisusi yang seolah-olah tidak dapat dirubah lagi.

Namun dilain pihak, jika diperhatikan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, bisa dilihat betapa perlawanan terhadap pemerintahan orde baru yang sangat kapitalistis menunjukkan peningkatan. Pemogokan kaum buruh terus berlangsung tak henti-henti. Perlawanan pendukung Megawati terus berlangsung akibat teror 27 Juli 1996. Mereka tidak bisa diteror begitu saja. Sampai sekarang perlawanan mereka bahkan terus meningkat. Mahasiswa juga terus bergerak memperjuangkan hak-hak kelompok kaum tertindas. Keberanian rakyat menghadapi kekuasaan juga semakin tampak. Mereka tidak hanya berani membakar Gereja, tetapi sudah menghanguskan kantor kecamatan dan markas polisi.

Sementara itu, peristiwa yang terjadi di dunia Internasional juga tidak kalah hebatnya. Yang paling spektakuler adalah jatuhnya rejim komunis, kecuali Kuba. Sulit membanyangkan negara yang begitu totaliternya seperti Uni Soviet bisa hancur berantakan hanya dalam tempo beberapa tahun saja, sampai CIA yang begitu canggih tidak bisa meramalkan sebelumnya, Ini berarti gagasan komunisme yang semula banyak dicontoh orang dalam rangka perjuangan melawan kapitalisamesudah tidak bisa lagi dijadikan acuan satu-satunya. Baik dalam impian tentang masyarakat yang dicita-citakannya maupun dalam hal metode, strategi dan taktik perjuangannya. Beberrapa mengatakan bahwa kehancuran sistem komunisme sering kali dipropagandakan oleh pers kapitalis sebagai kehancuran sosialisme. Sama sekali tidak benar. Kehancuran komunisme hanya kehanancuran komunisme itu sendiri saja, karena ternyata kaum sosialis justru mendapatkan kemenangan di banyak negara. Di Belanda, partai buruh tetap menjadi partai dominan, di Perancis partai sosialis berhasil merebut kembali kembali kekuasaan

yang dipegang para pendukung jendral De Galulle, di Swedia partai sosialis juga tetap bisa mempertahankan kekuasaannya, di Nepal partai kongres berhasil memenangkan pemilihan umum setelah monarki absolut ditumbangkan. Dan terakhir, partai konservatif yang sudah memerintah Inggris lebih dari sepuluh tahun dikalahkan secara mmutlak oleh partai buruh.

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa sekalipun dengan mudah dapat disimpulkan bahwa gagasan-gagasan golongan kiri masih sangat relevan dengan situasi yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Namun, perubahan yang demikian ini menuntut golongan kiri untuk me-redefinisikan pikiran-pikirannya yang lama. Analisa usang yang mengatakan bahwa kapitalis nasionalis tidak atau belum ada di Indonesia, yang ada hanya kaum komprador kapitalis asing saja, harus dibuang jauh-jauh. Begitu juga pendapat bahwa Indonesia adalah negara agraris feodal, harus dianalisa ulang. Selain itu, bagaimana antisipasi golongan kiri terhadap perubahan serta bagaimana sikap politik dan strategi-taktik yang bisa ditawarkan golongan kiri dalam situasi sekarang, sudah banyak mengalami perubahan itu harus dapat dijawab.

Maka, bebepara hal yang perlu dilakukan antara lain menyangkut:

1. Pemikiran dan usaha untuk men-definisikan ulang ideologi, yakni dengan cara mengkaji ulang apa yang telah dilakukan oleh golongan kiri di Indonesia di masa lalu, memilah mana yang relevan bagi perjuangan rakyat Indonesia, dengan memperhatikan juga perspektif internasional dan antisipasi masa depan.
2. Pemikiran dan usaha untuk membentuk organisasi yang bisa dipakai sebagai wadah perjuangan, termasuk menyusun bentuk mekanisme organisasi harus segera dilakukan
3. Penyusunan program aksi yang akan dilakukan.
4. Kemudian mengenai strategi dan taktik yang digunakan dalam rangka usaha untuk melaksanakan program aksi yang sudah ditetapkan.

ADAPTASI, FIFI SR

Uraian diatas, jika dipandang dari segi ideologis, ajaran Marx masih menunjukan sumber utama ideologi kaum kiri, namun sudah jelas bahwa Marxisme-Leninisme/komunisme yang pernah dipakai PKI dan Murba bukan lagi ideologi yang bisa ditawarkan kepada khalayak. Bukan karena takut di-cap sebagai PKI karena ideologi itu dilarang penguasa di Indonesia, melainkan karena ideologi itu terbukti tidak berhasil membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Kehancuran negara-negara komunis di eropa timur dan dipusat kekuasaannya sendiri, Unisoviet, membuktikan. Karena itu, pilihan ideologi bisa dijatuhkan pada ideologi yang sekarang dianut oleh kaum sosial-demokrat. Selain ternyata ideologi itu telah membakukan sejumlah tradisi yang menguntungkan rakyat sebagaimana yang terjadi di eropa barat, sampai sekarang ideologi itu masih manjadi pilihan mayoritas rakyat di banyak negara. Tentu saja masih harus dilakukan kajian kritis lebih lanjut terhadap ideologi kaum sosial demokrat. Masih banyak hal yang perlu diklarifikasikan.

Pertanyaan berikutnya adalah: kalau dipilih ideologi sosial demokrat, apakah ini nerarti ideologinya PSI ? Tentu saja tidak ! Banyak sekali penilaian dan gagasan PSI yang tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang. Atau, pilihan bisa dijatuhkan pada ideologi marhaenisme, yang oleh Soekarno dirumuskan sebagai marxisme yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Kalau ini pilihannya, maka persoalan yang timbul kemudian akan bertambah ruwet. Kita harus *start* dari awal, yaitu dengan memformulasikan ajaran Marx yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dan tentunya harus dikaji ulang apakah ideologi ini bisa membawa kebahagiaan bagi umat bangsa yang bersangkutan?. Apakah Vietnam yang mempraktekkan Marxisme disesuaikan dengan kenyataan negara vietnam sendiri, yang tidak tunduk pada Moskow atau Peking, bisa dianggap sebagai ideologi yang sejalan dengan ideologi marhaenisme itu?

Dalam bidang organisasi perlu dilakukan kajian yang sama guna menentukan urgenisitas pembentukan partai atau organisasi yang hendak dipakai sebagai wahana memerjuangkan cita-cita sosialisme. Jika dianggap perlu maka, harus dipikirkan bentuk, struktur dan mekanismenya. Berikutnya, mengenai kriteria keanggotaan, ini amat penting sebab dapat menentukan watak partai yang akan terbentuk. Dari pengalaman terdahulu, bisa dilihat apa yang pernah dilakukan golongan kiri terdahulu. Partai kader yang diajukan PSI ternyata gampang menadi partai yang intelektualistis, elitis dan bersikap arogan. Demikian pula halnya dengan PNI, partai yang diajurkan Soekarno. Baik PSI maupun PNI bukan merupakan jawaban yang tepat. PNI sangat tergantung kepada piminan partai, ketika Soekarno ditahan pada tahun 1929, maka PNI segera bubar, pun pada waktu pegawai negeri haarus masuk golkar, maka PNI ditinggalkan begitu saja. Contoh lain yang bisa kita ambil adalah PKI. PKI adalah partai yang tersusun rapi bangunannya dari tingkat desa ke tingkat Nasional dengan hierarki dan fungsionars yang jelas, berbasiskan massa yang luas dan diikuti dengan pembentukan kader yang militan. Namun bukan berarti partai semacam PKI tidak memerlukan pemikiran ulang mengenai keberadaannya kembali. Apakah kita masih bisa mentolelir gagasan dan praktek demokrasi sentralisme yang dilakukan secara ketat tubh PKI. Padahal semua orang tahu bahwa demokrasi

sentralisme menempatkan pucuk pimpinan partai sebagai pengambil kebijakan yang tidak bisa diganggu gugat dan membuat semua hierarki partai dibawahnya hanya sebatas palaksana saja, yang hanya boleh mendiskusikan hal-hal teknis. Lalu kriteria keanggotaan harus pula jelas. Pengalaman PNI menunjukan bahwa partai ini tidak bisa menjadi partai yang revolusioner seperti yang dikehendaki Soekarno sebagai pimpinan Partai, karena PNI memasukkan unsur-unsur konservativ dan reaksioner seperti kaum borjuis, feodal, pamong praja, pegawai negri dan sebagainya. Sama halnya dengan PSI, partai ini juga tidak bisa jadi partai revolusioner karena isinya syarat dengan kaum intelektual dan elite. Watak dan karakter anggota partai sangat menentukan tingkah laku partai itu. Apakah akan menjadi partai yang militan memebela kaum tertindas, atau menjadi partai yang konservativ, reaksioner, oportunis dan mengekor pada kekauasaan belaka.

Sejarah menunjuk bahwa strategi penggalangan pendapat umum (*public opinion building*) saja, tidak cukup. Strategi itu hanya memikat kalangan intelektual di kota-kota. Dari segi efektifitas dan efisiensi menunjukan bahwa tuntutan tanpa dukungan tanpa dukungan massa tidak akan menghasilkan apa-apa.

Program aksi akan ditentukan berdasar kepentiingan dan pandangan yang sejalan dengan ideologi partai. Sejalan dengna watak dan karakter partai kiri, maka program aksi yang menyangkut kepentingan kaum tertindas harus mendapat prioritas utama. Karena itu, masalah keadilan ssosial dan demokrasi harus tercermin dalam program aksi serta harus didasarkan pada realitas sosial yang ada. Apa yang dilakukan PKI dengan gagasan revolusi bersenjata, jelas bukan contoh yang baik, karena program tersebit sebagai jiplakan dari keberhasilaan kaum komunis di Uni soviet dan Cina. Selain itu, program aksi yang dirumuskan hendaknya bukan sekedar *out put* dari diskusi hasil inelektual-exercise belaka. Sekali lagi, harus berdasar pada realitas sosial yang ada.

Terakhir, masalah strategi dan taktik. Secara strategis, partai ini harus berada disetiap persoalan yang dihadapi masyarakat., dan terutama oleh kelompok yang kita wakili. Sejarah menunjuk bahwa strategi penggalangan pendapat umum (*public opinion building*) saja, tidak cukup. Strategi itu hanya memikat kalangan intelektual di kota-kota. Dari segi efektifitas dan efisiensi menunjukan bahwa tuntutan tanpa dukungan massa tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka dari itu, pilihan Massa aksi yang militan sebagai bagian dari strategi perjuangan perlu ditetapkan. Dari sini akan terlihat berpadunya dua kekuatan yang saling mendukung, dan bukan berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengadakan kajian kritis seperti yang dianjurkan diatas bukanlah pekerjaan yang mudah Terutama bagi mereka yang mempunyai kaitan sejarah, emosional, dan organisaoris dengan partai-partai kiri di Indonesia. Misalnya, sangat sulit bagi orang-orang PKI dan partai pengikut dan para pengagumnya untuk mengakui bahwa ideologi PKI sudah tidak bisa lagi menjadi tawaran yang menarik sekarang ini. Banyak dari mereka yang bahkan masih belum percaya bahwa bentuk negara yang diidolakannya ternnyata sudah hancur berantakan. Pada saat yang sama, sangat sulit bagi orang-orang PSI melihat kenyataan bahwa ternyata partainya adalah partai intelektual, elitis apalagi dianggap arogan. Begitu juga dengan orang Murba, pasti akan marah jika dikatakan partainya ternyata tidak ada artinya sama sekali. Dan kaum marhaen yang mampu mendapatkan banyak pendukung pasti akan sangat tersinggung kalau dikatakan ideologi mereka tidak jelas, karena banyaknya anggota yang tidak mempunyai watak ideologi sebagaimana yang diharapkan Soekarno, pendirinya. Tetapi sayang sekali, hal-hal semacam itulah yang harus dilakukan, jika kita ingin melanjutkan perjuangan golongan kiri di Indonesia. Inilah tantangannya dan mudah-mudahan ini bisa dijawab, karena jawaban atas pertanyaan diatas yang akan melahirlkan kembali golongan kiri yang baru!❐

kevin bacon matt dillon neve campbell
They're dying to play with you.
wild things
BRUCE WILLIS
The code no one could crack.
The key no one could reach.
The agent no one could stop.
MERCURY RISING
FILM PILIHAN DI BULAN NOVEMBER YANG SEGERA MAIN DI MATARAM, EMPIRE & REGENT THEATRE

Persma
Usai 21 Mei

Idealisme yang tinggi dengan wacana yang kritis menjadikan pers alternatif kemudian lekat dengan pers mahasiswa. Namun di era keterbukaan saat ini, pers umum mulai mengikuti jejak pers mahasiswa. Lantas di mana jeda antara persma dengan pers umum?

Tidak banyak kalangan yang tahu, jika pada tahun 1993 telah terjadi pembreidelan sebuah majalah mahasiswa. Adalah ARENA, majalah mahasiswa IAIN Yogyakarta yang mengalami tindakan sewenang-wenang itu. Pembreidelan itu terjadi setelah majalah ini memuat laporan investigasi seputar harta kekayaan Soeharto. Laporan yang sangat berani untuk ukuran saat itu.

Setahun kemudian, tepatnya 21 Juni 1994, awan hitam kembali menyelimuti dunia pers Indonesia. Majalah TEMPO, EDITOR, dan tabloid DETIK mengalami nasib serupa. Sesaat setelah pembredelan itu, Goenawan Mohammad mengatakan, jika satu atau lebih surat kabar ditutup, maka pers yang lain akan takut kehilangan hidup. "Bahkan ada yang ikut bertepuk tangan, senang bahwa kematian itu belum jatuh ke kepala sendiri. Kemudian yang kena berangus pun dalam keadaan terisolir, tak terbela," ujar pemimpin redaksi majalah TEMPO kala itu.

Di sinilah salah satu perbedaan antara pers mahasiswa (persma) dengan pers umum. Pembredelan yang dilakukan penguasa tidak pernah menyurutkan nyali persma untuk tetap kritis.

Pers mahasiswa, seperti dikatakan Dhaniel Dhakidae (1977), cukup konsekuen memanfaatkan kebebasan yang ada pada dirinya, tidak bergantung apakah kebebasan itu diberikan atau tidak.

Nasib pers mahasiswa
Keberanian yang tak didominasi lagi

Kondisi ini menjadikan persma tetap kritis dan berani. Sementara pers umum, seperti biasa, bisa sangat elastis dalam berdialektika dengan sekelilingnya. Dari sini, sebutan pers alternatif itu bermula.

Era keterbukaan

Kamis, 21 Mei 1998, Jenderal (purn.) Soeharto dipaksa turun dari kursi kekuasaan yang selama 32 tahun didudukinya. Angin kebebasan pun berhembus di seluruh pelosok negeri, termasuk dunia pers Indonesia. Dan sekarang, kritik tajam terhadap pemerintah, caci maki, serta pembongkaran kasus korupsi-kolusi-nepotisme yang dilakukan pejabat, sudah menjadi pemandangan lumrah di media massa.

Tidak berhenti sampai di situ. Bak cendawan di musim penghujan, media baru pun berlomba-lomba hadir ke hadapan publik. Bersamaan dengan terbukanya ruang politik saat ini, ada 141 tabloid dan 62 majalah baru yang terbit (Kompas, 18/10). Jumlah yang sebenarnya sangat fantastis untuk ukuran negara yang sedang diguncang krisis.

Kekritisan dan keberanian yang dulu banyak diperankan oleh persma, sekarang juga dilakukan oleh pers umum. Lantas, ciri pembeda yang kuat, yang dulu melekat pada persma perlahan cair. Nah, jelas ini adalah tantangan yang berat bagi persma untuk maju dan melangkah di tengah kerumunan pers umum.

Reorientasi Persma

Bukan perkara yang mudah bagi persma untuk menyiasati kondisi yang terjadi sekarang ini. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah yang menumpuk. Mulai dari masalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki, keorganisasian yang semrawut, minimnya fasilitas, sampai kesulitan dana. Semua masalah itu menunggu giliran untuk dicarikan jalan keluarnya.

Persoalan yang tak kalah peliknya adalah pencarian ruang baru bagi persma di era keterbukaan ini. Mengingat, persma tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pers yang berani menyuarakan idealisme.

Berbagai upaya memang tengah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pegiat persma di Yogyakarta, setidaknya dapat dijadikan gambaran atas usaha itu. Dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya menyangkut soal keredaksian. Hal ini mutlak dilakukan, agar pers mahasiswa kembali mempunyai warna yang berbeda dengan pers umum.

HIMMAH, misalnya. Majalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini akan hadir dengan cara pandang baru dalam pemilihan tema yang akan diangkat. Majalah ini tidak ingin terjebak pada persoalan yang bersifat elitis. Mereka mencoba membidik permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat *grass root*. "Problem yang dihadapi bangsa ini, tidak hanya persoalan politik maupun ekonomi semata, tapi lebih pada persoalan kebudayaan. Ada nilai-nilai yang ingin dibangun," ujar M. Ramadhani, Redaksi Pelaksana majalah itu.

Berkaitan dengan persoalan budaya, Amir Effendi Siregar (1984) berharap, persma Indonesia mampu menampilkan kehidupan masyarakat bawah, dengan misi pendidikan kultural yang berjangka panjang. Tujuannya, tulis Amir, untuk perubahan struktural yang lebih manusiawi.

Tidak hanya seputar tema, pembaharuan eksplorasi data dan fakta yang ada di lapangan pun tengah diupayakan. Karena, data sangat penting dalam dunia pers, termasuk persma. Kesalahan dalam pencarian dan penyajian data, akan berakibat fatal dalam menarik suatu kesimpulan.

Untuk itu, model *investigative report* kemudian menjadi pilihan majalah Arena. "Dari data yang terkumpul, bisa dijadikan rujukan kajian lebih lanjut," jelas Nur Budi Hariyanto, mantan Pemimpin Umum ARENA yang baru lengser. Sementara soal tema, ARENA tidak beranjak dari isu-isu besar di luar kampus. "ARENA tetap konsisten dengan tema-tema di luar kampus," tambahnya.

FOTO: KELIEK S

Himmah:
Tak mau terjebak persoalan elitis mahasiswa

Kebebasan pers sejati hanya akan muncul jika posisi masyarakat cukup kuat dalam tatanan politiknya. Kebebasan pers seperti itulah yang dapat membawa perubahan.

Metode *investigative report* memang bukan hal baru bagi dunia pers. Sekarang saja, telah ada beberapa pers umum yang menjadikan metode itu sebagai ujung tombak laporannya. TEMPO adalah salah satunya.

Namun bukan berarti persma akan kalah bersaing. "Kemungkinan menghasilkan laporan yang lebih tajam dan dalam masih ada," hibur Abar. Mengingat, kerja-kerja penelitian membutuhkan waktu yang lama, maka persma yang periodisasi terbitnya relatif berkala, punya waktu lebih banyak dibandingkan pers umum.

Hal yang perlu diingat, pencarian data dan fakta di lapangan harus menggunakan metode yang benar. Selain HIMMAH dan ARENA, perubahan juga terjadi pada EKSPRESI. Majalah mahasiswa IKIP Yogyakarta ini, berubah format menjadi majalah analisis. Demikian dinyatakan Anas Syahrul Alimi kepada BALAIRUNG.

Warna baru itu dapat dilihat pada Ekspresi terbaru, Edisi No.IX/Th VII/ Agustus 1998. Pada edisi ini, setidaknya kata-kata asing, kutipan-kutipan dan bahasa filsafati bertaburan di laporan utama dan laporan khususnya. Sehingga, bagi pembaca yang belum terbiasa dengan bacaan "berat", perlu mengernyitkan dahi untuk memahami tulisannya.

Tidak mengherankan, banyak mahasiswa IKIP yang kemudian protes atas perubahan itu. Tapi EKSPRESI tetap tidak akan mengubah format majalahnya. "Kami tetap komit, biar pasar yang menyesuaikan," tambah Anas.

Menurut pengakuan Anas, gaya berita yang ditonjolkan EKSPRESI ini justru diminati pembaca di luar kampus. Terbukti, majalah ini laku di beberapa koperasi mahasiswa. "Padahal dengan format lama, bisa dikatakan tidak ada yang membeli," tambah Anas.

Namun demikian, bukan berarti EKSPRESI hendak meninggalkan komunitasnya sendiri. Ini dibuktikan ketika EKSPRESI menerbitkan media lain yang mengkhususkan diri pada isu-isu kampus. Media baru yang bertajuk EXPEDISI ini berbentuk *newsletter*, dengan tenggang waktu terbit dua mingguan. Tema yang

diangkat EXPEDISI masih seputar tema lokal, namun tetap punya keterkaitan dengan isu di luar kampus. "Misalnya, menggugat keberadaan MENWA di kampus dengan mengaitkannya pada isu pencabutan Dwi Fungsi ABRI," jelas Dhian Azis, Pemimpin Redaksi majalah EKSPRESI.

Dari sini tampak bahwa persma masih setia mengangkat isu-isu yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, setiap upaya yang dilakukan harus tetap memperhatikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dimiliki masing-masing persma. Ini penting, agar apa yang diusahakan dapat mencapai sasarannya dengan baik.

Menarik apa yang disarankan Dhaniel Dhakidae. Menurut Kepala Litbang harian KOMPAS ini, di kampus sebetulnya cukup banyak pakar, pusat penelitian, dan juga hasil-hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan persma. Kelebihan yang dimiliki oleh persma ini, sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pada bagian lain, kerjasama antar persma se-Indonesia perlu dikembangkan. Ini dapat mulai dari saling tukar informasi sampai menjadikan koresponden beberapa personil persma di lain tempat. Cara ini, selain menghemat dana, tenaga, dan waktu, juga dapat mempererat hubungan antar persma.

Contoh semacam itu pernah dipraktekkan "Gugat". Media aksi yang diterbitkan BPPM UGM ini memiliki jaringan koresponden di beberapa kota. Seperti Jakarta (UI), Purwokerto (Unsoed), Solo (UMS), Yogyakarta (IAIN, IKIP, ISI), dan beberapa kota lainnya. Sayangnya, kegiatan semacam ini berhenti setelah peristiwa 21 Mei.

Bisa jadi, dengan memanfaatkan potensi yang tidak dimiliki oleh pers umum, sebenarnya persma dapat tampil lebih baik.

Catatan Sejarah Penting

Kebebasan pers seperti saat ini pernah dialami sesaat setelah Indonesia merdeka. Tapi, sejak tahun 1957, kebebasan itu direnggut lewat pembredelan tiga puluh dua penerbitan. Tidak berhenti sampai di sini. Tahun 1958, 1959, dan 1961, rejim Orde Lama kembali melakukan pembredelan media massa.

S. Tasrif (1985) menulis, setelah mengalami masa traumatis selama Orde Lama, pers Indonesia mengalami masa kebebasan yang cukup luas. Kebebasan ini tidak hanya dirasakan oleh pers umum, tapi juga pers yang diterbitkan oleh mahasiswa.

Harian KAMI, salah satu koran yang diterbitkan mahasiswa, malah sempat mengalahkan pers umum dalam soal oplah. Kebebasan yang dirasakan oleh pers lumayan lama, delapan tahun. Kemudian, menurut catatan Mochtar Lubis, sejak Januari 1974 media massa menjadi sepi dari berita-berita yang sensetif. Tidak seperti sebelumnya di mana berbagai surat kabar sangat antusias membongkar korupsi dan skandal pertamina.

Bagi Akhmad Zaini Abar (1995), kebebasan pers yang pernah terjadi, lebih dikarenakan adanya perpecahan di tubuh elit kekuasaan. Kebebasan semacam ini dianggapnya sebagai kebebasan pers semu. Artinya, kebebasan itu tidak akan memberikan manfaat apapun.

Media massa hanya bisa menyampaikan tuntutan, koreksi, kritik, serta kecaman, namun tidak dapat menemukan realitas politik yang kondusif bagi kebebasan pers yang sesungguhnya. Kebebasan semu semacam ini akan dicabut kembali ketika elit kekuasaan melakukan konsolidasi.

Pada bagian lain, Abar mengungkapkan bahwa kebebasan pers sejati hanya akan muncul jika posisi masyarakat cukup kuat dalam tatanan politiknya. Kebebasan pers seperti itulah yang dapat membawa perubahan.

Belajar dari sejarah, perubahan yang sedang dilakukan oleh persma sekarang ini jelas harus mengaitkan agenda pemberdayaan masyarakat. Sebab, ini menjadi penting dalam konteks penguatan posisi politik masyarakat.❐

Dedy Sushandoyo
Bambang Pamungkas, Asep Mulyana

SEKOLAH MANAJEMEN DAN PUBLIC RELATIONS
Pendidikan Profesional
DIPLOMA PUBLIC RELATIONS
(1 TAHUN)
PR FOR EXECUTIVE
(2 BULAN)
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
(PR COURSE 1,5 BULAN)
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN
(1,5 BULAN)
Keterangan Pendaftaran
CES PUSAT (YOGYAKARTA)
Jl. Maliboro 183 Lt.2 Telp.(0274) 581706
CES Cabang (SURAKARTA)
Jl. Gajahmada 98 Telp. (0271) 664091

semua artikel
DISKON 10% - 50%
DISKON 25%
PRODUK CF & BE
U2 YOU TWO
FASHION POWER
Jl.Solo No. 27 Phone 512926 Yogyakarta

Tutti Fratelli

Siang itu terasa garang. Terutama bagi laki-laki malang yang baru saja tertabrak mobil pengangkut barang. Sepeda tua yang dikendarainya remuk ringsek berantakan. Sementara tubuhnya yang berlumuran darah tergeletak telentang di pinggir jalan. Sang penabrak tanpa perlu berhenti segera saja tancap gas, menghilang.

Tak lama orang datang dan berkerumun di seputar tempat kejadian. Ada yang bicara bagaimana tabrakan itu terjadi, menyumpah-nyumpah penabrak, ada juga yang sekedar ingin tahu keadaan si korban. Anehnya, tak satupun yang mencoba memberikan pertolongan.

Suasana siang itu memang tak sedramatis kejadian di Solferino, Italia Utara, 24 Juni, seratus tiga puluh sembilan tahun silam. Ketika itu, seorang usahawan gigih, Jean Henry Dunant tiba-tiba saja tergerak hatinya di tengah berkecamuknya perang antara balatentara kekaisaran Austria melawan pasukan persekutuan Perancis-Sardinia. Niat semula menemui Napoleon III untuk kepentingan lisensi bisnisnya di Aljazair berubah mendadak. Nuraninya terusik oleh nasib korban perang.

Hidup dan besar di kalangan keluarga kaya dan terpandang di Geneva tak membuatnya canggung untuk menolong korban. Meski desa Castiglione, tempatnya memulai memberi pertolongan, penuh bau anyir darah, dan rintih kesakitan serdadu yang terluka. Dunant memang tak sendiri. Dengan kemampuan berorganisasinya, terkumpul sukarelawan-sukarelawan dadakan yang siap bekerja tanpa pamrih. Sebagian besar terdiri dari wanita-wanita Italia biasa yang sama sekali tidak terlatih.

Awalnya berat buat wanita-wanita baik yang biasanya hanya bersentuhan dengan kesabaran dan kelembutan itu. Apalagi serdadu-serdadu yang terluka adalah orang-orang asing yang mereka takuti, bahkan berusaha merampas kemerdekaan mereka. Tetapi dengan kesabaran luar biasa, Dunant memotivasi mereka, "*Tutti fratelli, tutti fratelli,* mereka semua adalah saudara." Sampai akhirnya mereka saling berucap dan menyemangati sendiri, *tutti fratelli.*

Situasi saat itu serba sulit. Kamp penampungan darurat di gereja Chiesa Maggiore terasa semakin sesak. Belum dikenal adanya disinfektan, antibiotika atau obat-obatan penawar luka apapun. Terbatas sekali persediaan makanan dan minuman. Dan seperti biasanya banyak penyakit merajalela. Maka kematian demi kematian seperti balada yang selalu menyertai para sukarelawan.

Semua itu bukanlah kesia-siaan bagi Dunant. Satu persatu didatanginya serdadu-serdadu yang terluka, diganti perbannya agar luka tak membusuk, dan disuapkannya air.

Pertempuran enam belas jam di Solferino adalah salah satu kenangan terpahit dalam sejarah Eropa. Semula tercatat 3 panglima besar, 9 jenderal, 1566 perwira dan 20.000 prajurit tewas dan luka-luka parah, yang kemudian bertambah dua kali lipat. Peristiwa ini diungkapkan Dunant dalam bukunya *Un Souvenir de Solferino* (Kenangan dari Solferino), yang segera mendapatkan tanggapan dan simpati luas di Eropa.

Sekembalinya dari daerah pertempuran, Dunant terus berpikir bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang. Tak lagi peduli usahanya di ambang kebangkrutan, dengan segenap daya dihimpunnya beberapa orang untuk merumuskan konsep organisasi kemanusian. Bersama pengacara Gustave Moynier, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Maunoir, dan Jenderal GH Dufour akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1863 gerakan Palang Merah, yang di Timur Tengah diadaptasi dengan nama Bulan Sabit Merah resmi berdiri.

Meski kemudian banyak penghargaan internasional diterimanya, Dunant tetaplah sosok yang rendah hati. Katanya, " ...yang telah mengilhami saya untuk berangkat ke Italia selama perang pada tahun 1859 adalah jerih payah Nona Florence Nightingale di dalam Perang Krim." Memang, Florence Nightingale lebih dulu menoreh baktinya dibanding Dunant meski hidup sejaman. Tokoh satu ini tak kalah mengagumkan. Lari dari kemewahan hidup sebagai putri keluarga kaya, memberontak kultur patriarki Inggris, menolak menikah, demi memilih niatnya memperbaiki citra profesi perawat. Matinya pun lepas dalam kesederhanaan. Sesederhana tulisan dalam nisannya, "FN lahir tahun 1820, meninggal tahun 1950."

Florence Nightingale, Jean Henry Dunant, Mahatma Gandhi, Bunda Theresa dan sederet tokoh lain bukan sekedar ilustrasi-ilustrasi manis yang menghias bingkai buku sejarah bernama kasih sayang. Mereka adalah aliran minyak pengisi obor cita-cita kemanusiaan yang diistilahkan Dunant sebagai toleransi semesta. Wawasan yang sederhana, indah dan jelas. Uluran tangan tanpa diskriminasi, tanpa ketakutan dan keterasingan. Tak seperti nasib lelaki itu.

Ambulans belum datang. Sementara orang-orang masih saja ribut membicarakan tabrakan, sebagian lagi hanya memandang dengan keraguan dan ketakutan terbungkus keterasingan. Aspal terasa semakin panas dan lelaki malang itu sekarat.□

Irfan Muktiono

REORIENTASI PERS MAHASISWA

Didik Supriyanto
Redaktur Tabloid ADIL Jakarta

Apa kontribusi pers mahasiswa bagi gerakan mahasiswa untuk menumbangkan Jendral Besar Soeharto? Saya mungkin akan dikecam oleh aktivis pers mahasiswa, jika saya katakan tidak ada. Bagaimanapun juga menjelang Soeharto tumbang, hampir semua pers mahasiswa yang sempat saya lihat ramai-ramai menggugat Orde Baru. Lalu, sesudah Soeharto tumbang, pers mahasiswa mencatat kisah sukses itu sambil terus mengkritisi penguasa baru, Habibie.

Kontribusi pers mahasiswa dalam gerakan reformasi-gerakan menumbangkan Soeharto memang ada. Tapi menurut saya tidak signifikan. Seandainya saja pers mahasiswa saat ini tidak terbit, saya percaya gerakan itu akan tetap berjalan. Tentu hal ini berbeda dengan kisah sukses pers mahasiswa 1960-an, 1970-an dan dalam batas-batas tertentu 1980-an. Memang masih bersifat hipotesis, namun bukan tanpa alasan saya mengungkapkannya.

Pertama, pers mahasiswa adalah media yang teralienasi. Terasing dari lingkungannya. Misalnya, saya sering bertemu dengan mahasiswa UGM yang sama sekali tidak tahu menahu apa itu *Bulaksumur*, apalagi *Balairung*. Sebagian besar dosen juga tidak *ngeh*. Tentu karyawan demikian juga. Saya pilih *Bulaksumur* dan *Balairung*, bukan semata-mata karena saya alumnus UGM dan kebetulan pernah aktif di kedua media tersebut, tetapi karena oleh ISAI-lembaga sosial yang bergerak di bidang pers pimpinan Goenawan Muhammad-keduanya dinilai terpandang di kelasnya.

Kedua Pers mahasiswa tidak aktual. Tidak dapat terbit tepat waktu. Misalnya pada aksi menuntut reformasi yang baru lalu. Pada saat mahasiswa butuh bahan untuk mengecam soeharto-ini terjadi pada April 1998- pers mahasiswa masih mempersoalkan SU MPR. Pada saat mahasiswa butuh bahan untuk mempersoalkan dwi fungsi ABRI-ini terjadi pada september- pers mahasiswa masih sibuk mengurusi Habibie dan harta Soeharto.

Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat idealisme pers mahasiswa. Sebab, idealisme pers mahasiswa menuntut lebih banyak menulis, 'apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa'. Bukan sekedar mencatat'apa yang dilakukan mahasiswa'. Aktivis pers mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengembangkan sikap kritis, tetapi juga memberi 'bahan bakar' agar sikap kritis itu bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan.

Dalam hal ini, pers umum-lebih-lebih televisi- dengan caranya sendiri telah melakukan provokasi yang luar biasa. Mereka sebetulnya juga tidak memberi 'bahan bakar' untuk aksi mahasiswa. Bahkan ia sering dikecam aktivis karena tidak pernah secara lengkap memuat tuntutan mahasiswa. Tetapi, langkah pers umum yang rajin menggambarkan bentrokan mahasiswa-aparat, membuat detail kekerasan yang dilakukan polisi dan tentara, serta menghitung korban-korban aksi, tlah ikut membakar mahasiswa untuk terus mengencangkan aksi

Problem Eksistensial (1)

Saya mengamati banyak aktivis persma--kalau tidak bisa dikatakan semuanya terlibat aktif menumbangkan Soeharto. Tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga di Lampung, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, dan Surabaya. Saya setuju, dan sah-sah saja aktivis mahasiswa melakukan hal tersebut.

Cuma saya curiga, jangan-jangan ini merupakan bentuk pelarian aktivis persma. Karena mereka sadar penerbitan mahasiswa tidak dibaca oleh mahasiswa; karena mereka sadar, pers mahasiswa tidak bisa mendorong aksi mahasiswa, maka mereka melakukan aksi langsung. Menjadi penggerak aksi.

Tidak ada yang salah dengan semua itu. Hanya saja, karena menjadi penggerak aksi lebih mentereng dari pada aktifis pers mahsiswa, maka tidak jarang mereka yang telanjur menjadi penggerak itu, lupa akan kerja pers mahasiswanya. Dengan sadar mereka melupakan tanggungjawabnya sebagai aktivis pers mahasiswa. Baru setelah aksi-aksi reda dan penggerak aksi tidak banyak akrifitas, mereka kembali menjadi aktifis pers mahasiswa.

Tentu bagus, jika lembaga pers mahasiswa menjadi batu loncatan bagi setiap aktifisnya. Yang sering terjadi, tidak sedikit aktifis pers mahasiswa yang sudah menetapkan dirinya sebagai penggerak aksi -dan oleh karena itu mereka menelantarkan penerbitannya-pada saat yang sama, masih saja mengaku sebagai aktivis pers mahasiswa. Kalau mereka tidak bisa aktif lagi di pers mahasiswa -sebagai aktifis yang bertanggung jawab- mestinya mereka langsung mundur. Ini akan membantu proses regenerasi pers mahasiswa.

Pola rangkap predikat, ya aktifis pers mahasiswa, ya aktivis pernggerak aksi, agaknya merupakan warisan dari generasi pers mahasiswa 1980-an, generasi pers mahasiswa NKK/BKK. (lihat, Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, PT Sinar Harapan dan Yayasan Sinyal, 1998). Dilihat dari konteks sosial-politik saat itu, pola rangkap predikat saat itu memang merupakan keharusan. Sebabnya, pada masa itu aktivitas politik kemahasiswaan -khususnya di dalam kampus- mampu ditekan oleh kebijakan NKK/BKK.

Jadi, kalau ada seorang aktifis pers mahasiswa yang juga menjadi aktivis penggerak mahasiswa, dan ternyata tidak mampu menjalankan tugas-tugas rangkap tersebut, tinggal punya satu pilihan: menjadi aktivis pers mahasiswa yang bertangungjawab atau menjadi aktivis penggerak aksi.

Problem Eksistensial (2)

Ada satu pola pikir yang salah atau kebiasaan buruk yang masih menjangkiti -bahkan semakin menjadi-jadi- kalangan aktivis pers mahasiswa sekarang ini, yakni tentang perlombaan pers mahasiswa.

Pada awal 1980-an Direktorat Kemahasiswaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pernah menyelenggarakan perlombaan pers kampus mahasiswa -sebuah istilah yang ditujukan buat penerbitan yang dikelola bersama mahasiswa-dosen dan dipimpin oleh pejabat kampus. Perlombaan tersebut tak berlangsung lama, hanya tiga atau empat kali. Setelah itu nasibnya tidak jelas.

Tetapi beberapa lembaga, baik yang ada kaitannya dengan pers atau tidak, kerap mengadakan perlombaan semacam itu. Belakangan yang terkenal adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh ISAI (Institut Studi Arus Informasi). Siapapun pengelola pers mahasiswa yang menang dalam perlombaan-perlombaan itu, pasti akan senang -apalagi kalau mendapat hadiah uang banyak. Juga bangga, karena hasilnya karyanya dianggap sebagai yang terbaik.

Lebih dari itu tidak. Tujuan agar perlombaan itu memacu peningkatan kualitas penerbitan mahasiswa, non sense. LIhat perlombaan yang diselenggarakan oleh ISAI. Pemenangnya hanya itu-itu saja. *Balairung* dan *Bulaksumur*. Selaku orang yang mengikuti terus kedua media itu, saya bisa pastikan tidak ada lonjakan prestasi yang berarti darinya, baik secara kualitas-apalagi kuantitas. Dengan terus bercokolnya *Balairung* dan *Bulaksumur*, berarti perlombaan itu tidak gagal menarik penerbitan mahasiswa lain untuk tampil melebihinya.

Kesalahan gagasan perlombaan pers mahasiswa adalah menempatkan pers mahasiswa sebagai aktivitas yang bisa dikompetisikan. Ia disamakan dengan kegiatan olah raga yang mempunyai aturan main jelas -yang diawasi oleh wasit- serta prestasi yang terukur -yang dicatat oleh juri. Ia juga disamakan dengan kegiatan kesenian yang sudah lama memiliki standar baku keindahan.

Apakah pers mahasiswa memiliki standar baku seperti itu? Sebuah tulisan ilmiah atau artikel bisa asaja diukur, demikian juga sebuah fiksi. Tetapi apakah penerbitan yang menampung berbagai macam tulisan (surat pembaca, artikel, berita, editorial) dan ilustrasi (foro, lukisan, kartun, karikatur) bisa ditemukan standar bakunya? Sulit, kalau pun tidak bisa. Karena itu mengkategorikan sebagai yang terbaik, baik, cukup, tidak baik dan lain-lain, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kekeliruan perlombaan pers mahasiswa.

JOURNALISM IN TRANSITION. TITIK

Pers mahasiswa hadir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya, masyarakat pembacanya. Karena itu baik buruknya pers mahasiswa, yang menentukan adalah pembacanya. Selain itu, tidak ada kesamaan kebutuhan antara pembaca pers mahasiswa yang satu, dengan pembaca pers mahasiswa yang lain, sehingga tidak bisa disusun sebuah standar baku untuk menilainya. Kalau ada sebuah penerbitan yang penampilannya "bagus" isinya "berbobot" tetapi tidak dibaca oleh komunitasnya -lantaran dijual dengan harga mahal, misalnya- apa bisa dikategorikan sebagai penerbitan terbaik?

Tanpa sadar para penyelenggara perlombaan itu telah ikut-ikutan mereduksi fungsi pers mahasiswa, sebagai mana diinginkan oleh Depdikbud pada awal NKK/BKK. Pers mahasiswa dijadikan sebagai kegiatan yang dikompetisikan, disejajarkan dengan kesenian dan olah raga. Pers mahasiswa sebagai kegiatan yang bisa dipertontonkan, bukan sebagai kegiatan yang

mengemban idealisme mahasiswa lewat pelaksanaan fungsi pers (informasi, hiburan, edukasi dan kontrol sosial)

Tak disangsikan lagi 'penjajahan' terhadap idealisme pers mahasiswa lewat perlombaan-perlombaan itu akhirnya berhasil. Aktifis pers mahasiswa sekarang, dan dua tiga generasi sebelumnya, sangat bangga bila medianya mendapat predikat terbaik Meskipun mereka tahu, bahwa medianya tidak dibaca oleh komunitasnya. Malahan keinginan untuk mendapat pengakuan terbaik -dari pihak lain- itu sedemikian besar, hingga mereka dengan sadar mengorbankan kepentingan pembacanya.

Yang terjadi adalah aktifis pers mahasiswa mengalami problem eksistensial yang mendasar. Pers mahasiswa tidak diakui oleh komunitasnya. Aktivis pers mahasiswa tidak diakui oleh komunitas yang mesti diabdinya. Karena tidak ada pengakuan itu, antar-aktivis mencoba mempertahankan eksistensi secara bersama-sama. Mereka saling mengakui dan saling mendukung. Aktivis pers mahasiswa suatu kampus, sudah puas bila kawannya dari kampus yang lain bilang, "Tabloidmu bagus". Tak penting, apakah tabloid itu diperlukan atau tidak oleh warga kampusnya.

Kembali ke komunitas

Tidak ada kata lain untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas adalah kembali ke komunitas. Pers mahasiswa harus kembali bertugas memenuhi kebutuhan pembacanya, kembali melayani mahasiswa atau warga kampus pada umumnya.

Harus segera dihindari upaya-upaya atau kebiasaan-kebiaasan yang mengutamakan 'bentuk' dari pada 'isi'. Karena pengutamaan 'bentuk' dari pada 'isi' itu merupakan bentuk dari keinginan untuk menjadi yang terbaik. Bukan terbaik bagi komunitasnya, tetapi terbaik menurut penilaian pihak lain. Gejala ini mungkn sudah terjadi sejak lama atau bahkan sepuluh tahun yang lalu, karena itu akrivis pers mahasiswa sekarang harus berani mengubah haluan. Tak perlu takut dibayang-bayangi masa lalu, sebab 'keterbukaan' masa lalu bukan ukuran untuk hari ini.

Persoalan klasik yang dikeluhkan oleh aktivis pers mahasiswa 1980-an dan 1990-an adalah dana. Sayangnya hampir sepanjang masa itu, aktifis pers mahasiswa tidak pernah bersikap realistis. Karena pendahulunya sudah bikin majalah, maka mereka mencoba mengikuti jejak itu, sambil berupaya keras agar majalahnya lebih 'berkualitas' dari sebelumnnya. Halaman dipertebal, warna diperbanyak. Biaya produksi pun membengkak.

Akibatnya, kesibukan redaksi bukannya untuk menulis, kesibukan usaha bukannya menyebarluaskan majalah ke tangan pembaca, tetapi terfokus pada usaha mencari dana. Kesibukan mencari dana pun terjadi di kalangan aktivis yang berusaha meningkatkan 'kualitas' tabloid yang telah dirintis pendahulunya. Menurut saya kerja keras itu sia-sia, karena produk itu tidak diperhatikan oleh komunitasnya.

Aktifis pers mahasiswa tidak perl;u diajari, bagaimana membuat media yang murah, sesuai dengan dana yang dimiliki. BPPM UGM dan UPM UI sudah pernah melakukannya lewat *Gugat* dan *Bergerak*. Mungkin karena 'gengsi'-dianggap sebagai terbitan yang sederhana, bukan yang 'terbaik'- maka usaha itu tidak dilanjutkan. Padahal penerbitan macam itu bisa menghindarkan aktivis terbelit masalah pendanaan. Proses penggarapannya pun mudah, sehingga tidak memerlukan banyak waktu.

Yang terakhir ini penting guna mempertahankan kontinuitas penerbitan. Salah satu sifat agar sebuah penerbitan bisa disebut sebagai pers adalah terbit secara periodik. Ini persoalan mendasar yang tidak pernah diselesaikan oleh pers mahasiswa dua dekade terakhir. Padahal kalau kontinuitas terbitan itu bisa dijaga -seburuk apapun sebuah media, asalkan lingkup pembacanya diketahui secara jelas- maka media itu akan dijadikan tempat beriklan bagi banyak pihak.

Ada kebiasaan lama -yang sebetulnya tidak sehat- yang masih membelenggu aktivis, yakni kebiasaan 'ngomong besar'. Para aktivis pers mahasiswa merasa dirinya bukan aktifis yang sesungguhnya, kalau tidak menulis masalah-masalah besar yang memerlukan setumpuk referensi dan belasan narasumber. Memang bagus tetapi sangat tidak realisris.

Apalagi pada era yang sudah makin terbuka ini, wilayah-wilayah 'sulit' itu sudah dengan mudah diadul-adul oleh pers umum yan ditopang oleh modal besar dan tenaga profesional. Aktivis pers mesti sadar, sekadar mau bilang, "Orde Baru Otoriter", "Suharto Bandit", atau "Habibie Presiden KKN" tentu tidak butuh narasumber elit. Pers mahasiswa mestinya lebih mengoptimalkan narasumber-narasumber yang ada di komunitasnya. Tidak saja hal ini murah, tetapi secara umum komunitas itu juga ingin mendengarkan suara-suara anggotanya.

Karena kesukaan 'ngomong besar' pers mahasiswa juga tidak peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Mungkin dianggapnya remeh. Tetapi dalam konteks sosial komunitas itu, masalah-masalah tersebut sangat menjadi perhatiannya. Misalnya persoalan-persoalan klasik seperti perselingkuhan penyalahgunaan jabatan, konflik, prestasi , dan lain-lain pasti muncul dan selalu menarik perhatian. Komunitas juga selalu membutuhkan informasi mendasar bagi kelangsungan hidupnya, misalnya soal kebutuhan pokok, seperti pakan, sandang, dan papan.

Pers mahasiswa juga tidak biasa menarik masalah nasional ke dalam konteks komunitas pembacanya. Misalnya kalau ada pejabat dituduh korupsi, kenapa tidak dicari kemunginan ada anak atau kerabat pejabat yang berada di kampus. Kalau tiba-tiba ada tokoh nasional yang sedang jadi pembicaraan, dan kebetulan tokoh itu pernah berada di komunitas itu kenapa tidak digali masa lalunya ketika berada di sana.

Contoh-contoh itu perlu saya sampaikan, karena saya melihat pers mahasiswa adalah media yang harus kembali untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya. Kegiatan pers mahasiswa bukanlah aktivitas mubazir (ditulis dan dibaca sendiri). Ia mengabdi kepada kepentingan pembacanya, ia harus bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang berkembang di komunitasnya.

Ini bukan berarti saya menolak pers mahasiswa utuk membicarakan problem-problem sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan. Tidak. Hanya ia harus melihat masalah-masalah besar itu dalam konteks komunitasnya. Kalau pers mahasiswa nekad 'ngomong besar' terus, pasti ia akan kalah bersaing dengan pers umum. Sudah begitu hasil kerjanya tidak akan diperhatikan oleh komunitasnya, sebab mereka sudah mendapatkannya dari pers umum.❐

Pagar berduri itu bernama Dwifungsi...

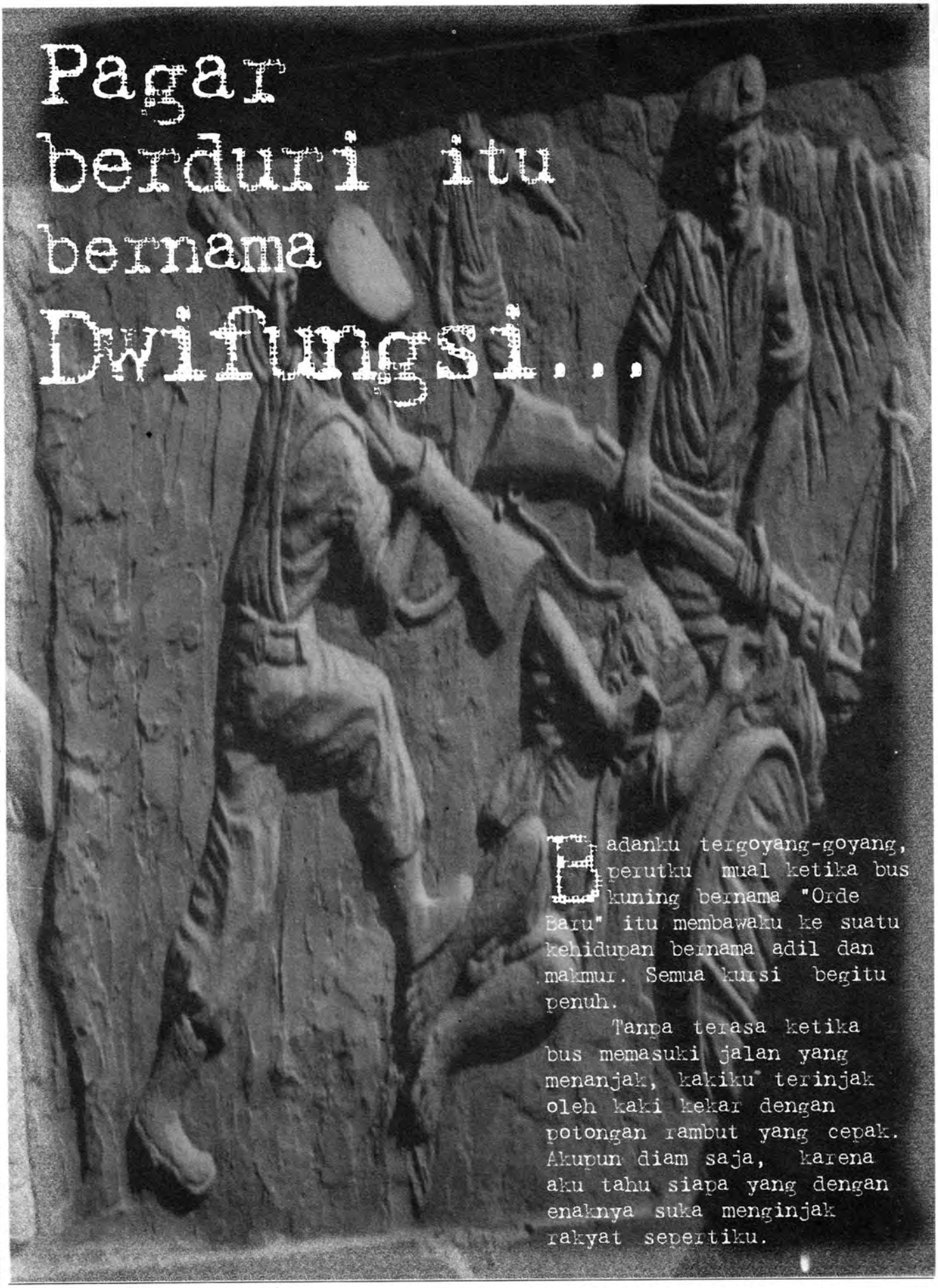

Badanku tergoyang-goyang, perutku mual ketika bus kuning bernama "Orde Baru" itu membawaku ke suatu kehidupan bernama adil dan makmur. Semua kursi begitu penuh.

Tanpa terasa ketika bus memasuki jalan yang menanjak, kakiku terinjak oleh kaki kekar dengan potongan rambut yang cepak. Akupun diam saja, karena aku tahu siapa yang dengan enaknya suka menginjak rakyat sepertiku.

KELIK SUPRIYANTO

PHOTOS OF EAST TIMOR

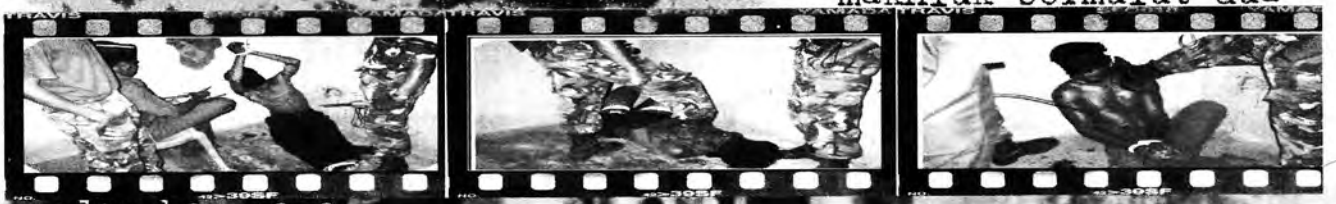

PHOTOS OF EAST TIMOR

Pikiranku melayang pada berbagai peristiwa yang terjadi di negeri yang katanya aman tenteram, tanahnya "gemah ripah lohjinawi".

Terbayang olehku kuburan masal di daerah operasi militer di Aceh, pembantaian di Tanjung Priok, Pembunuhan di Dili, Penembakan terhadap rakyat di Sampang, penculikan aktivis pro-demokrasi, penembakan mahasiswa Trisakti oleh makhluk bersenjata tanpa hati nurani.

"Bagaimana saya harus berdebat dengan makhluk bermulut dua sedangkan saya hanya bermulut satu," gerutu seorang politisi, "Bila mulut satunya berhenti bicara maka mulut yang lain yang akan berteriak, "dor, dor!" Dengan dalih demi keamanan dan ketertiban, nyawa menjadi sangat murah bagi Zombie berbaju doreng itu.

Saya sampai lupa sudah berapa puluh ribu nyawa melayang selama 32 tahun ini.

BAMBANG PAMUNGKAS

Pikiranku melayang pada sebuah pagar yang katanya untuk melindungi rakyat Indonesia, tapi sering berbalik memakan tanamannya. Pagar yang tumbuh duri itu telah melukai dan membunuh banyak orang.

BAMBANG PAMUNGKAS

Untuk apa pagar itu tetap dipertahankan?
Inilah saatnya pagar itu dirobohkan bersama-sama. Dicabut dan diganti dengan pagar yang lebih punya hati nurani.

BAMBANG PAMUNGKAS

Kesadaranku pulih oleh desakan beberapa pengamen yang masuk ke dalam bus sambil mendendangkan sebuah lagu :

Hari ini sengaja aku mengadu
Kepadamu Indonesiaku
Tentang sistem Orde baru yang menyiksaku
Oh, tentu kamu tahu
Bayangkan ulah mereka
Mereka sok berkuasa
Mereka suka menyiksa, bahkan membunuh sudah biasa

Aku melihat kekejaman aparat
Pukul sana pukul sini sampai rumah sakit
Aku melihat tindakan aparat
Tendang sana tendang sini sampai ke akhirat

(Serikat Pengamen Indonesia)

BAMBANG PAMUNGKAS

Foto: Bambang Pamungkas, Kelik Supriyanto
Narasi: Kelik Supriyanto

TEKNOLOGI KERETA API:

Diskriminatif dan Belum Layak

Pengembangan teknologi kereta api kita terlihat diskriminatif. Di kelas kereta rakyat (baca: kelas ekonomi) penumpang tidak dimanusiakan. Satu gerbong kereta kelas ekonomi berkapasitas 104 orang, sering terisi hingga dua kali lipatnya. Ternyata belum ada acuan yang jelas tentang standar kelayakan pelayanan kereta api.

Telah lama kita mengenal kereta api, minimal kita bisa menggambarkannya sebagai susunan besi beroda yang berbaris patuh di belakang sebuah kereta penarik yang salah satu bagiannya mengepulkan asap hitam dan bunyi deru mesin, kadang juga bersiul tiga atau empat kali ketika akan melewati rel jalur khusus yang terpotong oleh jalan raya.

Tet..tet..tet... Semua, tanpa terkecuali, harus berhenti di depan pembatas yang sengaja diturunkan. Setelah menunggu agak lama (kadang sangat lama), lewatlah sang kereta disertai gemuruh tanah dan jejak roda-roda besinya pada rel besi. Jangan coba menerobos kalau keretanya sudah lumayan dekat karena maaf saja dia tidak akan berhenti untuk mempersilakan kita lewat.

Demikianlah kita mengenal kereta api yang kaku, cuek dan sangat tertutup. Bahkan kadang-kadang dia tidak cukup jujur menjawab kapan waktu berangkat ? apalagi menjawab kapan sebenarnya kita akan tiba di tujuan.

Keangkuhan, sifat dingin, eksklusifitas dan ketertutupan kereta api sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh faktor teknologi yang dimilikinya dibandingkan oleh faktor operasional dan pelayanan. Di Indonesia, operasional kereta api berada di bawah otoritas Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Perhubungan. Sejauh mana keintiman hubungan kereta api dengan realitas sosial berpengaruh terhadap asumsi-asumsi pengembangan teknologi kereta api masihlah merupakan tanda tanya.

"Sebenarnya *leading* di bidang teknologi ada di INKA, menyangkut kepedulian bagaimana kita memperlakukan kereta, akan tetapi standar kelayakan kereta itu belum ada di Departemen Perhubungan harus seperti apa, menyangkut klasifikasi kelas tertentu dengan standarisasi, sama halnya dengan angkutan udara dan angkutan darat bis umum", jelas Ir. Gunesti Wahyu H. Kepala Departemen Teknologi, Industri Kereta Api (INKA) ketika ditemui *Balairung* di ruang kerjanya.

Hal tersebut diakui Ir. Soedarwadji, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Kanwil Perhubungan Yogyakarta, bahwa belum ada peraturan dari pemerintah dan lembaga khusus yang dibentuk untuk layak operasi sebuah kereta api itu, seperti halnya sarana angkutan lain.
Ditambahkan pula bahwa kereta api memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana angkutan terutama sebagai angkutan massal, dan mengakui bahwa ketidakteraturan yang terjadi terutama kontrol muatan penumpang juga hal yang harus dipikirkan dan sebenarnya berakar dari faktor pendidikan dan budaya kurang tertib sebagian masyarakat pengguna kereta api.

REPRO: REPUBLIKA

Suasana gerbong kelas ekonomi
Kambing pun masuk KRL

Mengenai faktor keamanan, Soenardji masih mengakui standar keamanan lisensi luar negeri yang sebenarnya telah ada sejak zaman Belanda.

Piranti lain yang sangat berperan dalam urusan keamanan dan kelayakan kereta api adalah Balai Yasa, bengkel kereta. Menurut Ir. J. Satmoko Hardono, MT, Kepala Balai Yasa Perumka Yogyakarta, ada tiga tahapan pengujian yang harus dilalui kereta api untuk pemeliharaan berkala atau setelah mengalami kerusakan karena tabrakan supaya dapat beroperasi normal. Pertama, uji mesin dan pembebanan diam, uji jalan di dalam bengkel, serta terakhir, uji kelayakan di luar bengkel dengan memakainya langsung untuk menarik kereta penumpang pada jarak tertentu. Tetapi pengujian ini mengandung resiko apabila terjadi kerusakan/kegagalan teknologi.

Usaha angkutan kereta api Indonesia berbentuk monopoli, dan persaingannya tidak flexible. Sifat monopoli ini terjadi sejak mulai berdiri karena pembentukan usahanya atas dasar hak monopoli (Prof.Rustian *Ekonomi Transportasi*, hal,41, 19..)

Tidak adanya kompetisi menyebabkan perkembangan teknologi kereta api Indonesia berjalan di tempat. Tidak banyak perkembangan yang berarti selain peningkatan standar kenyamanan dalam lima tahun terakhir.

Gunesti menyangkal penilaian bahwa teknologi kereta api kita ketinggalan atau stagnan. Namun ia mengakui dalam pengembangan teknologi kereta api tidak ada standarisasi studi kelayakan yang jelas dari pemerintah. Selama ini hanya didasarkan pada dua faktor utama sebagai parameter utama kemajuan teknologi kereta api, yaitu keamanan dan kenyamanan.

Swastanisasi yang membuka peluang persaingan pun belum terjadi. Padahal lewat UU No. 13 1992, peluang ke arah sana ada. Sayangnya pola investasi swasta untuk sarana dan prasarana belum tercakup.

Menurut Edi Haryoto, Dirut Perumka, swastanisasi bisa saja, tetapi memerlukan keyakinan bahwa modal yang ditanamkan legal dan dilindungi oleh hukum. Diperlukan pemahaman bahwa tidak hanya modal di bidang kereta api saja yang akan memakan biaya mahal.

Main-main elastisitas

Sejak pertama kalinya dirintis oleh seorang Gubernur Belanda, Mr.LAJ Baron Sloet Van De Beele sekitar tahun 1864 dengan pembangunan jalur rel perintis Kemijen-Tanggung (lintas Semarang) hingga saat ini, yang telah menyebar ke seluruh pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatera, kereta api tetap menyandang predikat sebagai angkutan rakyat. Kereta api menjadi satu-satunya sarana angkutan yang menghubungkan masyarakat desa-pedalaman Jawa dengan pusat perdagangan di kota.

Fasilitas yang tidak memadai pada kereta kelas ekonomi merupakan wajah keseharian salah satu layanan jasa angkutan milik pemerintah ini. Banyak yang berpendapat bahwa hal itu wajar karena bayarannya murah. "*Gimana* lagi mas, kereta ekonomi *yo* dari dulu juga *koyo* gini," tukas seorang bapak setengah baya yang saat itu sedang naik kereta api ekonomi Pasundan jurusan Surabaya.

Suasana yang penat, berdesak-desakan dan panas di gerbong tanpa sistem pendingin, atau jika ada sudah tidak berfungsi baik bisa membuat penumpang cepat mengalam dehidrasi. Sementara jika banyak minumpun keadaan berikutnya tak lebih menguntungkan. "Sebaiknya adik jangan banyak minum, karena WC-nya rusak dan air tidak mengalir," nasihat bapak setengah baya tadi.

Sangat berbeda dengan pendapat salah seorang penumpang kelas eksekutif, "Sebenarnya saya pengen baca-baca buku sambil lihat-lihat keluar, tapi malah ketiduran. Maklum adem banget sih."

"Sebetulnya tidak ada istilah kalah dan dikalahkan dalam pelayanan Perumka", tegas Edi Haryoto, Direktur Utama Perumka."Kalau dilihat dari biaya, kelas ekonomi dibandingkan eksekutif adalah satu dibanding dua belas, artinya harga satu tiket eksekutif bisa untuk dua belas tiket kelas ekonomi. Dengan demikian kelas eksekutif elastis terhadap pelayanan tetapi tidak elastis terhadap harga dan untuk kelas ekonomi sebaliknya, tidak elastis terhadap pelayanan tetapi elastis terhadap harga," lanjut Edi Haryoto.

Hal ini terjadi demi peningkatan nilai guna *(utility)* sebesar-besarnya agar unit *cost*-nya berkurang. Maka cara yang ditempuh adalah dengan memperbesar volume angkutan sampai pada tingkatan maksimum. Yang jadi masalah selama ini adalah

sistem kontrol yang tidak baik terhadap jumlah penumpang kelas ekonomi yang naik dan turun di setiap stasiun.

Pada kereta-kereta produksi INKA, digunakan angka keamanan 1,3 kali jumlah pembebanan maksimum atau Maksudnya untuk menghindari faktor pembebanan lain selain berat penumpang, misalnya faktor getaran. Namun kenyataannya batas maksimum ini pun sering tidak dipedulikan.

Menurut Dr.Ir. Jamasri Ph.D, dosen Teknik Mesin UGM, untuk poros kereta api harus menggunakan angka keamanan minimal 6, dan pemilihan bahannya harus berdasarkan umur lelah bahan, atau ketahanan bahan setelah uji coba dengan pembebanan real dalam minimum 6 juta putaran. Ditambahkan lagi bahwa masalah teknologi kereta di Indonesia adalah pada kurang lebarnya rel, karena tidak rasional dengan kemungkinan penambahan kecepatan kereta api apalagi dengan kecepatan di atas 120 km/jam. Ada kemungkinan kereta akan terjungkal saat belokan.

Soal pembebanan juga menarik untuk dicermati. Menurut Gunesti, kereta listrik di Jabotabek (KRL) dirancang dengan kemampuan delapan orang untuk setiap meter perseginya pada kondisi *crash load* (kemampuan maksimum), padahal pada kenyataannya untuk satu meter persegi dapat diisi sampai sebelas orang. Kondisi ini terjadi setiap hari efektif di Jabotabek. Apalagi jika beban maksimum didasarkan pada pembebanan statis (pembebanan ketika berhenti). Padahal menurut penjelasan Ir. Soekrisno, Ph.D, staf ahli PAU UGM, ketika beban berjalan dan mendapat beban *impact* maka harga beban bisa naik dua sampai tiga kali beban statis, apalagi bila bebannya berayun seperti pada alat pengangkat kontainer di pelabuhan.

Sementara menurut Jamasri yang juga staf pengajar teknik mesin UGM kelebihan beban menyebabkan keretakan, bahkan kepatahan poros, dan mengsangsikan pengembangan teknologi kereta api tanpa pelebaran lintasan, apalagi untuk kecepatan diatas 150 km/jam. Tapi Gunesti meyakinkan " Terbukti produk-produk kami tidak pernah gagal dalam hal teknologi, dan kalaupun terjadi, itu karena kesalahan manajemen operasinya, seperti tabrakan"

Pada konsep perancangan yang sebenarnya, kelas eksekutif diperuntukan bagi 52 penumpang, kelas bisnis 60 penumpang, sedangkan kelas ekonomi bisa sampai 106 penumpang untuk setiap gerbongnya. Ini dihitung pada normal load. Tetapi pada waktu tertentu seperti saat lebaran biasanya bisa lebih.

Dari segi keamanan tidak dibedakan dalam pembagian kelas yakni dengan menggunakan sistem kaca laminasi ganda yang tahan terhadap gangguan panas dan perlakuan fisik seperti lemparan batu orang iseng . Yang akan pecah terlebih dahulu adalah lapisan bagian luar sehingga memberikan kesempatan menghindar bagi penumpang. Selain itu hampir semua bahan-bahan di dalam gerbong dirancang tahan api.

Sedangkan keamanan lintasan, tampaknya kurang diperhatikan dalam pengembangan teknologi KA. Di Indonesia teknologi itu masih sangat terlambat, semua masih serba manual. *(baca Box: Navigasi*

FOTO: IRFAN

Eddy Haryoto
Dirut Perumka

Navigasi Lintasan:
Mengandalkan Manusia

Kloneng..kloneng..kloneng... *,Itu isyaratnya berbunyi, sebentar lagi keretanya lewat !.."* Bergegas Supardi (bukan nama sebenarnya) penjaga sebuah lintasan KA di Yogyakarta. mengambil sebuah tungkai besi dan berjalan menghampiri bel tempat bunyi berasal. Berada di sebuah bangunan seperti menara 3x3 meter persegi yang salah satu bagiannya bisa dimasukkan ujung tungkai besi tadi. Perlahan-lahan diputarnya sampai kira-kira empat kali.

Alat itu merupakan salah satu piranti penting di gerbang penyeberangan. Penggunaan sistem pegas membuatnya harus diputar kembali setelah bel berbunyi. Seandainya penjaga gerbang lupa memutar kembali, maka informasi penutupan gerbang selanjutnya tidak akan diterima.

Lima menit kemudian , dari arah Timur muncul lokomotif sebuah kereta. Jalannya agak lamban dan akhirnya berhenti. Menurut Supardi kereta tersebut belum mendapatkan tanda aman, seraya menunjuk sebuah tiang berbentuk huruf "F". "Kalau tangkai atasnya terangkat, berarti kereta sudah bisa lewat, tetapi kalau masih sejajar seperti itu, belum bisa".

Kini Supardi bersiap-siap di depan sebuah meja panel yang cukup modern. Dilengkapi beberapa piranti elektris seperti penggerak motor listrik yang akan menutup pintu secara penuh atau sebagian sampai menaikkannya kembali, dan tombol *rescue* untuk menghentikan gerakan pintu secara tiba-tiba. Dengan peralatan ini, Supardi membunyikan tanda perhatian sebelum menurunkan palang penutup jalan raya, sesaat sebelum kereta lewat.

Gerbang telah ditutup. Beberapa mobil dan motor patuh berhenti di depan palang .Tak lama kemudian kereta itu jalan lagi Dengan seksama Supardi mengikuti berlalunya rangkaian kereta kelas ekonomi delapan gerbong yang penuh sesak dengan penumpang.

Fasilitas pendukung seperti sinyal, rambu-rambu di samping rel, dan perangkat operasi di gerbang-gerbang penyeberangan sangat menentukan keselamatan perjalanan

Lintasan: Mengandalkan Manusia)

Di belahan bumi lain, bidang desain dan sistem produksi Institut Fraunhofer bekerja sama dengan Pintsch BAMAG dan Schaltbau Berlin, Jerman telah mengembangkan sistem pemantau khusus. Sistem ini berbentuk kamera yang dipasang di atas perlintasan kereta api dan selalu memantau keadaan di semua persimpangan setiap saat dengan piranti analisis citra dan gerak. Bila terdeteksi ada kendaraan yang melintas, maka geraknya diamati hingga melewati lintasan. Kalau kendaraan itu berhenti atau mogok di tengah perlintasan, maka sistem ini akan memicu bunyi tanda bahaya. "Sistem ini sudah teruji di Jerman dan dinyatakan lulus test", kata Dr. Bertram Nickolay dari Institut Fraunhofer.

Alih Teknologi menuju tahap III, pengembangan produk

Pada awalnya teknologi kereta api ditangani oleh Balai Yasa (bengkel kereta) di bawah PJKA, kemudian sejak 1981 INKA berdiri dari bekas Balai Yasa di daerah operasi VII Madiun dan mulai dengan tahap Perakitan "loko barang" bermodal berbagai lisensi asing, diantaranya Korea, Canada, Jepang dan Rumania sampai tahun 1984 dan dilanjutkan dengan pengadaan 126 buah kereta penumpang masih dengan cara lisensi, artinya seperti "tukang jahit", sudah ada metode, gambar dan kita tinggal melaksanakan. Tahap ini disebut Alih teknologi tahap I, sesuai *root map* yang dicanangkan Habibie.

Target yang ingin dicapai adalah kemampuan manufaktur mesin. Dalam hal lisensi, kita sangat bergantung kepada pihak luar negri, maka dimulailah alih teknologi tahap II, yaitu tahap Integrasi Teknologi. Pada tahap ini mulai ada modifikasi kereta-kereta kelas III dari tahun 1966. Kemudian diperpanjang umurnya (*midlife overhaul*) dengan mengganti bagian yang sudah tidak laik pakai serta merubah desain interior. Semua kemampuan yang diperoleh dari tahap I dikembangkan terutama peningkatan *local content* berbentuk material.

Mengenai masalah *Research and Development* (R&D) dijelaskan oleh Gunesti, bahwa saat ini Perumka hanya salah satu pelanggan INKA, karena INKA telah beberapa kali menang tender di luar negeri seperti dengan Malaysia dalam pengadaan gerbong container. Dan untuk tahap II sudah harus bertanggung jawab dari desain dasar sampai pada detailnya.

"Kami sedang menuju tahap III yakni pengembangan produk, dan konsepnya sudah dipresentasikan kepada pemerintah", kata Gunesti lagi. Ditambahkannya dengan pengalaman ekspor ke Malaysia R&D kita sudah mulai jalan, dimulai dengan kemampuan dalam pengujian, dan tahun '93 mulai membangun kereta baru untuk kelas I, walaupun desain dasar masih lisensi, tetapi detail desain sudah ditangani sendiri seperti *lay-out* kereta dan komponen, yang semula hanya dilakukan pada kereta kelas III, sampai pada peluncuran Argo Bromo I, merupakan hasil desain dan rekayasa dari kita sendiri. Untuk KRL, telah dilakukan RUK (riset unggulan kemitraan), yaitu dengan pembuatan bogie Indonesia meski perangkat rodanya masih lisensi. Setelah itu perancangan KRL Indonesia, walaupun pasarnya belum jelas.❐

FOTO: ISTIMEWA

Ir.Gunasti

Ibrahim Z. Fahmi
Iwan H, Irfan M

kereta api.

Sebelum kereta api berangkat, maka pusat kendali operasi di stasiun pemberangkatan akan mengirimkan sinyal ke stasiun-stasiun berikutnya secara sinambung sesuai jalur tempuh kereta. Ini untuk memastikan pada jalur yang sama dalam jarak tiga stasiun tidak digunakan kereta lain yang datang dari arah berlawanan. Untuk memudahkan kontrol jalur, kereta diberi angka genap dan ganjil. Kereta dari arah Timur menuju ke Barat berangka genap, dan ganjil jika sebaliknya. Kalau jalur sedang digunakan maka kereta yang lain harus mengalah dan menunggu di stasiun yang ditentukan.

Penting dan dominannya peran penjaga palang pintu seperti Supardi adalah bukti sangat bergantungnya operasionalisasi kereta api pada faktor manusia. Juga aktivitas keseharian di pusat kendali operasi sistem persinyalan setiap stasiun semuanya dikontrol oleh manusia. Dari penerimaan sinyal stasiun lain, penentuan aman tidaknya jalur, pemberangkatan kereta, sampai pengiriman sinyal dan pesan tertentu ke pos-pos perlintasan jalan raya.

Pengiriman sinyal ada yang secara mekanis lewat jaringan perkawatan, dan ada pula secara elektrik yang bisa dikatakan lebih modern. Dalam sistem elektrik, sinyal-sinyal ditangkap dalam bentuk warna. Misalnya warna putih untuk keadaaan aman.

Kinerja alat-alat ini akan berjalan baik apabila petugasnya tetap dalam keadaan jaga dan tidak lengah. Kelancaran komunikasi dan informasi perjalanan kereta sangat bergantung pada mereka. Meski demikian, sebuah sistem persinyalan tidak dapat menjangkau sebuah kereta api yang sedang berjalan. Apalagi dalam keadaan-keadaan darurat seperti matinya sistem yang otomatis memerlukan penyediaan jalur darurat. Hal ini berbeda dengan di Jepang yang telah menggunakan sistem kontrol terpusat, CTC (*Centralized Traffic Control*) sejak tahun 1960.

Selama rambu-rambu terbaca aman oleh masinis, kereta api akan dapat berjalan bebas tanpa hambatan. Tetapi sekali sistem persinyalan mengalami kerusakan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Antisipasi dengan sistem komunikasi handy tranceiver (HT) yang selama ini hanya ada di jalur Jabotabek belum dimungkinkan. Komunikasi antara kereta yang sedang berjalan dengan stasiun-stasiun, dan pos-pos di gerbang penyeberangan.❐

Ibrahim Z. Fahmi

Tak Ada Promosi Menjadi Tukang

Dua ember penuh labur itu diangkatnya. Sepintas orang pasti tidak bisa membedakan, laki atau perempuankah kuli bangunan itu, karena mukanya nyaris tertutup kain kaos. Namun begitu didekati nampak garis kewanitaan.

BAMBANG

Buruh perempuan di proyek perumahan Daripada *ngiles*

Ya, Amat kuli bangunan itu adalah seorang wanita, pekerjaan berat melayani *labur* (adonan semen dan pasir, red) tukang, profesi yang sebenarnya tidak lazim dikerjakan oleh wanita. "Apa yang saya lakukan tak ada artinya dengan apa yang dilakukan suami," ujarnya merendah.

Inilah gambaran lain kehidupan perempuan buruh bangunan. Pekerjaan yang dianggap sebagian orang tidak lazim, ekploitatif bahkan tidak manusiawi. Pekerjaan berat yang membutuhkan stamina prima dan menguras tenaga. Tetapi Amat, agaknya tidak terlalu mempersolkannya.

"Daripada nganggur di rumah dan jadi stress, saya milih kerja di bangunan," demikian Waginem (40), mengawali cerita seputar dunia kerjanya. Proyek besar yang pernah diikutinya, antara lain pembangunan gedung auditorium UGM dan kompleks pasar Beringharjo. Ajakan suaminya, juga seorang buruh bangunan, sekitar 10 tahun yang lalu, merupakan awal perkenalannya dengan profesi ini. Terakhir sekitar dua tahun yang lalu, upahnya mencapai Rp 30.000/minggu. Sepuluh kilometer adalah jarak rata-rata dari rumah ke tempat kerjanya, yang selalu ditempuh dengan bersepeda.

Kalau bagi Waginem, suami yang berperan sebagai "pembuka jalan", bagi Marsinah (50), Amat dan Kasilah (50) kebaikan hati tetangga, seorang mandor, yang membuka kemungkinan untuk bergabung di dunia buruh bangunan.

Dorongan ekonomi menjadi alasan utama mereka masuk ke dunia kerja publik. Pendapatan dari menjadi buruh tani di desanya, tidak dapat menutup biaya hidup setiap harinya, karena sifat pendapatannya yang musiman. Hanya di musim tanam dan musim panen, yang berarti sekitar 4-6 bulan sekali. Itupun berupa gabah yang belum tentu dapat segera diuangkan. Padahal, banyak kebutuhan lain yang tidak bisa dibayar dengan gabah, seperti biaya listrik, bayaran sekolah anak dan beberapa bahan pokok. "Kalau kerja di proyek, tidak usah *ngiles* (memisahkan bulir padi dari batangnya dengan cara diinjak-injak, red) tapi dapat duit, kalau di sawah bisa punya simpanan gabah tapi tidak dapat duit," tegas Marsinah.

Sebagai bagian dari suatu sistem sosial, masuknya mereka ke dunia kerja bangunan, bukannya tanpa sejarah. Seperti pernah ditulis Indrasari Tjandraningsih, dalam buku *Sangkan Paran Gender* (1997), disebutkan bahwa ketika ada pembagian kerja Internasional baru (NIDL- *New International Division of Labour*), maka terjadi gelombang relokasi industri padat karya dari luar ke negara kita. Pada tingkat negara, pembagian kerja internasional baru tersebut, diterjemahkan dalam kebijakan industrialisasi yang menekankan pada penanaman modal asing maupun dalam negeri. Kebijakan yang menjadi tonggak arah industrialisasi sekaligus restrukturisasi ekonomi Indonesia adalah peralihan orientasi industri dari subtitusi impor ke ekspor. Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka memfasilitasi kedatangan modal adalah menyediakan lahan untuk pembangunan pabrik beserta mata rantainya, yaitu fasilitas-fasilitas yang memudahkan proses industrialisasi tersebut, seperti jalan, perumahan dan pertokoan.

Dampak langsung yang timbul kemudian adalah terjadinya proses alih guna lahan pertanian di daerah pedesaan dan pembukaan daerah baru untuk keperluan industri. Bersamaan dengan proses tersebut terjadi transformasi sosial yang melanda desa. Muncullah kelompok petani tanpa tanah, yang terpaksa memalingkan usaha menjadi pelaku sektor industri, jasa dan perdagangan dalam skala marginal.

Latar belakang pendidikan keempat perempuan itu sangat rendah, tiga dari mereka hanya mengenyam pendidikan dasar kecuali Amat yang sempat menggenggam ijazah SMEA, tidak memungkinkan mereka masuk dalam sektor-sektor pabrikan apalagi kantoran. "Kebodohan" mereka di

mata pemilik modal dianggap penghambat kelancaran dan kemudahan proses produksi.

Namun keras dan ketatnya kehidupan masyarakat industri tidak mampu mengalahkan keuletan perempuan-perempuan ini. Dalam ruang-ruang sempit yang disisakan mereka bertahan. Ketika kekuatan fisik adalah satu-satunya modal yang dipertaruhkan, maka kerja kasar adalah satu-satunya pilihan, menjadi Buruh bangunan. Di antara level-level jabatan dalam dunia buruh bangunan, posisi *laden tukang* adalah level jabatan paling dimungkinkan untuk kaum perempuan. Pengetahuan dan ketrampilan kontruksi nyaris tidak diperlukan. Selain kekuatan fisik untuk melayani (Jawa: *laden)* para tukang, satu level jabatan setingkat di atas mereka. Membuat "*labur*"-sebutan untuk adonan perekat batu bata, mengantarkannya, mengantar batu bata dan melempar genting, adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa mereka lakukan.

Namun demikian, tidak semua laden tukang perempuan mampu dan bersedia melakukan pekerjaan yang sama. Waginem, misalnya, dia berani merekatkan batu bata dan memanjat tangga non permanen yang dibuat dari bambu untuk mengantarkan labur. Sementara Amat, enggan melakukannya. "Saya malu kalau harus memanjat-manjat. Tidak perlu *ngoyo*, kalau sudah rezekinya pasti datang sendiri. Dikejar-kejar kalau belum rezekinya belum tentu segera datang," jelas ibu seorang anak berusia 14 tahun ini.

Perbedaan ini menjadi salah satu penyebab pembedaan upah antara buruh bangunan laki-laki dan perempuan atau antar buruh perempuan itu sendiri. " Bayarannya memang dibedakan, karena yang laki-laki memecah batu, menggali dan memanjat" jelas Amat, ketika ditemui *Balairung* di rumahnya. Hal serupa ditegaskan oleh Marsinah. Menurutnya pembedaan ini sudah sewajarnya terjadi.

Di mata Nunuk P Murniati, Koordinator GAKTPI (Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia) Yogyakarta, pembedaan upah berdasarkan perbedaan volume kerja memang dapat dipahami. Menjadi tidak wajar ketika perbedaan volume kerja ini ditetapkan atas dasar perbedaan jenis kelamin, tanpa ada kesempatan yang sama untuk mencoba jenis pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan. "Belum tentu semua perempuan tidak cukup kuat untuk memecah batu," tegasnya.

Dalam sektor kerja yang mengandalkan kekuatan fisik tidak selamanya produktivitas perempuan menjadi rendah. Ada bagian-bagian tertentu dalam kerja bangunan, dimana sifat-sifat, yang diyakini oleh umum dimiliki peremuan secara alamiah, seperti ketelatenan dan kerapian, dalam batas-batas tertentu dapat dilihat sebagai suatu keunggulan dimata mandor maupun di mata buruh bangunan laki-laki. Hal itulah yang menjadi alasan Suwarto (37), mandor bangunan untuk memprioritaskan buruh perempuan bila proyek pembangunan mencapai bagian penataan dan pembersihan. Seperti misalnya saat pemasangan keramik untuk lantai dan pembersihan bangunan hingga siap pakai. "Semuanya tergantung posnya, di pos penataan, perempuan biasanya lebih telaten dan rapi. Kalau di pos kasar, paling mereka hanya kuat mengangkat dua ember labur. Kalau memaksa mengerjakan lebih dari itu, rasanya *ndak* sampai hati," papar Suwarto lebih lanjut.

BAMBANG P.

Keunggulan buruh perempuan dalam ketelatenan dan kerapian, bukan saja diakui oleh para mandor. Tukang laki-laki pun relatif lebih senang bila laden tukangnya seorang perempuan. Seperti dituturkan Daliman (50), suami Waginem. "Laden tukang perempuan itu, tidak pernah berhenti mengantarkan labur. Kalau buruh laki-laki, kadangkala sampai tukangnya teriak-teriak minta labur, malah ditinggal *ngrokok*," jelasnya.

Ketelitian, kerapian, kesabaran, sifat-sifat yang berhubungan erat dengan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan membersihkan rumah. Seolah sudah menjadi nafas bagi perempuan-perempuan ini. Sehingga ketika memasuki sektor-sektor publik, bidang-bidang yang merupakan kepanjangan tangan pekerjaan domestik, yang lebih banyak memerlukan keahlian manual, akan menjadi tawaran terbaik bagi mereka. Demikianlah Ken Suratiyah, yang staf pengajar Fakultas Pertanian UGM menuliskan hal tersebut dalam buku S*angkan Paran Gender*, yang merupakan buku kumpulan tulisan.

Dalam dunia buruh bangunan misalnya, tidak akan ada seorang perempuan yang dipromosikan untuk menjadi tukang, walaupun pengalamannya dalam laden tukang sudah bertahun-tahun. Kehadiran mereka dalam sektor ini, hanya dilihat sebagai tambahan, yang kehadirannya semata-mata bergantung pada kebaikan hati orang lain. Entah mandor, tetangga atau suami mereka.Di sinilah, menurut Dewi Ratnawulan, staf LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak), ketidakadilan terhadap buruh perempuan semakin tampak. " Karena, profesi buruh bangunan itu ada pada sektor publik,

maka perempuan dipandang tidak pada tempatnya disitu. Status buruh perempuan otomatis menjadi di bawah buruh laki-laki. Tetapi sebaliknya, bila laki-laki mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik dalam sektor publik, seperti pekerja salon atau koki, upah mereka akan relatif lebih besar daripada upah pekerja perempuan. Hal ini bersumber pada adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sementara perempuan sekedar pencari nafkah tambahan" paparnya.

Padahal bila dilihat dari sumbangan mereka bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, apa yang mereka lakukan tidak bisa dilihat sekedar sebagai tambahan. Waginem misalnya, dari upahnya menjadi laden tukang, dia dapat menyisihkan sekitar Rp 20.000 setiap bulannya. Dan dari hasil tabungannya ditambah pendapatan suaminya mereka dapat sedikit demi sedikit membangun rumah. Apalagi bagi Kasilah yang sudah janda. Upahnya sebesar Rp 5000-Rp 6000/ hari itu, menjadi satu-satunya sumber pembiayaan hidupnya bersama dua orang anak yang masih sekolah di SMP dan SMA. Sayangnya, ketidakadilan ini justru dilanggengkan negara melalui aturan-aturan formal. " Aturan perpajakan misalnya, selalu menganggap perempuan berstatus lajang. Sehingga, perempuan akan membayar pajak penghasilan lebih tinggi daripada laki-laki, karena laki-laki dihitung sebagai penanggung kebutuhan anak dan istri. Jadi, upah yang dibawa pulang buruh perempuan relatif selalu lebih kecil!" jelas Dewi Ratnawulan.

Sumbangan mereka betul-betul tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tambahan bila bayaran yang harus mereka keluarkan atas kerja-kerja domestik juga diperhitungkan. Seperti Marsinah misalnya, supaya dapat berangkat bekerja tepat pukul 06.30, maka dia harus bangun lebih pagi untuk mencuci pakaian dan memasak. Demikian pula halnya dengan Amat. Untunglah, ibunya ikut tinggal bersamanya, sehingga tugas pengasuhan anak untuk sementara dapat digantikan. Bagi Amat, keikutsertaannya menanggung beban ekonomi keluarga, tidak dapat menjadi alasan baginya untuk meminta suami berbagi peran dalam kerja-kerja domestik. "Kasihan suami, bila harus ikut *cawe-cawe*, toh apa yang saya dapat dari laden tukang itu ibaratnya cuma garam, sementara apa yang didapat suami saya itu nasinya," tuturnya datar.

Demikianlah, dalam sebuah ilustrasi di majalah *Basis* edisi nomor 07-08, Oktober 1996 menyebutkan bahwa, dalam masyarakat patriarki penghargaan terhadap pekerjaan perempuan di dalam rumah memang tidak banyak diberikan. Namun dengan ketekunan dan kesetiaannya dalam menjalankan tugas itu, para perempuan sebenarnya banyak meringankan beban kaum lelaki. Di sini, menurut Dewi Ratnawulan, perempuan dapat mengalami kekerasan non fisik. "Pertama, perempuan terkena beban berlebihan atas kerja publik dan domestik, kedua terkena steriotype, bahwa kerja-kerja domestik itu hanya menjadi tugas perempuan dan ketiga, terkena marginalisasi di tempat kerjanya, yaitu ketika perempuan ditempatkan hanya pada kerja-kerja rendahan tanpa ada proses tawar menawar!"

Konsep bekerja sebagai sarana mengekspresikan diri dan mencari kepuasan batin gugur dengan sendirinya di hadapan mereka.Di dalam buku *Sangkan Paran Gender* juga, Susi Eja Yuarsi, mengungkapkan bahwa di kalangan wanita kelas bawah, peran ganda bukan suatu hal yang baru. Sejak dulu mereka sudah terbiasa bekerja sambil tetap mengasuh anak dan sejauh ini mereka menganggap tidak ada masalah. Punya suami ataupun tidak, mereka tetap dituntut bekerja guna mencukupi kebutuhan. Pada situasi semacam inilah wanita disudutkan pada kondisi yang sulit. Karena bekerja bagi mereka adalah keharusan, maka seringkali mereka terpaksa menerima pekerjaan tanpa pertimbangan yang matang, apapun jenis pekerjaan itu. Keadaan yang menyebabkan *bargaining power* wanita menjadi lemah. Mereka terpaksa menerima jenis pekerjaan yang sebetulnya kurang disukai bahkan kurang sesuai dengan "kodratnya". Maka, menurut Dewi Ratnawulan, sasaran perubahan dimulai dari pengusahanya, dalam hal ini kontraktor. "Misalnya, syarat-syarat keikutsertaan mereka dalam tender diperketat. Mereka harus memasukkan

Nunuk P. Murniati
Pembedaan volume kerja bisa dipahami

pengaturan-pengaturan tentang buruhnya. Apabila, aturan-aturan ini dinilai merugikan buruh, pengusaha dapat dikenai sanksi-sanksi tertentu, seperti dicabutnya ijin usaha" paparnya. Tetapi, bukan berarti penyadaran buruh yang bersangkutan menjadi tidak penting. Menurut Dewi Ratnawulan, pendidikan buruh harus dilakukan, bukan saja untuk menyadarkan akan hak-haknya sebagai buruh, tetapi juga hak-haknya sebagai perempuan atau hak-haknya sebagai laki-laki dan bagaimana mereka harus berelasi. Tantangan terbesar, dalam proses pendidikan buruh ini adalah merubah kesadaran magis mereka, yang melahirkan sikap nrimo dan pasrah.

Namun demikian, dimata mereka selalu saja ada celah-celah kebahagiaan atas banyaknya ketimpangan itu. Seperti yang dituturkan Waginem, "Bertemu banyak orang, dari berbagai daerah, guyonan dengan mereka dapat menghilangkan stress! Malah kalau tidak bekerja beberapa hari saja, badan rasanya pegel-pegel," tuturnya ringan.

Oleh sebab itu, selalu saja ada semangat di setiap pagi untuk mengayuh sepeda berpuluh kilo meter. Mencari ruang di sela-sela jalanan yang semakin garang.❐

Monica Eviandaru

TELEPON UMUM, antara Obsesi dan Vandalisme

TELEPON umum kehadirannya dirasakan semakin dekat dengan masyarakat mulai dari pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai kepada kalangan usaha, sering kita lihat menggunakan fasilitas ini. Maklum, fasilitas yang satu ini tak hanya sangat ampuh untuk berkomunikasi dengan mitra, sahabat, atau kerabat. Namun dalam keadaan darurat juga bisa berperan sebagai "dewa penolong".

Untuk itulah mengapa TELKOM berupaya terus menyediakan fasilitas yang sangat penting ini. Tak hanya dalam upaya mewujudkan obsesi TELKOM untuk memperluas jaringan komunikasi seperti yang diharapkan pemerintah. Namun juga fasilitas ini begitu menyentuh kalangan masyarakat bawah. Sehingga pemerataan untuk turut menikmati hasil-hasil pembangunan telekomunikasi semakin nyata.

Namun sayang, misi mulia TELKOM itu seringkali kurang mendapat response yang pantas. Katakanlah dari segi cara penggunaan dan pemakaiannya yang masih belum sesuai dengan harapan. Masyarakat pemakai jasa ini, seringkali harus kecewa manakala telepon umum tak dapat digunakan. Kekecewaan semakin bertambah ketika ada pesan penting yang harus segera disampaikan menjadi tersumbat.

Menurut data dan pengalaman TELKOM sekitar 85% kerusakan telepon umum terjadi sebagai akibat tangan-tangan jahil. Menyedihkan memang. Para ujung tombak pelayanan telepon umum seringkali harus kecewa, manakala ada telepon umum yang baru saja diperbaiki, setengah jam kemudian rusak lagi. Setelah diperiksa kembali, di dalam pesawat ternyata terdapat alat pencongkel atau pengganjal agar koin tidak lepas ke dalam boxnya. Ini salah satu modus pencurian koin.

Perusakan terhadap telepon umum, sebagaimana yang terjadi pada fasilitas umum lainnya, memang tak luput dari upaya perusakan. Kejahatan (vandalisme) dalam perusakan fasilitas umum itu rupanya telah merebak ke mana-mana di pelbagai kota. Padahal seperti tujuan semula bahwa keberadaan telepon umum itu mempunyai misi yang sangat mulia, yakni untuk memberikan pelayanan terdepan masyarakat dalam berkomunikasi.

Seperti dimaklumi timbulnya perusakan-perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum itu membawa dampak serius. Dan tentu bisa membawa kerugian yang sangat besar. Namun kerugian terbesar sesungguhnya bukanlah pada penyedia jasa (TELKOM). Kerugian lebih banyak dirasakan masyarakat.

Kita menyadari betapa banyak musibah yang dialami manusia sebagai akibat tidak berfungsinya telepon umum. Kebakaran bisa semakin besar dan meluas akibat terlambatnya menghubungi pemadam kebakaran. Seseorang yang sakit keras bisa tak tertolong lagi karena terlambat menghubungi dokter. Bahkan seringkali kecelakaan-kecelakaan bertambah fatal sebagai akibat tidak bisa dihubunginya polisi, ambulance, dan lain sebagainya.

Dengan macetnya fasilitas komunikasi, seperti umum, ternyata bisa membawa malapetaka mengenaskan. Namun sisi kesadaran masyarakat untuk turut memelihara dan menjaganya memang masih memprihatinkan. Dalam kondisi seperti ini memang sudah sepatutmya semua pihak terpanggil kembali untuk semakin menyadari terhadap fungsi dan peranan telepon umum sebagai sarana untuk berkomunikasi bagi masyarakat. Karena sejak semula TELKOM menyediakan telepon umum dengan maksud untuk memudahkan kelancaran masyarakat dalam berkomunikasi.

Padahal perlakuan TELKOM terhadap telepon umum, hingga saat ini tetap dikategorikan sebagai VIP. Apabila terjadi kerusakan maka upaya perbaikan segera dilakukan. Namun sebagai akibat banyaknya Telepon Umum (TU) yang harus diperbaiki, TELKOM adakalanya kewalahan untuk menanganinya. Sehingga harus dilakukan giliran dalam perbaikannya disesuaikan dengan kemampuan tenaga operasional yang ada.

Kerugian per tahun TELKOM akibat kerusakan TU memang sulit untuk dilakukan perhitungan secara real. Kerugian lebih tertuju kepada sisi perbaikan dan pemeliharaan. Oleh karena itu jika dihitung dalam rupiah, sebenarnya tidak terlalu berarti, dibanding dengan kerugian sesungguhnya yang dialami masyarakat sebagai akibat tidak bisa melakukan komunikasi.

Menurut hasil penelitian dan laporan dari berbagai daerah di Indonesia, kelompok-kelompok yang potensial untuk melakukan perusakan atau pencurian koin dan penggandaan kartu telepon palsu adalah kalangan remaja dan pemuda. Termasuk di dalamnya kelompok pelajar dan mahasiswa dengan berbagai modus operandinya masing-masing.

Ada yang melakukan perusakan TU itu untuk mencuri coin dalam box TUC; Ada yang karena iseng untuk menunjukkan superioritas dirinya dengan cara mencorat-coret atau mengambil gagangnya; Ada yang karena meluapkan kejengkelan terhadap gangguan yang terjadi pada TU dengan cara memukul-mukul. Ada pula yang menggunakan kartu telepon palsu, sehingga merusak program dalam pesawat. Serta cara-cara lain yang mengakibatkan terjadinya gangguan.

TELKOM sesungguhnya cukup keras dalam memberlakukan aturan hukum bagi perusak fasilitas umum itu. Bahkan seringkali menangkap basah para pelaku perusakan kemudian diserahkan langsung ke pihak yang berwajib(aparat kepolisian) untuk dilakukan proses selanjutnya. Katakanlah beberapa kasus yang masuk pengadilan seperti terjadi di Ujungpandang. Manado, Medan, Bandung, Semarang, dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Menurut ketentuan hukum dalam UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, disebutkan bagi anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perusakan fasilitas telekomunikasi atau upaya-upaya yang dapat mengakibatkan terganggunya telekomunikasi maka akan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 40 juta atau hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Beratnya tindakan hukuman yang diberlakukan itu, sering kami sosialisasikan melalui media massa serta sticker pada pesawat TU. Namun rupanya masyarakat masih juga belum menyadari kerasnya tindakan hukum tersebut. Karena itulah TELKOM senantiasa berupaya untuk memberikan pengertian melalui berbagai media serta pendekatan langsung ke pelbagai golongan masyarakat yang potensial melakukan perusakan.

Beberapa upaya TELKOM dalam mengantisipasi dan menekan terjadinya vandalisme-karena masalah ini tidak mungkin dihilangkan-antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melalui upaya "Customer Education", yakni suatu upaya pemberian pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda dengan cara mengundang kalangan pelajar dan mahasiswa untuk diberikan ceramah; Dilakukan pula kerjasama dengan media massa untuk mengekspose berita-berita seputar cara penggunaan telepon yang baik.
- Kerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan proses kepada anggota masyarakat yang diketahui telah melakukan perusakan dan menimbulkan gangguan-gangguan di bidang telekomunikasi. Bahkan dilakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui OSIS guna penanaman kecintaan terhadap fsilitas umum, khususnya telepon umum.
- Telah pula dilakukan penilaian dalam bentuk lomba kebersihan telepon umum antar kecamatan atau kelurahan dengan hadiah-hadiah menarik.
- Demikian halnya kebijakan manajemen untuk memberikan hadiah/ bonus khusus serta penghargaan kepada anggota masyarakat yang berhasil menangkap basah pelaku perusakan telepon umum atau pencurian coin dalam pesawat;
- Adapun kebijakan manajemen yang ditujukan kepada seluruh jajaran TELKOM untuk memiliki kepekaan dalam membantu memelihara keberadaan telepon umum di sekitar rumahnya. Bahkan ditekankan kepada jajaran TELKOM dan anggota keluarganya untuk melakukan pengecekan terhadap telepon umum yang sempat ditemuinya segera melaporkan ke 117 apabila terjadi kerusakan.

TELKOM mengimbau masyarakat pengguna fasilitas telepon umum untuk turut menjaga, memelihara dan mencintai telepon umum. Karena ia milik kita bersama dan "Memang untuk Anda".***

Dari yang di Anggap Remeh:
Sampah

DOK. BALAIRUNG

Jika tidak dikelola akan menjadi masalah

Amerika menyesal. Lingkungannya hancur karena terlambat sadar bahwa sampah akan jadi masalah besar. Orang Amerika kini jadi begitu sensitif terhadap sampah, tak mau lagi mereka menerima kemasan plastik bila berbelanja. Untuk Indonesia, perlukah seperti Amerika: sadar setelah semua terlambat.

"Buanglah sampah pada tempatnya." Demikian slogan yang amat sering kita jumpai pada bak-bak sampah atau beberapa dinding ruangan di salah satu gedung atau instansi dan beberapa tempat lainnya. Namun, sudahkah kita menyadari makna dari kalimat yang ringan itu?

Kebanyakan orang barangkali kurang memperhatikan slogan-slogan seperti itu. Perhatian mereka agaknya lebih tertarik pada grafiti seputar politik, seperti "Turunkan Soeharto", "Adili Soeharto beserta Kroninya", "Cabut Dwifungsi ABRI", dan lain-lain.

Grafiti-grafiti bernuansa politik itu memang penting, namun persoalan "kecil" di depan mata, seperti pengelolaan sampah juga tak bisa dianggap remeh.

Ilustrasi di atas diam-diam mengabstraksikan kondisi riil di mana perhatian masyarakat pada persoalan lingkungan masih minim. Hal itu boleh jadi karena persoalan lingkungan belum dipahami sebagai persoalan mereka. Pengelolaan sampah, misalnya. Masyarakat baru akan merasa terganggu jika sampah sudah mulai menumpuk di sekitar tempat tinggalnya.

Jika menoleh pada pengalaman Amerika, lingkungan mereka telah lama mengalami destruksi akibat kurangnya kendali atas polusi. Kini mereka begitu menyadari apa artinya kelestarian bumi. Dan itu kemudian mengimbas pada perilaku mereka. Sebuah kesadaran yang terlambat.

Pengelolaan Sampah

Persoalan sampah bukan masalah baru. Namun diskusi tentang pengelolaannya selalu terpinggirkan. Pada jaman dulu ketika belum ada sampah produk teknologi seperti plastik, lingkungan masih tertolong oleh kemampuan alam untuk mencerai-beraikan sampah menjadi pertikel-partikel bagian. Kemampuan alam untuk itu lebih besar daripada daya tahan komponen sampah itu sendiri.

Kondisi itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Makin besarnya angka populasi manusia di bumi, dan faktor teknologi memberi kontribusi besar bagi akumulasi sampah. Berbagai jenis sampah itu menumpuk dan alam memang "kewalahan" untuk menetralkannya.

Untuk mengetahui bagaimana sampah harus dikelola, perlu juga diketahui jenis-jenis sampah. Secara sederhana, sampah terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Kaleng bekas, plastik, dan kertas bekas adalah beberapa contoh untuk menunjuk limbah padat. Sedangkan limbah cair di antaranya berupa air bekas cucian, serta zat-zat kimia dalam bentuk cair yang digunakan dalam proses produksi pada industri-industri bahan makanan atau tekstil.

Bahan-bahan ini bisa menjadi

pencemar jika tak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya, plastik atau bahan-bahan polyetilin. Bahkan, sampah yang sifat kimianya reaktif bisa menjadi pencemar yang sangat berbahaya jika dibuang tanpa proses dekomposisi terlebih dahulu.

Sampah dalam bentuk padat atau cair, kimiawi maupun organik, bila terakumulasi dapat mengakibatkan hal-hal yang berbahaya.

Simak saja hasil penelitian Studi Kebutuhan Nyata (RDS) yang dilakukan pada tahun 1990. Setiap orang diperkirakan menghasilkan 3,15 liter sampah setiap harinya. Jika kita lakukan hitungan secara kasar, masyarakat kota Yogya menghasilkan sampah sebesar 2.988 m3/hari atau setara dengan 650 truk/hari.

Dari jumlah sampah sebesar itu, pemerintah daerah hanya mampu menanganinya sekitar 46%-nya saja. Sisanya, diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya sendiri. Dan asal tahu saja, hanya 5% saja sampah yang bisa didaur ulang.

Sampah yang berada di tangan masyarakat mendapat perlakuan yang berbeda-beda menurut kemampuan masyarakat itu sendiri. Di Kelurahan Minomartani Yogya, setiap hari penduduk mengolah sampah itu menjadi kompos. Dengan begitu, kuantitas sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dapat ditekan.

Tetapi bagaimana dengan sampah yang berada di tangan penduduk yang tak mampu ataupun tak punya kemauan untuk mengolah sampah mereka? Sampah-sampah itu umumnya ditangani dengan cara pembakaran, penimbunan, atau dibuang ke sungai.

ISTIMEWA

Suharko, S.Sos.

Namun demikian, rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat seperti ini tak bisa disalahkan begitu saja. Banyak faktor lain yang berperan di dalamnya. Faktor pendidikan, ekonomi, dan struktur sosial punya andil di dalamnya. Hal ini diakui Suharko, staf pakar sosiologi lingkungan.

"Masalah-masalah lingkungan itu sulit diterima begitu saja oleh masyarakat kita. Kita mengatakan suatu sungai tercemar. Jika sungai X tercemar, maka dibutuhkan penelitian-penelitian atau proses secara ilmiah untuk membuktikannya. Oleh karena itu butuh pengetahuan ilmiah. Namun, tidak setiap orang tahu. Nah, di situ rumitnya," ujar staf pengajar Sosiologi UGM ini.

BEM F.GEOGRAFI

Prof. Dr. Sudarmadji, M. Eng. Sc.

"Sekarang penggunaan pupuk kimiawi diprotes. Karena pupuk tersebut punya dampak yang besar bagi para petani. Kebanyakan para petani itu *'kan* wanita. Jadi bisa menyebabkan kemandulan atau mungkin keguguran. Tapi yang bisa menjelaskan hal ini *'kan* para ilmuwan, para aktivis. Para petani itu tak pernah tahu," tambah Suharko.

Menurut Suharko, orang yang punya kesadaran lingkungan biasanya berstrata menengah ke atas. Namun hal ini tak cuma menunjuk pada tingkat pendidikan atau ekonomi belaka, tapi juga memiliki artian yang lebih luas.

Agak berbeda dengan Suharko, Sudarmadji melihat kesadaran lingkungan ini sebenarnya bersifat emosional. Artinya, amat tergantung pada kemauan hati seseorang. "Sebenarnya, siapa yang buang kulit kacang dari jendela mobil, misalnya mobil mercedes? Apakah mereka berpendidikan rendah? Apakah mereka juga termasuk orang-orang berperekonomian rendah?" tanya dosen Geografi UGM.

Namun Kamto, *manager outside treatment* Yayasan Dian Desa, punya anggapan lain. Masyarakat sebenarnya sudah memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penanganan sampah oleh masyarakat di beberapa permukiman, seperti di Kelurahan Minomartani. Tetapi diakuinya, kalangan tertentu masih saja melakukannya. Dalam hal ini, ia menunjuk kalangan bawah.

Hampir senada Nur Hidayati, Koordinator Pengendalian Limbah Industri WALHI, mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya cukup tanggap dengan kondisi lingkungan. "Mereka selalu mendukung program-program tersebut. Masyarakat sendiri sebenarnya tahu kalau limbah yang mencemari sungai itu mengakibatkan gatal-gatal, ikannya mati dan lainnya. Tetapi masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana jika mereka menemui pencemaran itu. Bisa juga hal ini diakibatkan pengetahuan masyarakat yang lemah," paparnya.

Sampah di Yogya

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah khususnya DIY, melakukan pemusatan pembuangan dan pengolahan limbah. Untuk limbah padat dipusatkan di Piyungan, sedang untuk limbah cair di Sewon. Keduanya terletak di Kabupaten Bantul.

Sebelumnya, untuk pembuangan limbah padat tersebar di tiga lokasi, yaitu TPA Kricak, TPA Tambak Boyo dan TPA Piyungan. Saat ini ketiga TPA itu dijadikan pusat pengolahan limbah di seluruh Yogya.

Selama ini, pola penanganan sampah oleh pemerintah, antara lain membangun tempat pembuangan sampah sementara, membangun transfer depo, model kontainer, model penanganan pintu ke pintu, serta model jemput bola. Namun kemampuan pemerintah dengan cara-cara di atas masih sangat terbatas.

Sedangkan untuk limbah cair, Pemda DIY telah mengusahakan pemusatan pengolahan limbah cair di Sewon. Limbah cair yang masuk ke tempat itu berasal dari limbah-limbah domestik yang terjangkau oleh sistem perpipaan, yaitu daerah-daerah permukiman yang berada di pinggir jalan protokol. Selebihnya, tergantung

pada penduduk sendiri.

Karena kemampuan pemerintah masih terbatas, maka masyarakatlah sebenarnya yang memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah. Tetapi karena pemahaman masyarakat atas masalah lingkungan masih minim, maka sampah tetap menjadi masalah. Misalnya, pencemaran sungai di Kali Code. Pembuangan sampah organik yang berlebihan di sungai itu telah meningkatkan jumlah bakteri *Eschericia coli* yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Hasil penelitian PPLH UGM (1991) menyebutkan, pencemaran tinja di Kali Code bagian tepi barat, sampel penelitian pada bagian hilir berjumlah 69.750 meter kubik pada musim kemarau. Rata-rata pada waktu pagi jumlah bakteri *Eschericia coli group* lebih banyak daripada waktu sore.

Jumlah bakteri *coli group* meningkat dari hulu ke hilir, baik waktu pagi maupun sore. Hal ini tak lepas dari topografi (kemiringan lereng) Yogya yang miring ke arah selatan. Akibat "pencucian" (*leaching*) yang terjadi di daerah utara, limbah terakumulasi di bagian selatan.

Namun, hal ini mungkin tidak disadari oleh masyarakat sekitar.

Demikian pula halnya dengan hasil penelitian Yayasan Dian Desa (1994). Dalam laporannya disebutkan, sebagian besar penduduk Yogya masih membuang hajatnya ke wc umum atau tempat-tempat yang bukan wc, seperti sungai, selokan maupun tempat kosong di belakang rumah. Jumlah mereka berkisar 159.525 orang atau 31.905 keluarga (21,27%).

Masalah yang mereka hadapi cukup variatif. Mulai dari sempitnya lahan, mahalnya biaya pembuatan wc, faktor kebiasaan, sampai soal kepemilikan rumah. Keluarga Pak Mardi, misalnya. Penduduk yang bermukim di sebelah selatan jembatan Sardjito itu mengatakan, sempitnya lahan dan mahalnya biaya pembuatan wc menyebabkan penduduk membuat "belik" bersama untuk buang hajat. "Mau *gimana* lagi, Mas," ucap Pak Mardi, penduduk asal Wonosari itu kepada Balairung.

Untuk menangani soal ini, Yayasan Dian Desa (YDD) telah berupaya mendorong masyarakat untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri secara komunal di tempat-tempat yang tidak terlayani oleh fasilitas makro yang dibuat oleh pemerintah.

Instalansi yang dibuat secara komunal ini bisa dipakai oleh 40 sampai 100 kepala keluarga. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat IPAL ini sekitar 24 juta rupiah. "Karena kemampuan masyarakat yang berbeda untuk mencicil biayanya, maka YDD membuat semacam *balance* kepada mereka," ungkap Kamto. Salah satu contoh pembuatan instalasi ini terdapat di Wirogunan.

Kendala yang dihadapi untuk membuat IPAL adalah terbatasnya lahan di daerah perkotaan. Padahal lahan yang dibutuhkan untuk membuat IPAL sekurang-kurangnya berukuran 6 x 7 meter.

Inkonsistensi Pembuat Kebijakan

Masalah sampah yang sulit dipecahkan ini bisa menjadi salah satu indikasi masih rendahnya kesadaran lingkungan di masyarakat. "Alur logikanya tidak mudah disadari oleh setiap orang. Misalnya, Pak kalau buang sampah di sini nanti akan kena penyakit. Gimana menjelaskan hal ini, karena dia sendiri tidak pernah sakit," jelas Suharko.

"Kalau orang sadar betul bahwa limbah rumah tangga dapat mengakibatkan tercemarnya sungai yang digunakan banyak orang, atau limbah itu juga membunuh ikan-ikannya, maka dia mungkin akan menyadarinya," sambung Suharko.

Menurut Suharko dan Sudarmadji, penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu dipertanyakan kualitasnya. Hal senada juga dikatakan Kamto. "Dalam lingkup Program Kali Bersih (Prokasih) masyarakat menyadarinya, tetapi masih terbatas membersihkan limbah yang ada di sungai tersebut. Tidak membuat air limbah yang dibuang itu layak buang, pokoknya asal terbuang ke sungai," jelas Kamto

Tentang Prokasih ini, Nur Hidayati mengatakan bahwa Prokasih tidak bisa memberi jaminan. "Prokasih sendiri sifatnya *'kan* sukarela. *'Nggak* memaksa perusahaan mana saja yang mau ikut. *'Nggak* ada sanksi kalau dia tidak mau ikut," katanya.

PRODUKSI DAN PELAYANAN SAMPAH DI YOGYAKARTA 1999-2004

PARAMETER	TAHUN 1994/1995	PROYEKSI 1999	2004
SAMPAH TERKUMPUL (m3/hari)			
Kodya	1055	1187	1367
Sleman	206	410	578
Bantul	68	243	381
Total	1329	1840	2326
SAMPAH DIBUANG KE TPA (m3/hari)			
Kodya	1002	1068	1190
Sleman	195	369	503
Bantul	64	219	331
Total	1261	1656	2024
SAMPAH DIDAUR ULANG (m3/hari)			
Kodya	53	119	178
Sleman	10	41	75
Bantul	3	24	49
Total	66	184	302
PRODUKSI SAMPAH (m3/hari)			
Kodya	1318	1397	1519
Sleman	826	1048	1147
Bantul	564	722	818
Total	2708	3167	3484
SAMPAH TIDAK TERKUMPUL (m3/hari)			
Kodya	263	210	152
Sleman	620	638	569
Bantul	496	479	437
Total	1379	1327	1158

SUMBER: RENCANA INDUK PERSAMPAHAN UAY, 1995 DARI MAKALAH

"Selain itu, juga diperlukan contoh terutama dari pihak atas, atau pembuat kebijakan kepada masyarakat. Selama ini, pembuat aturan-aturan tentang lingkungan itu sendiri yang melanggar. Mereka tidak konsisten dengan aturan yang dia buat sendiri," ungkap Sudarmadji. "Apalah artinya aturan kalau implementasi tidak ada," tambahnya.

Suharko pun berpendapat hampir sama. "Suatu ketika sungai X tercemar. Yang mencemari sungai tersebut yang terbukti adalah perusahaan A. Sedangkan perusahaan itu adalah milik anak gubernur. Sehingga akan ditemui kesusahan ketika akan dibuat suatu kebijakan oleh pemerintah," kata Suharko.

Selain itu, pengelolaan sampah juga terbentur biaya. Semisal suatu perusahaan B diwajibkan mengurangi konsentrasi limbahnya yang dibuang ke sungai. Untuk itu ia butuh alat untuk mendekonsentrasikan. Padahal biaya untuk itu cukup mahal. Sehingga, tak jarang banyak perusahaan tak mampu memenuhi kewajiban mengelola limbah dengan baik.

Pada beberapa kasus, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi penyumbang pendapatan asli daerah dalam jumlah besar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mengalami dilema. Sehingga, upaya penegakkan aturan-aturan lingkungan banyak mengalami kebuntuan.

PRODUKSI DAN PELAYANAN SAMPAH DI YOGYAKARTA 1999-2004

PARAMETER	TAHUN 1994/1995	PROYEKSI 1999	2004
PENDUDUK			
Kodya	418459	429743	446888
Sleman	317799	322342	337350
Bantul	211935	222033	240583
Total	948193	974118	1024821
PENDUDUK TERLAYANI (% dari total penduduk)			
Kodya	334767	365282	402199
	80%	85%	90%
Sleman	79450	126269	170055
	25%	39%	50%
Bantul	25432	74895	111949
	12%	34%	47%
Total	439649	566446	684203
	46%	58%	67%

SUMBER: RENCANA INDUK PERSAMPAHAN UAY, 1995 DARI MAKALAH

Restrukturisasi Instansi Pemerintah

Lemahnya birokrasi terhadap masalah lingkungan ini juga tampak pada terbatasnya wewenang instansi yang menanganinya. Akibatnya, instansi tersebut tidak berdaya untuk memberikan sanksi terhadap suatu aktivitas produktif tertentu.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai lembaga yang punya otoritas untuk memberikan sanksi, ternyata juga masih lemah. Peran kedua instansi pemerintah itu hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada departemen sektoral yang terkait. Pemerintah daerah dan departemen terkaitlah --Deperindag, misalnya--, yang dianggap berwenang mengeluarkan sanksi. Di sisi lain, mekanisme pemberian sanksi dengan model ini akan menjadi rancu karena terjadi *overlapping* antar instansi.

Melihat kondisi ini, tampak bahwa pengendalian dampak lingkungan di sekitar kita masih jauh dari harapan. Untuk itu, upaya-upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, perlu terus dikampanyekan. Konsekuensinya, dibutuhkan langkah-langkah dari pemegang kebijakan yang "ramah lingkungan". *Pertama*, perlu suatu *treatment* baru dari pemerintah dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kampanye pemerintah yang selama ini hanya berputar pada masalah kesehatan belaka perlu diubah. Salah satunya adalah dengan pendekatan psikologis kepada masyarakat, baik itu kalangan terpelajar, golongan awam, maupun pejabat dan konglomerat.

Kedua, instansi-instansi pemerintah yang secara khusus menangani lingkungan harus diberi otoritas yang memadai. Persoalan lingkungan yang selama ini dibawahi kementerian negara terbukti tidak efektif. Instansi ini tak bisa menjangkau persoalan lingkungan sampai tingkat yang paling bawah. Ini artinya, perlu restrukturisasi yang radikal dalam hirarki pemerintahan.❐

Agung Christianto
M Bustom, Rio Hutagaol, Asep Mulyana

Hak-Hak Konsumen KB :
PILIH PAKAI ATAU GAGAL

Program KB yang dicanangkan Orde Baru dianggap berhasil. Namun di lapangan, hak-hak konsumen para pengguna KB diabaikan. Di sisi lain, para akseptor KB sendiri masih pasif. Bagaimana menggugah kesadaran konsumen KB akan hak-haknya?

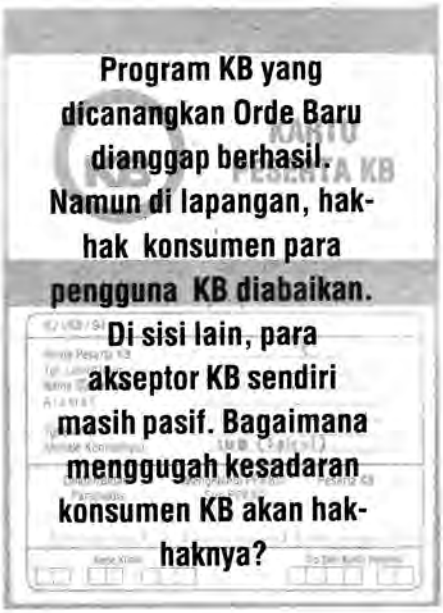

Keberhasilan Orde Baru yang masih bisa dikenang adalah kesuksesan Gerakan KB yang berhasil menekan laju pertambahan penduduk. Namun demikian, kualitas, kepuasan terhadap layanan dan pemenuhan hak-hak konsumen KB masih terabaikan. Bahkan adanya sistem target, banyak konsumen "dipaksakan" untuk mengikuti metode KB. Padahal belum tentu semua konsumen KB cocok.

Keadaan ini diperparah oleh sikap konsumen yang pasif. Mereka memilih untuk diam dan menganggap lumrah efek samping dari alat-alat kontrasepsi yang digunakan, sepanjang alat tersebut mampu mencegah kehamilan. Seperti pada kasus berikut, seorang konsumen KB Norplant (susuk), setelah pemasangan tidak mengalami haid selama 4 bulan berturut-turut. Hal ini memang tidak begitu terasa pada fisik, tetapi bila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan merusak sistem reproduksi wanita. Konsumen ini memilih diam dan tetap menggunakannya sepanjang tidak menimbulkan kehamilan.

Selain memilih pasrah, ada juga yang bertahan "tersiksa" terlebih dahulu sebelum akhirnya melepaskan alat kontrasepsi dan menerima kehamilan sebagai resikonya. Hal ini terjadi pada seorang dosen PT yang berdomisili di Yogyakarta. Setelah menjalani pemasangan IUD, ia selalu mengalami perdarahan (*bleeding*) selama 8 bulan. Keadaan ini dialami semenjak dia memasang alat kontrasepsi IUD yang disarankan oleh dokternya.. Parahnya lagi, setiap berhubungan intim (*coitus*) dengan suaminya, ia merasa kesakitan. Seolah tak ada pilihan lain untuk menggantinya dengan alat kontrasepsi lain yang lebih cocok. Selain takut hamil, juga ada keyakinan bahwa apa yang disarankan oleh dokter pasti yang terbaik dan benar.

Prihatin Nasib Perempuan

Jika dirunut ke belakang, upaya gerakan KB pada tahun 1950-an dilandasi oleh keprihatinan akan kondisi kesehatan perempuan, baik sewaktu hamil, melahirkan, ataupun usai melahirkan. Tak berselang lama, terbentuklah PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia), -- organisasi KB pertama di Indonesia-- kemudian terbentuk. Ini dibenarkan Budi Wahyuni, Direktur Utama PKBI cabang Yogyakarta.

Pada awal 1970-an, misi Gerakan KB telah diambil alih oleh BKKBN.Misi gerakan pun bergeser ke arah penurunan angka fertilitas atau *population of control*. "Tujuannya menjadi salah kaprah dari tujuan yang semula dicita-citakan oleh para pendiri," tuturnya.

Menurut catatan DHS Survey, pemerintah akhirnya harus bekerja dengan target menurunkan angka fertilitas dari 5,6 pada tahun 1960-an menjadi kurang dari 3 pada awal 1990. Dengan adanya penurunan angka fertilitas ini, pelayanan kontrasepsi yang semula merupakan program pemerintah yang berorientasi target melalui subsidi penuh pemerintah, bergeser menjadi suatu gerakan masyarakat yang sadar akan kebutuhannya hingga bersedia membayar dengan biaya sendiri.

Idealnya, pemberi layanan kontrasepsi (*provider*) harus meningkatkan mutu pelayanan untuk memenuhi hak pengguna layanan (klien, konsumen). Namun pada prakteknya, tujuan-tujuan demografik serta ekonomi inilah yang dikedepankan. Akhirnya, situasi ini memberikan dampak tersendiri dalam hal pelayanan KB.

Masih Berperspektif Gender

"Kalau berbicara mengenai KB, *nonsens* kalau kita tidak membicarakan perempuan," tandas Budi Wahyuni. "Lihat saja dari semua jenis alat kontrasepsi hanya dua yang digunakan oleh laki-laki, yaitu kondom dan vasektomi. Sementara sisanya, seperti IUD, pil, suntik, susuk (*norplant*), dan cincin vagina, digunakan oleh kaum wanita. Namun sejauh mana hak-hak perempuan (ibu) yang menjadi target utama program ini?" tambahnya.

Pertanyaan ini menjadi penting ketika dilihat alasan para konsumen KB. Keikutsertaan mereka dalam program KB sekedar memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu dan partisipasi dalam pembangunan. Sementara pengetahuan petugas tentang KB di lapangan lebih terpaku pada upaya pembatasan jumlah penduduk. Ini sebenarnya yang mengakibatkan lemahnya kualitas pelayanan KB. Hal ini juga didukung oleh budaya kita yang masih memandang perempuan pada sisi

sub-ordinat, sehingga perempuan tak lebih dari obyek yang memiliki posisi tawar yang lemah.

Komentar lebih keras dituturkan oleh Ratih, staf pekerja GAKTPI (Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia) Yogyakarta. Ia mengatakan, pemasangan alat kontrasepsi pada tubuh perempuan bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Bisnis Menjual Pelayanan

Rendahnya kualitas mutu pelayanan KB di Indonesia ini diakui Drs. Tukiran. Staf peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan UGM ini menilai, sudah saatnya pemerintah mengalihkan target dari kuantitas (penekanan jumlah penduduk) ke kualitas (pemberian pelayanan yang baik). "Karena bisnis KB adalah menjual pelayanan, maka yang harus ditingkatkan adalah pelayanannya. Logikanya, kalau konsumen dilayani dengan baik sesuai kebutuhannya, maka tingkat kelangsungannya akan panjang," paparnya.

Diakuinya, dalam 5 tahun terakhir ini KB masih mengarah ke target kuantitas. Bahkan menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), pada 10 tahun terakhir ini angka fertilitas meningkat dari 50,6 % pada tahun 1987 menjadi 60,6 % pada tahun 1997. Pada 1997, peningkatan ini menjadi makin drastis karena krisis moneter. Hal ini wajar terjadi sebab pemerintah belum mampu menyediakan sendiri alat-alat kontrasepsi. Dari semua jenis alat kontrasepsi, kecuali kondom, Indonesia masih mengimpor atau menerima bantuan dari negara donor. Akibatnya, masyarakat yang berdaya beli rendah "terpaksa" menggunakan alat kontrasepsi yang ada meskipun belum tentu cocok. Meski pemerintah sudah memberi subsidi, tetapi masih belum mampu menutupi kebutuhan konsumen KB secara gratis. Kalaupun ada yang mampu membayar, maka harganya menjadi 2 hingga 3 kali lipat. Seperti contoh, KB suntik yang semula hanya dua hingga tiga ribu persuntik meningkat menjadi sembilan ribu rupiah.

Ada kalanya bantuan luar negeri punya implikasi yang kurang menguntungkan bagi konsumen KB. Bantuan biasanya berupa wujud kontrasepsi tertentu yang diproduksi di luar negeri. Pergantian donor dapat mengakibatkan perubahan jenis kontrasepsi yang disumbangkan oleh pemberi bantuan yang baru. Katakanlah perbedaan jenis suntikan dari *Depi-povera* ke *Noristerat* di Puskesmas. Ini pernah terjadi dan menimbulkan keluhan, baik dari konsumen maupun petugas kesehatan.

"Pemaksaan" pemakaian alat kontrasepsi tertentu pada suatu daerah sebenarnya melanggar salah satu hak dari 10 hak-hak konsumen KB yaitu Hak Pilihan. Tentang hal ini, Tukiran menjawab, "Sangat tipis sekali jarak antar konteks terpaksa dan dipaksa. Contohnya, kalau ada konsumen yang ingin KB pil tetapi pada saat itu yang ada hanya KB suntik, maka bagi dia bukan lagi dipaksa tetapi terpaksa menggunakan. Kalaupun ada efek samping, maka itu dianggap resiko atas pilihan. Toh, petugas tidak memaksa, hanya menyarankan. Pada kasus seperti inilah, posisi konsumen sangat lemah."

DOK. BAL

Budi Wahyuni
PKBI Yogyakarta

Hal senada juga diungkap Drs Jati Pratikto. Penyuluh KB BKKBN DIY ini mengatakan, pemerintah tidak pernah memaksa. Kalaupun ada kesan pemaksaan itu lebih pada upaya pembelajaran, terutama pada masyarakat yang sama sekali belum mengenal KB. "Anak yang tidak mau belajar membaca saja harus dipaksa dulu biar mau. Nanti setelah terbiasa, baru dia dibebaskan," papar Jati dengan sebuah analogi.

Mengeluhkan, Bukan Mengadukan

Keberhasilan program KB di Indonesia tidak lepas dari upaya partisipasi akseptor KB. Karena menyangkut penggunaan produk dan jasa yang dikonsumsi, maka tidaklah salah jika pihak pengguna KB disebut "konsumen KB". Sebagai konsumen, mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan ini sangat diperlukan mengingat setiap produk atau jasa memiliki keterbatasan. Sehingga, perlindungan bagi pemakainya harus jelas. Lalu apa saja sebenarnya hak-hak konsumen KB itu?

Rumusan hak-hak konsumen KB ini disadur dari Hak-hak Klien yang diterbitkan oleh IPPF *(International Planned Parenthood Federation)*. Kemudian rumusan ini diolah kembali pada Lokakarya di Yogyakarta, 2-3

Alat kontrasepsi : *Kenyamanan diabaikan*

ISTIMEWA

Tukiran

Maret 1997 yang menghasilkan 10 hak konsumen KB.

Adapun 10 hak konsumen KB itu adalah hak informasi, hak akses, hak pilihan, hak keamanan, hak privasi, hak kerahasiaan, hak harkat, hak kenyamanan, hak berpendapat, hak keberlangsungan, serta hak ganti rugi.

Pelayanan dan wawasan petugas KB di lapangan amat berperan dalam upaya pemenuhan hak konsumen. Hal ini dibenarkan DR. Agus Dwiyanto (1997). Menurut penelitian yang dilakukan staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan UGM ini, kendati pelayanan KB telah menyediakan berbagai alat kontrasepsi, tetapi petugas cenderung mengarahkan ke salah satu jenis alat kontrasepsi, misalnya IUD. Petugas biasanya akan bertanya mengenai alat yang akan dipakai. Ketika diberi jawaban IUD, maka petugas tidak menjelaskan kelemahan dari IUD. Tetapi kalau mereka memilih alat lain, maka petugas akan menjelaskan kelemahan alat-alat tersebut. Bahkan beberapa wanita yang menggunakan IUD dan ingin melepasnya, seringkali mengalami kesulitan karena petugas enggan melepasnya. Terpaksa mereka harus mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk minta bantuan dokter.

Selain itu, jika ada bias dalam pemberian informasi, petugas lapangan enggan memberikan informasi secara lengkap karena takut konsumen akan lari. Ironisnya lagi, kalau ada konsumen yang mengalami keluhan seperti nyeri-nyeri, pusing, mual hingga pendarahan, petugas biasanya hanya memberikan jawaban yang bersifat sugestif, seperti, "Ah, itu hal yang biasa untuk pertama kali, besok juga sembuh." Mereka baru bertindak jika keadaan sudah terlanjur parah.

Sebenarnya konsumen bisa mengadukan hak-hak mereka ke BKKBN. Namun karena keterbatasan pelayanan, maka PKBI menjadi alternatif pengaduan. Dalam satu bulan hampir 200 pengaduan yang masuk dari konsultasi hingga pemasangan. "Dalam hal ini PKBI berperan ganda, baik sebagai *provider,* ataupun membela hak-hak konsumen melalui penanganan kasus dan penguatan kesadaran masyarakat. Ini dilakukan lewat pembuatan *statement-statement*, lokakarya, seminar, dan sebagainya. Tetapi pembelaan hak-hak konsumen belum ada yang sampai ke tingkat yuridis. Konsumen pada umumnya sudah merasa puas jika kasus mereka tertangani. Misalnya, pendarahan karena kurang tepatnya pemasangan susuk. Begitu kita betulkan, maka konsumen menganggap selesai. Pada umumnya mereka bukan mengadukan, tetapi mengeluhkan," jelas Budi Wahyuni, yang juga aktif melakukan advokasi seputar hak-hak reproduksi perempuan.

Penggalangan kesadaran konsumen sebagai upaya pemenuhan hak-haknya ini tentu belum cukup. Diperlakukan pula upaya memasyarakatkan hak-hak konsumen di kalangan pengusaha alat kontrasepsi, penyedia jasa, serta penanggungjawab program KB. Mengingat, hak konsumen juga terkait dengan kewajiban pengusaha dan penyedia jasa program KB untuk meningkatkan kualitas produk alat-alat kontrasepsi.❐

Bekti DA

Bikima
99.85FM
MUSIC • NEWS • TALKSHOW
Jl. Yogya - Solo km. 15 Bogem Kalasan Sleman Yogyakarta 55671 Telp. (0274) 496135, 497237, 467236 Faks. (0274) 497242

Menunggu PERANG DINGIN BARU

Judul Buku: Menentang Negara Sekular
Kebangkitan Global Nasionalisme Religius
Judul Asli : The New Cold War?
Religius Nationalis Confronts the Secular State
Penulis : Mark Juergensmeyer
Penerjemah : Noorhaidi
Penerbit: Mizan, Bandung, 1998. 320 Hal.

Anda pecinta perdamaian dan anti perang? Jangan diam saja, ikutlah berpikir, dan lakukan sesuatu untuk menemukan solusi atas pertentangan. Sebab, kalau tidak seluruh penduduk dunia beserta isinya terpaksa harus menanggung derita atas kehadiran perang dingin baru ini!

Di buku yang berjudul asli *The New Cold War? Religion Nationalism Confronts the Secular State* ini, secara sederhana Juergensmeyer mendefinisikan bahwa nasionalisme religius adalah orang-orang yang memiliki kepentingan agama sekaligus memiliki kepentingan politik Mereka mencoba merespons masalah-masalah politik dari kaca mata agama. Sebaliknya, nasionalisme sekuler adalah mereka yang memiliki kepentingan politik tetapi memisahkannya dengan ajaran-ajaran agama.

Perbedaan-perbedaan antara keduanya ini, bagi Juergensmeyer, akan selalu ada dan tajam. Maka sekalipun ditemukan sintesis antara keduanya, pada dasarnya tidak mungkin ada titik temu antara ideologi-ideologi politik religius dan ideologi politik sekular. "Pada tataran ideologis, Perang Dingin baru akan tetap berlangsung," tulisnya.

Maka, walaupun kebangkitan global nasionalisme religius di berbagai belahan dunia dalam menentang nasionalisme sekular bukanlah fenomena baru, namun menurut Juergensmeyer hal itu tidak bisa begitu saja diabaikan. Lantas, jika tidak ada solusi yang tepat antara kedua belah pihak dalam menemukan titik kompromitas penyelesaian pertentangan ini, maka sekali lagi Juergensmyer mengingatkan. Bisa jadi perang dingin lama antara akan terulang dengan versi kedua. Itulah sebenarnya inti ramalan Juergensmeyer.

***

Dalam penulisannya buku ini berusaha mengungkap seluruh pergolakan politik internasional yang terjadi, khususnya pertentangan ideologis antara nasionalisme religius dan nasionalisme sekular (Barat), pada akhir abad ke-20 ini.

Profesor Sosiologi di Universitas California Santa Barbara ini menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada beberapa indikasi positif yang menunjukkan keinginan kaum nasionalis religius untuk bersikap akomodatif. "Bahkan sebagian besar kaum nasionalis religius yang militan pun kadangkala bersikap lunak: melunaknya Iran adalah satu contoh," ungkapnya.

Sayangnya sikap ini tidak diikuti pihak Barat (Nasionalisme Sekular). Sikap mereka sebenarnya tidak jelas dan cenderung menuggu serta pasif. Bukti apa yang bisa meyakinkan dunia bahwa Barat telah merubah sikapnya untuk memahami prinsip-prinsip nasionalisme religius dan "berdamai" dalam konfrontasi ini.

Tampaknya di sini "arogansi Barat" tercermin pada ungkapan Juergensmeyer. Ia menulis,"apakah sikap Barat akan berubah, itu soal lain. Penting diingat bahwa banyak keinginan yang melatari pendirian kaum nasionalis religius hadir sebagai respons terhadap apa yang mereka rasakan sebagai sikap arogan dan tidak toleran dari Perang Dingin Barat terhadap mereka. Jika mereka dapat merasakan perubahan sikap Barat—setidaknya menghormati beberapa aspek pendirian mereka—maka barangkali respons mereka akan menjadi lebih lunak."

Secara keseluruhan, buku ini menarik dan berusaha untuk tampil seobyektif mungkin dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Usaha keras Juergensmeyer; riset panjang dan wawancara dengan banyak tokoh nasionalis religius di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa buku ini patut mendapat acungan jempol.

Judul kesimpulan "Bisakah Kita Hidup dengan Nasionalisme Religius?" sebenarnya akan memunculkan banyak pertanyaan. Seperti, Siapakah yang dimaksud dengan "Kita"? Juergensmeyer tidak mengungkap dengan jelas. Lalu, kalau ternyata "Kita" yang dimaksud adalah kaum Barat (nasionalisme sekular) mengapa Juergensmeyer hanya memberikan solusi yang terkesan hanya untuk Barat dan seakan menempatkan kaum nasionalis religius sebagai bahaya yang harus diawasi Barat dalam konfrontasi ini. Mengapa?□

Luqman Hakim Arifin

"Kesendirian
Aku tak tau darimana ia datang dan pergi.
Yang ada: kehampaan."

Sebuah Alienasi

Jack Dawson (Titanic) tentu lebih ekspresif dari Annette Ong. Mungkin ia tidak terlalu hebat, hanya romantis, dan mungkin memaki.

Saat masuk alam ruang pamerannya, atmosfir tiba-tiba menjadi aneh. Misterius. Mencekam. Persis Phantom of the Opera. Ketika memasuki ruang-ruang imaji mereka saat itu kita harus menebak apa makna di balik lukisan. Begitu aneh, goresan cat minyak yang mereka buat, tanpa judul. Hal yang membuat apresian sedikit bingung, walau mungkin bermaksud membebaskan apresiasi mereka. Tak terasa juga lompatan-lompatan besar yang kontradiktif dalam tema-tema mereka. Sebuah alienasi, kesepian dan kesendirian. Tema-tema misterius untungnya masih diimbangi dengan pemilihan warna yang berani dan cocok.

Menyusur dari sayap kiri, kita temukan beberapa *big drawing* dan banyak *small drawing* dengan rasa yang lebih ekspresif. Dengan master hitam putihnya manusia digambarkanbegitu individu, kosong, telanjang tanpa wajah. Kesan kesepian makin menguat. Sebutlah lukisan tentang kamar kosong, kebersamaan yang bisu, kesendirian dalam hampanya tatapan.

Di bagian tengah dan sayap kanan, keadaan tidak menjadi lebih baik. Gambar-gambar abstrak dan warna-warna tak terduga makin menguatkan kesan ini. Mereka menyajikan lukisan cat minyak sederhana dalam warna yang tidak beraturan: tangan, kaki, mata, dan hal-hal aneh lainnya . Seolah A.Ong dan C. Buerger ingin bicara dengan tatap mata, kepalan tangan, dan gores biru hidup mereka.

Kiranya, dapat ditarik benang merah. Pelukis menggambarkan dirinya sendiri sebagai manusia yang menderita dan teralienasi. Bila kita merasakannya tak kita akan dipenuhi romantisme pengkhayalan dan utopia.

Seperti kebanyakan lukisan yang menampilkan ketelanjangan dan tanpa judul ternyata manusia juga mengalami hal yang sama. Ia telanjang, tak punya judul atau sama sekali tak memaknai hidupnya selain sebagai makhluk biologis, mekanis yang dituntut bertahan hidup.

Relevan bila kerinduan kedua pelukis ini untuk kembali sederhana namun hidup, berwarna. Hal yang biasa jika manusia ingin kembali ke suatu firdaus. Dimana persahabatan, keindahan, pola hidup menyatu dalam nurani manusia. Menelanjangi manusia dan kembali ke dasar batiniah serta mengejar kehangatan adalah sedikit dari sejuta impian. Toh manusia sendiri yang akan memaknai dan melakukannya, atau hanya akan melawan ego dan diri pribadi.

Tak pelu disesali. Selalu saja ada kontradiksi. Seperti hitam putihnya Ong dan Buerger.❐

Pelukis : Annette Ong
Tempat : Bentara Budaya, Kotabaru, Yogyakarta
Waktu : 2-20 Oktober 1998

Veronika Kusuma

(DOK. PEMDA DATI II KAB. BLORA)

Mencari Sisa Orang Samin Kelopodhuwur

Samin Surontika (duduk di tengah), sesaat sebelum dibuang ke pengasingan *(dok. Pemda Dati II Kab. Blora)*

Samin Kelopoduwur kini tinggal cerita. Kalaupun ada, sebagian besar dari mereka mengkonversi kepercayaannya ke dalam agama Islam. Bahkan, mereka menolak, malu dan marah jika dikatakan orang Samin.

Waktu terus berputar dan sejarah telah mencatat bahwa sejak tahun 1890 Kelopoduwur adalah pusat orang-orang Samin. Asal-usul Saminisme dan perkembangannya berawal dari desa ini. Lalu, akankah Saminisme di Kelopoduwur hilang begitu saja? Berikut ini laporan wartawan Balairung, *Luqman Hakim Arifin*, yang mengunjungi desa tersebut, sebulan lalu.

***

Jam satu siang. Hujan belum juga turun dan mentari tampak pucat pasi berselimutkan gumpalan mendung yang menggantung di angkasa. Sebuah mini bus yang membawa Balairung melaju dengan cepatnya menyusuri ruas-ruas jalan hutan yang aspalnya tidak rata. Butuh waktu satu jam untuk sampai ke Kelopoduwur dari Kecamatan Randublatung dan mini bus merupakan satu-satunya angkutan umum yang tersedia sampai pukul lima sore. Lebih dari itu, anda harus siap-siap *ngojek*.

Melewati kawasan hutan jati. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya pepohonan jati yang meranggas, dedaunan yang berserakan, rerumputan kering dan sesekali satu dua orang tampak sedang mengumpulkan daun dan ranting pohon jati.

Mini bus akhirnya memasuki wilayah Kelopoduwur. *Tegalan* (ladang) menyambut di samping kiri-kanan jalan. Di tengah-tengahnya beberapa lelaki tampak sibuk mencangkuli tanah. Dan nun jauh lagi, di sana, di belakang *tegalan*, beberapa rumah beratap putih terlihat berada di tengah-tengah rimbunnya pepohonan. Kata orang desa, di sanalah pemukiman sisa-sisa keturunan Samin di Kelopoduwur.

Tak jauh berbeda dengan desa-desa Jawa lainnya. Kelopoduwur juga menawarkan kedamaian, kenyamanan dan keramahan penduduknya. Semuanya tampak wajar-wajar saja di sini.

Dan dibandingkan desa-desa sebelahnya, Kelopoduwur juga tidak kalah maju. Meski sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh pabrik, tapi desa yang masih asri ini bukan termasuk desa IDT.

Modernisasi tampaknya telah lama menyapa mereka. Tak ada kesan mereka bersikap menutup diri dari peradaban luar. Tidak ada lagi itu sikap *nyeleneh*, (aneh) atau *nyangkak* (menyangkal) dalam berkomunikasi. Rumah-rumah penduduk juga hampir semuanya sudah berlistrik. Bentuknya juga tidak seluruhnya *joglo*. Dan surat kabar, radio, televisi, parabola sampai seorang anak muda dengan hidung tertindik anting-anting, dan rambut yang dicat keemasan, bukan lagi hal asing bagi mereka.

Tinggal Cerita, Jadi Cemoohan

Dari desa yang terletak di sebelah selatan kota Blora Jawa Tengah ini sepertinya tidak ada yang menarik, padahal sejarah mencatat, desa inilah awal mula kemunculan Saminisme lalu menyebar ke wilayah Blora. Sejak tahun 1890 peran Kelopoduwur tidaklah kecil. Di desa inilah Samin Surontiko (pendiri Saminisme) diterima dan mengajarkan ajaran-ajarannya pertama kali. Dulu, di Kelopoduwur juga terdapat Perguruan Adam, tempat orang-orang dari luar Kelopoduwur menuntut ilmu kepada Samin Surontiko.

Satu abad lebih telah berlalu. Kini, yang tampak tidak wajar adalah kenyataan bahwa kini ajaran dan orang Samin di Kelopoduwur telah lama hilang. Tinggal seorang Samin tulen di Kelopoduwur, yaitu Mbah Kromo Tariman, murid Mbah Engkrek Kelopoduwur. Umurnya sudah sangat tua. Menurut Mbah Kromo, selain dirinya orang Samin di Kelopoduwur sudah meninggal semuanya.

Hal ini dibenarkan oleh Setyo Agus Widodo, 28 tahun.

kepala desa Kelopoduwur. Menurut Mas Wid, begitu ia biasa dipanggil, di Kelopoduwur sudah lama tidak ada perkumpulan orang Samin. Keturunan orang Samin juga sudah seperti penduduk yang lain. "Mereka sudah lama berbaur dengan penduduk yang lain, mereka seperti kita juga, ya bekerja, ya sekolah, ya beragama, bahkan ada anak turun orang Samin yang setiap malam mengajar ngaji di masjid," jelasnya.

Pendapat senada banyak diutarakan beberapa penduduk yang ditemui Balairung. Dan hal yang sering mereka tandaskan adalah bahwa orang Samin di Kelopoduwur sudah tidak ada lagi. "Samin tinggal cerita," ungkap Saman, salah seorang dari mereka.

Parahnya keturunan orang Samin sendiri, kurang begitu tahu apa dan siapa itu Samin. Sebab, jangankan untuk mempelajari tokoh Samin Surontiko dan ajaran-ajarannya, untuk disebut keturunan Samin pun mereka menolak dan marah. Kendati dulu, buyut dan kakek nenek mereka "bangga" dengan sebutan itu.

Pemerintah juga tidak banyak berperan. Sejarah geger Samin (pergerakan Samin) sampai sekarang kurang mendapatkan tempat dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Informasi sejarah yang didapatkan masyarakat, khususnya generasi muda, tentang Samin sangatlah minim. Dan kalaupun ada, informasi-informasi itu sering kali justru menyudutkan Samin.

Maka, tak mengherankan apabila sampai detik ini masih banyak orang tetap memakai kata Samin sebagai umpatan (Samin kamu!) yang berarti bodoh, tolol, keras kepala, gila dan lain sebagainya.

Ada satu hal yang cukup "mengagumkan". Samin, tokoh pejuang Indonesia yang menentang penjajahan kolonial Belanda, sekaligus penganjur keadilan dan gerakan tanpa kekerasan, —jauh sebelum Mahatma Gandhi menemukan metode Satyagrahanya—, berubah menjadi sebutan umum bernada umpatan bagi orang yang bodoh, tolol, dan semacamnya. "Penghargaan" yang tidak tanggung-tanggung dari sebuah bangsa terhadap pahlawannya.

Geger Samin

Untuk memahami Samin, kita harus memutar mundur jarum jam sejarah kembali ke masa-masa penjajahan kolonial Belanda di Blora. Di situlah bisa ditemukan jawaban mengapa Saminisme menjadi bahan cemoohan, dan mengapa Saminisme di Kelopoduwur hilang ditelan jaman.

Kisah ini bermula dari desa Ploso Kedhiren, Kecamatan Randublatung, Blora. Sekitar tahun 1859, lahirlah seorang lelaki yang bernama Raden Kohar. Nama ini selanjutnya diubah menjadi Samin. Sebuah nama yang bernafaskan kerakyatan. Kemudian setelah dia menjadi guru kebatinan namanya berubah menjadi Samin Surontiko, alias Samin Surosentiko, alias Samin Suro Kuncung.

Dari catatan Serat Punjer Kawitan, Samin Surontiko sebenarnya adalah seorang Pangeran atau Bangsawan yang menyamar di kalangan rakyat pedesaan. Ia ingin menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan kolonial Belanda dengan cara lain; pergerakan kerakyatan tanpa kekerasan.

Ia, lima bersaudara. Ayahnya bernama Raden Surowijaya yang dikenal sebagai Samin Sepuh dan bekerja sebagai bromocorah untuk kepentingan orang-orang desa yang miskin. Samin Sepuh ini berasal dari daerah Bojonegoro Jawa Timur. Samin Surontiko sendiri bukan tergolong petani miskin. Menurut dokumen-dokumen resmi ia mempunyai sawah tiga *bau* (1 *bau* sama dengan 0,7 hektar-red), satu *bau* ladang, dan enam ekor sapi.

Sekitar tahun 1890 (umur 31 tahun) Samin mulai menyebarkan ajarannya di Kelopoduwur dan desa-desa sekitarnya. Ajarannya mendapat tanggapan baik, dan segera memikat banyak orang.

Menurut orang Samin di Tapelan Bojonegoro, seperti ditulis Saripan Sadi Hutomo (Basis, Januari 1985), Samin Surontiko mengajarkan cara bagaimana melawan pemerintah kolonial Belanda, di samping mengajarkan perilaku hidup di dunia dan akhirat. Ajaran itu diwujudkan dengan *nggendheng* (pura-pura gila, pura-pura bersifat aneh). *Nggendheng* adalah sifat Prabu Puntadewa dalam pewayangan.

Nggendheng yang dilakukan Samin dalam menghadapi penjajah kolonial Belanda memang bukan tanpa alasan. Menurut mereka, perlawanan dengan jalan kekerasan adalah sia-sia. Sebab, Belanda memiliki peralatan lengkap, serta pendanaan yang besar untuk berperang. Apalah artinya kekuatan *kere-kere* desa melawan Belanda. Apalagi mereka memang tak punya senjata. Tapi itu bukan berarti orang Samin bersikap fatalistik menghadapi kondisi obyektif waktu itu. Semangat perlawanan mereka tetap

"Kalau dilarang, dilarang dalam segi apa?"

Suradi
(Carik Kelopoduwur)

Bekas rumah Samin Surontika
Tinggal cerita, jadi cemoohan

menyala. Hanya saja orang Samin memiliki cara tersendiri: perlawanan tanpa kekerasan yang dimanifestasikan lewat *nggendheng, mbangkang*, dan *nyangkak* dalam berdiplomasi.

Inilah sebenarnya ciri utama pemberontakan Samin. Sebagai perlawanan individual, cara ini memang umum. Tapi tidak demikian jika model perlawanan semacam ini diterapkan secara kolektif dalam sebuah komunitas. Cara ini harus dilakukan dengan keteguhan. Sebab, menurut Samin Surontiko, cara itu bukan saja membutuhkan "kebersihan", tapi juga pengorbanan yang amat berat. Penyitaan barang milik, dijebloskan ke penjara, dibuang, ataupun dipencilkan oleh masyarakat adalah serangkaian resiko yang harus ditanggung.

Orang Samin bukanlah orang berpendidikan seperti Mahatma Gandhi yang mengembangkan Satyagraha. Tapi cara perlawanan mereka sangatlah unik. Misalnya, ketika mereka diperintahkan untuk memindahkan onggokan batu, mereka pindah sebuah saja. Atau, saat mereka disuruh mengangkat kayu, mereka angkat kayu itu tanpa membawa kayu itu ke mana-mana. Kalau ditanya, "Mau pergi kemana?", maka akan dijawab "ke depan", atau "ke belakang" tanpa menyebutkan tempat dan tujuan yang jelas.

Sikap-sikap yang demikian itu tentu saja sangat membingungkan dan menjengkelkan. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak senang pada mereka. Akibatnya, nama Samin berubah menjadi nama umum bagi orang yang bodoh, tolol, keras kepala dan gila. Kesalahan sosial yang semestinya lekas dikoreksi.

Sebutan itu sendiri, menurut Paulus Widiyanto (Prisma, Agustus 1983), semula dilontarkan beberapa kalangan priyayi, santri dan abangan yang berpihak kepada Belanda, atau setidaknya, kalangan ini tidak berpihak kepada Samin. Tetapi stigma negatif tentang Samin itu kemudian itu meluas, dan akhirnya diterima secara umum, khususnya orang Jawa. Termasuk, mereka yang sebenarnya tidak mengetahui seluk beluk Samin.

Sekitar tahun 1905, model perlawanan para pengikut Samin mengalami modifikasi. Mereka menolak membayar pajak, menolak memberikan sumbangan kepada lumbung desa, serta menolak menggembalakan ternaknya bersama ternak yang lain. Hal ini memaksa Belanda mengambil sikap tegas terhadap orang-orang Samin.

Tahun 1907, kontrolir Belanda mencium isu adanya rencana pemberontakan orang Samin di Kedung Tuban pada tanggal 1 Maret 1907. Belanda kemudian melakukan penangkapan dalam suatu acara selamatan yang diduga sebagai bagian dari rencana itu.

Samin Surontiko sendiri tidak ditangkap

"Semua tinggal cerita..."

Mbah Kromo Tariman
(satu-satunya orang Samin tulen yang tersisa)

waktu itu. Baru beberapa hari kemudian ia menerima panggilan dari Bupati untuk datang ke Rembang, dan di sana ia ditangkap. Sesudah diperiksa, Samin dan delapan pengikutnya dibuang ke tiga tempat terpisah di luar Jawa. Tepatnya, Ceylon (Sailan). Orang Blora menyebutnya, diselong. Samin meninggal di Padang tahun 1914. Selanjutnya tidak ada keterangan mengenai nasib orang-orang buangan itu.

Namun demikian, penangkapan dan pembuangan Samin Surontiko tidak memadamkan perjuangan kaum Samin. Sisa pengikutnya giat menyebarkan ajaran Samin di berbagai tempat, seperti Wongsorejo (1908) di Distrik Jiwan, Madiun, Surohidin (1911) di Kabupaten Grobogan, Karsiyah (1911) di Kajen, Pati, Pak Engkrak di Grobogan dan Pak Engkrek di Kelopoduwur.

Demikianlah, Samin dan para pengikutnya telah berjuang dengan bentuk perlawanan mereka sendiri yang unik tapi penuh pengorbanan dan militansi. *Nggendheng, mbangkang* dan *nyangkak* hanyalah strategi hasil "ijtihad" orang Samin terhadap kondisi obyektif untuk melawan penindasan kolonial Belanda. Maka, jika sekarang kata "Samin" masih dipakai sebagai umpatan untuk orang bodoh dan sebagainya, adalah keterlaluan.

Larangan Pemerintah.

Bagaimana proses punahnya Saminisme di Kelopoduwur dan mengapa bisa punah, sampai sekarang belum ada penelitian tentang hal ini. Para *pinisepuh* Kelopoduwur tampaknya juga tidak banyak tahu bagaimana kronologi punahnya ajaran Samin dan para pengikutnya di Kelopoduwur. Tetapi, dari beberapa analisis para narasumber yang ditemui Balairung, dapat disimpulkan bahwa punahnya Saminisme di Kelopoduwur dilatarbelakangi dua faktor, faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar Samin. Salah satunya, menurut Suradi, adanya larangan Pemerintah Daerah Tingkat II Blora pada tahun 1983 tentang penyebarluasan ajaran Samin di Kelopoduwur. "Alasannya sangat sederhana, pemerintah "*isin*" (malu) mempunyai warga yang aneh," ujar Carik desa Kelopoduwur ini. Padahal, menurutnya, orang Samin punya kepekaan sosial yang sangat tinggi. "Kalau dilarang, dilarang dalam segi apa?" tanyanya, "Orang Samin adalah orang yang suka menolong, taat dan jujur, seharusnya dilestarikan," tambahnya.

Ketika masalah pelarangan ini dikonfirmasikan ke pemerintah dati II Blora, ternyata tidak ditemukan jawaban yang memuaskan. Y. Soeparwadi, mantan Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Tingkat II Blora, menegaskan bahwa pelarangan itu memang tidak jelas. "Tapi, harap dilihat konteksnya secara luas bahwa Pemda berkewajiban mengarahkan masyarakatnya agar bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya. Saya melihat arahnya positif," ujar lulusan Fakultas Hukum UGM ini.

Lain halnya Oki B. Jatmiko, alumnus Fakultas Filsafat UGM tahun 1977 yang kini bekerja di Direktorat Sosial dan Politik Kabupaten Blora. Menurut penjelasannya, pelarangan itu tidak bersifat prinsipil. Tidak ada pelarangan tertulis, dan maksud pemerintah hanya ingin membuka isolasi orang Samin, sehingga program-program pemerintah (KB, sekolah dan kesehatan) dapat diterima oleh mereka. "Yang dilarang adalah orang yang "*nyamin*", bukan Samin," ujarnya. "*Nyamin*" yang dimaksud Oki adalah orang yang bertingkah laku seperti orang Samin, tetapi orang itu tidak benar-benar mengerti dan mengikuti ajaran Samin.

Faktor eksternal yang lain adalah pengaruh perubahan-perubahan dunia yang menyeruak di mana-mana. Seiring dengan berputarnya waktu, melalui surat kabar, radio, atau televisi yang mengetuk setiap pintu orang Samin, modernisasi akhirnya muncul menawarkan perubahan-perubahan hidup kepada orang Samin. Ini tentu saja berdampak tidak kecil terhadap pola pikir keturunan Samin. Jaman memiliki anaknya sendiri-sendiri, dan Samin adalah milik jamannya. Faktor kedua adalah faktor internal. Faktor ini muncul dari dalam ajaran dan orang Samin sendiri. Terlepas dari faktor eksternal yang ada, kondisi internal Samin sebenarnya memberikan peluang akan kepunahan ajarannya sendiri.

Samin, atau Saminisme bukanlah agama. Bukan juga sebuah aliran kepercayaan seperti sapta dharma atau pangestu. Dalam Saminisme tidak didapatkan aturan-aturan yang mengikat seorang Samin secara formal, juga tidak ada proses penerimaan khusus untuk menjadi orang Samin, seperti membaca dua kalimat syahadat dalam Islam, pembaptisan dalam Kristen, ataupun *bai'at* pada aliran-aliran kepercayaan.

Tidak adanya ikatan formal kesaminan seseorang itulah yang menyebabkan ajaran dan orang Samin mudah ditelan jaman. Seperti dikatakan Kardji, 50 tahun, orang Islam, orang Kristen, atau agama dan aliran apa pun bisa menjadi orang Samin. "Samin itu *lelakon* (tingkah laku), bukan agama. Ia bukan seperti ilmu yang diajarkan di pesantren-pesantren tetapi *pitutur* (nasehat) yang digunakan untuk menentramkan hati, mengingatkan orang agar mempunyai budi pekerti yang baik dan tidak sombong," jelas putra sulung Mbah Kromo Tariman ini.

Jika Samin adalah *lelakon* atau *pitutur* yang baik, lalu mengapa ajaran-ajaran Samin tidak dikembangkan dan dilestarikan secara tertulis? Hal itu, menurut Kardji, karena Saminisme lebih mengenal budaya lisan ketimbang budaya tulis. Tentang tidak diajarkannya Saminisme secara formal, Kardji sendiri tampak tidak begitu jelas menjawab. "Itu rahasia masyarakat terdahulu," ucapnya singkat.

Faktor internal lain adalah ketidaksiapan orang Samin dalam mengantisipasi masa depan ajaran Samin. Katakanlah, ketika penjajahan Belanda telah berakhir, akankah strategi *nggendheng, nyangkak* masih tetap dipakai? Atau, ketika nama Samin Surosentika berubah menjadi nama umum bagi orang bodoh, dungu, keras kepala atau gila. Tidak ada *counter* balik dari orang-orang Samin. Hal-hal lain yang selama ini ditujukan secara miring kepada mereka, juga kurang direspon oleh orang Samin. Sehingga, lambat laun hal itu dianggap sesuatu yang tampak benar, sampai akhirnya mereka sendiri malu untuk disebut orang Samin.

Saminisme di Kelopoduwur dapat dipastikan telah punah. Tapi meskipun begitu, ketika Balairung bertemu dengan orang-orang keturunan Samin, toh mereka tetap bersahaja, sederhana, jujur dan apa adanya. Seringkali, mereka tidak menyadari kalau ada bekas-bekas Saminisme yang menyusun perilaku, budaya dan watak diri mereka.□

Lukman Hakim A.

"INDONESIA" Sebagai Cita-Cita Kebudayaan

Tulus Warsito
Perupa,Anggota Dewan Kesenian DIY

Perbincangan seputar persaingan budaya Barat dan Timur, terutama yang berkaitan dengan konsep kultural yang terbangun di negeri ini, bukanlah hal yang baru. Gejalanya, akhir-akhir ini mulai merebak di setiap sudut wacana-wacana sosial masyarakat luas. Dan bukan hal yang muskyil jika berbagai macam kolaborasi budaya akan deras masuk dan memberikan label baru bagi kebudayaan Indonesia. Selain itu, kalau mau menilik masa lampau, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, mengenainya, telah bermunculan perdebatan yang kemuidian menjadi wacana umum. Hanya saja, sebagai pengetahuan "generasi baru" (terutama bagi mahasiswa) tentang ini, masih selalu hangat. Walaupun bagi sebagian besar khalayak persoalan ini telah dianggap "selesai".

Lantas, yang terjadi kemudian adalah adanya semacam kerinduan dalam memahami sosok budaya asli yang sering muncul di sekitar persaingan Barat-Timur. Setidaknya ini diwujudkan dengan mengenali budaya Indonesia. Tentu saja dengan segala konsekuensi logis bahwa kita akan kembali mengusut benang sejarah untuk menjawab kerinduan itu. Lantaran hal ini pula, tampaknya perlu dikaji mengenai bentuk kebudayaan asli kita, dan apakah kita masih memilikinya? Atau, pertanyaan paling radikal yang perlu diajukan, apakah kebudayaan Indonesia itu ada?

NOWHERE CULTURE, AFI

Indonesia dan Budaya Barat

Konstelasi kebudayaan yang mempunyai legitimasi hukum sesungguhnya tercantum dalam proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. Hal ini secara tak langsung merupakan pernyataan tentang *keinginan bersama untuk membangun kebudayaan baru yang disebut sebagai Indonesia, yang berbeda dengan Hindia Belanda, berbeda dengan Majapahit, berbeda dengan Sriwijaya dan lain sebagainya.* Sebab, konsep negara dan pemerintahan republik, awalnya sebagai hasil produk dari Barat, maka kebudayaan baru yang dimaksud bermula dari konsep budaya Barat, walaupun sebagian dasar-dasar kebudayaan lokal juga menjadi bahan baku (*ingredient*) dari pengolahan kebudayaan baru tersebut. Dalam logika semacam ini, konklusi adalah bahwa kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan Barat juga. Setidaknya, kebudayaan dalam bentuk cita-cita bersama untuk berkehidupan bersama dalam sistem nilai yang sesuai dengan UUD 45, Pancasila, dan lain sebagainya.

Karenanya, jika kita menerima proklamasi kemerdekaan sebagai dasar bagi kehidupan bersama, berarti kita telah mengesahkan sebagian kultur Barat masuk ke dalam sistem budaya Indonesia. Persoalannya kemudian, mengapa kita harus menerima budaya Barat? Apakah budaya asli kita tidak cukup memadai untuk dipakai sebagai dasar membangun budaya asli?

Jawaban paling sederhana yang dapat diberikan adalah, konsep Indonesia memang konsep Barat. Karena, pada dasarnya bangsa kita telah terdedikasi selama berabad-abad dalam struktur bangunan kultur penjajah — bangsa Barat. Jadi, kalau mau sekedar mengeksploitasi "budaya asli" (kalaupun ada) tidaklah perlu dengan atribut Indonesia yang kita kenal selama ini. Celakanya, hingga saat detik-detik Proklamasi, tanah air kita telah lama menjadi ajang akulturasi budaya antar suku-bangsa, dan antar bangsa. Hingga tahun 1945, "situs" Indonesia yang kita kenali sekarang ini telah lama menerima toleransi campur-aduknya budaya. Dari budaya Jawa, Bugis, Melayu, Hindu Islam, Arab, Portugis, Belanda dan entah apa lagi yang lain.

Artinya, konsep Indonesia yang dicita-citakan oleh bapak pendiri Indonesia bukanlah sekedar sistem pemerintahan

republik saja, melainkan juga seluruh sistem nilai baru, sistem budaya baru, yang diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi nilai budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok warga negara Indonesia. Bukan sekedar budaya Jawa, bukan juga hanya budaya Islam, bukan semata-mata yang modern, melainkan seluruh komponen budaya yang ada dalam masyarakat baru yang namanya Indonesia.

Indonesia adalah masa depan

Jika konsep tersebut benar, maka timbul pertanyaan baru, lalu yang dimaksud budaya Indonesia itu yang mana? Apakah budaya Indonesia adalah yang sama sekali baru, yang harus berbeda dengan yang lama? Apakah budaya tradisional yang masih tersisa? Atau justru hasil akulturasi budaya?

Sebagai suatu cita-cita (idealita), kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dalam perspektif masa depan. Ia merupakan konvergensi seluruh komponen kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk yang tradisional, klasik, yang kontemporer yang cinta damai dan sebagainya, dan tentu sesuai dengan dasar negara dan konstistusi yang berlaku.

Satu hal yang perlu dicatat, dalam kaitannya dengan budaya Barat-Timur, idealita kebudayaan Indonesia mengadopsi keduannya dalam batas kesesuaian yang positif bagi berlangsungnya cita-cita Indonesia. Logikanya, tak mungkin suatu bangsa dapat eksis hanya dengan budaya Barat saja (walaupun di negeri Barat), ataupun hanya dengan budaya Barat-Timur saja (walaupun di negeri Timur). Sebab, komposisi yang diperlukan dalam tatanan kebudayaan suatu bangsa —seperti halnya ukuran politis, ekonomi, dan sosial, menunjukkan kompleksitas budaya, tanpa menegasi satu unsur budaya yang ada di dalamnya. Serta jangan lupa, seiring perkembangan jaman, berbagai variabel akan mempengaruhi pada tingkat perkembangnnya kelak. Seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini memustahilkan angan-angan semacam itu. Angan-angan tentang kebudayaan murni bangsa Indonesia.

Sebagai agenda akhir, tanggung jawab setiap generasi dari waktu ke waktu yakni sejauh mana komposisi Barat-Timur atau asli- campuran yang perlu atau bisa diramu dalam sosok kebudayaan Indonesia Kontemporer? Untuk itu senantiasa perlu dikenali atribut setiap komponen. budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini.

Sebagai perbandingan, dalam masyarakat Jepang yang homogen misalnya, ternyata dengan sedemikian rupa telah berhasil melestarikan budaya tradisional mereka, melalui teknik dan strategi budaya yang mereka terapkan. Sekaligus, Jepang dengan kebudayaannya menjadi salah satu pelopor kebudayaan modern di tingkat dunia, baik melalui dominasi teknologi canggih, maupun dengan eksperimentasi kesenian kontemporer yang sangat maju. Di lain pihak, contoh-contoh kepeloporan kebudayaan Amerika Serikat yang heterogen, membuktikan bahwa cita-cita bernegara-bangsa sekaligus dapat menciptakan dominasi kebudayaan baru yang mendunia. Pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru, kebanggaan nasional yang khas, sekaligus kesejahteraan nasional seperti yang dicita-citakan oleh konstitusi mereka.

Untuk mengenali sosok idealita budaya Indonesia seperti yang dicontohkan di atas, tentu diperlukan realita yang dapat dikenali saat ini. Upaya ini dapat dimulai dari (lagi-lagi) mempertanyakan: apakah komposisi budaya lokal-global, barat-timur, Jawa-non Jawa, yang ada dalam "budaya Indonesia sehari-hari" kita telah mencerminkan kesesuaian dengan arah yang dicita-citakan oleh idealita budaya Indonesia masa depan? Apakah "budaya Indonesia sehari-hari" kita telah menjadi kebanggaan nasional kita, memberi kesejahteraan kepada kita?

Kalaupun jawabannya "sudah", tentu kita ingin selalu membangunnya lagi untuk menjadi lebih baik. Sebab, membangun kebudayaan Indonesia masa depan sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara adalah upaya budaya yang tak akan pernah selesai. Ternyata ! ❐

RETJO BUNTUNG
100.55 FM

Ekopolitik Kapitalis

B. Rahardjo Sidharta
Alumnus Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
mahasiswa pascasarjana Marine Science Institute, College of Science, University of the Philippines, Filipina

Sistem perekonomian kapitalis tak dapat disangsikan lagi merupakan penyumbang utama terjadinya kemerosotan mutu lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara kapitalis, yang ditopang oleh industri, memanfaatkan sumber daya alam sebagai modal utamanya. Sumber daya tersebut sering digunakan tanpa mengindahkan keberlanjutannya sehingga terjadilah penurunan, baik mutu maupun keragaman lingkungan (baca: ekosistem).

Meningkatnya kesadaran manusia akan fungsi lingkungan dan sumber-dayanya memunculkan upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup atau dikenal sebagai ekopolitik (Sidharta 1997). Di berbagai negara kapitalis, ekopolitik telah menjadi sebuah agenda kegiatan yang tampaknya marak hanya pada saat kampanye politik berlangsung.

Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa gerakan ekopolitik di negara-negara kapitalis untuk memberdaya lingkungan tak menghasilkan apapun. Persoalan yang timbul kemudian adalah bahwa ekopolitik yang dijalankan tidak melibatkan berbagai negara. Teristimewa, negara miskin dan negara berkembang yang biasanya kaya akan sumber daya alam. Dengan kata lain, ekopolitik negara-negara kapitalis masih dihantui oleh pertimbangan untung-rugi secara ekonomis dalam menegakkan kelangsungan penggunaan sumberdaya alam.

Tulisan ini membahas latar belakang dan tujuan ekopolitik negara kapitalis serta dampaknya, baik terhadap lingkungan maupun perekonomian dunia serta penilaian terhadap ekopolitik (model) kapitalis.

Krisis Kapitalisme

Masalah mendasar dan utama yang dihadapi sistem ekonomi kapitalis adalah bagaimana mempercepat pengembalian modal dalam bentuk modal lain yang makin meningkat secara intensif dan ekstensif. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi kapitalis bertumpu pada penumpukan modal melalui daur modal-penanaman modal-modal (capital-investment-capital). Untuk memenuhi dinamika ini sebuah perusahaan, misalnya, akan melakukan produksi secara besar-besaran atau memproduksi barang dengan nilai tambah.

Tindakan demikian ternyata menimbulkan empat jenis krisis utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Keempat krisis tersebut adalah: ekologi (sumberdaya alam, lingkungan), penumpukan (barang), produksi, dan fiskal.

Memproduksi barang secara besar-besaran hanya dapat terjadi bila tersedia bahan dasar (baca: sumber daya alam) secara memadai. Di satu sisi hal ini berarti pemborosan sumberdaya tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, sehingga timbullah krisis lingkungan. Cara demikian, di sisi lain, bukannya mengurangi tingkat kemiskinan, tapi malah meningkatkannya.

Barang-barang yang telah diproduksi tidak jarang tidak segera dapat dijual, akibatnya hanya disimpan di gudang. Penumpukan barang (dan modal) semacam ini menyebabkan tidak terjadinya penanaman modal baru dan menurunkan keuntungan. Akibatnya terjadilah krisis penumpukan (modal dan barang) serta krisis produksi yang tidak diimbangi dengan kebutuhan atau pemakaian.

Sedang krisis fiskal timbul karena biaya sosial dan ekologi, yang berasal dari penumpukan modal, tumbuh lebih cepat daripada keseluruhan biaya produksi. Krisis ini akan menimbulkan ketimpangan neraca keuangan (fiskal) antara biaya produksi dan harga jual barang.

Keempat krisis utama ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar: Apakah ekonomi kapitalis akan berhasil mengatasi masalah lingkungan yang diciptakannya? Akankah sistem kapitalis menginternalisasikan masalah lingkungan, mengendalikan konsumsi, dan memupus penumpukan produksi melalui politik? Akankah kerusakan lingkungan dapat menghantarkan perubahan radikal dalam hal cara dan gaya produksi & quot ?; Pertanyaan-pertanyaan ini, tampaknya,

harus diperhatikan dengan serius oleh negara-negara kapitalis untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan pertumbuhan ekonominya, tanpa meninggalkan upaya untuk menjaga kesinambungan pemakaian sumberdaya alam.

Motivasi Ideal

Empat krisis utama dan tiga pertanyaan mendasar di atas melatarbelakangi munculnya gerakan ekopolitik di negara kapitalis. Motivasi ideal gerakan ekopolitik tersebut didasarkan atas masalah keadilan (terutama keadilan antargenerasi dalam menggunakan sumber daya alam) dan estetika-moral (termasuk hak moral mahluk hidup lainnya).

Dengan demikian, ekopolitik dalam sistem ekonomi kapitalis sebenarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik bagi generasi berikut, maupun mahluk hidup lainnya (juga sumber daya alam & quot; tak hidup ").

Bila keadilan ini tercapai, maka keberlanjutan sumber daya pun akan terjaga dengan baik. Hal ini berarti ekopolitik harus berhadap-hadapan dengan sistem politik-ekonomi kapitalis yang senantiasa bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonominya (baca: menangguk keuntungan sebesar-besarnya).

Sistem politik-ekonomi kapitalis melalui jaringan usaha multi/transnasionalnya (Multi-/Transnasional Corporation= M-/TNC), yang tak lagi mengenal batas-batas kedaulatan negara, memiliki " kekuasaan & quot; lebih besar dalam mengatur perekonomiannya dibanding negara. Sering kali kebijakan perekonomian yang ditempuh oleh sebuah M-/TNC tidak perlu meminta persetujuan dan pertimbangan sebuah negara. Selain itu, lobi yang dilakukan M-/TNC lebih banyak berhasil daripada upaya kelompok masyarakat pembela lingkungan dan politisi, terlepas dari aneka macam cara yang dipergunakan kelompok M-/TNC dalam memenangkan lobi tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, ekopolitik di negara kapitalis memerlukan intervensi pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meyokong ekopolitik, yakni: menerapkan pajak pemakaian barang, perundangan, pengaturan dan pemeriksaan, pemantauan dan penelitian, serta subsidi dalam pengendalian pencemaran. Akan tetapi, hal-hal tersebut bukannya tanpa masalah. Masalah yang timbul, misalnya pemajakan, sering malah membebani kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Implikasi dan Dampak

Implikasi ekopolitik kapitalis seperti dibahas di atas tampaknya masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Masyarakat kelas bawah dan sumber daya (baca: lingkungan) masih belum memperoleh keadilan, seperti yang dicita-citakan semula.

Sering kali, bahkan, ekopolitik kapitalis hanya memindahkan persoalan lingkungan dari negara kapitalis ke negara dunia ketiga melalui tangan-tangan gurita bisnis M-/TNC-nya. Lihat saja bagaimana berbagai M-/TNC merambahi negara dunia ketiga yang kaya akan sumber daya alam dan menguras habis sumber daya itu, meski mungkin di negara asal M-/TNC itu sendiri tidak kalah kekayaan sumber dayanya. Di Indonesia beberapa perusahaan M-/TNC supermega seperti Freeport Incorporation (mengeruk bijih tambang tembaga dan emas di Irian Jaya), Caltex (menyedot kekayaan minyak bumi di berbagai kawasan di Indonesia) serta banyak perusahaan/ industri perikanan Jepang dan Taiwan (menguras habis ikan di perairan laut nusantara dengan kapal-kapal canggih mereka).

Jadi, dengan kata lain, ekopolitik semacam ini belumlah memiliki pengaruh yang mendunia (global). Oleh karenanya, mungkin perlu dicari lagi sebuah ekopolitik lain yang lebih sempurna. Sebagaimana halnya dunia politik yang mengenal budaya tandingan sistem kapitalisme, yakni sistem sosial-demokrasi, maka mungkinkah memunculkan ekopolitik yang sosial-demokratis? Atau mungkinkah pula sebuah ekopolitik ala Pancasila?

Wasana Kata

Krisis moneter yang tengah melanda Indonesia ternyata justru turut meningkatkan kerusakan lingkungan. Satu hal yang mendorong pernyataan tadi adalah terjadinya peningkatan pembuangan limbah industri sebesar 15% pada beberapa sungai yang termasuk program Prokasih (Afsah 1998). Meningkatnya pembuangan limbah disebabkan meningkatnya biaya daur-ulang serta menurunnya dana pemerintah untuk melakukan pemantauan secara teratur akibat krisis moneter.

Banyak orang beranggapan bahwa selama terjadi krisis moneter kerusakan lingkungan akan menurun secara berarti (*significant*). Namun, karena pengaruh sistem ekonomi kapitalis maka produksi tetap dilangsungkan demi untuk memutar modal disetor. Di lain pihak banyak industri yang tidak mengoperasikan alat pendaur-ulang limbah karena mahalnya biaya penggunaan alat tersebut.

Sudah waktunya gerakan ekopolitik mewujud di bumi Indonesia,terutama di masa reformasi seperti ini, ketika banyak partai politik bermunculan. Keberadaan sebuah partai politik di Indonesia yang memperjuangkan pemberdayaan lingkungan tentu diharapkan benar-benar dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Bila hal itu memungkinkan, maka pertanyaan berikut yang muncul, barangkali, adalah model ekopolitik manakah yang hendak diterapkan: kapitalis, sosial-demokratis atau Pancasila.❐

Bagong Kussudiardja:

"...Menteri, Presiden *Nggak* Tahu Seni..."

Kreatifitas terasah dari mana saja. Saat realitas sosial menghendaki, ketika alasan-alasan ekonomi menghambat, Bagong kecil terus bertahan menggambar walaupun tidak mampu membeli *konte*. Ia mengumpulkan *langes*, serbuk hitam pekat dari cerobong asap kereta api, bersusah payah memanjat gerbong yang sedang langsir di stasiun Lempuyangan. Bahkan berjualan *theklek* dan *kelom* di pasar Ngasem pun pernah dijalaninya.

Lahir di lingkungan ningrat keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kental dengan kehidupan seni, Bagong mengenal seni rupa dan seni tari sejak awal. Di masa kecilnya, tembok *mbasahan* Mangkubumen yang membentengi rumahnya pernah menjadi kanvas panjang yang mengabadikan coretannya, cikal bakal lukisan-lukisannya yang kini terkenal dan dikoleksi sampai di luar negeri. Ia terbiasa menyaksikan eyang dan ayahnya menari, sedang ibunya tekun membatik. Berawal disini, hadirlah nama besar sang seniman, penari, pelukis, perupa dalam pentas kehidupan seni Indonesia.

"Buat saya, seni adalah hidup itu sendiri. Saya tumbuh, berkarya dalam seni. Ini yang saya bisa, ya saya hadirkan untuk sesama, juga untuk saya sendiri. Lha...ini yang saya kenal sejak kecil. Hingga kemudian, muncul padepokan seni tari ini."

Ada yang khusus dengan padepokan seni ini, pengajarannya mungkin?

Ya...di sini kan intinya belajar berkesenian. Ada pelajaran dasar kreativitas, artinya tidak hanya meniru, tapi semua yang *nyantrik* di sini diharuskan untuk menciptakan tarian kreasinya sendiri. Tarian itu harus menjadi ekspresi diri seorang seniman. Semuanya harus mempelajari dasar tari dari awal, supaya rata. Walaupun ada yang sudah menguasai tari. Beginilah sistem saya...

Ada materi-materi tambahan selain sekedar teknis menari?

Ada materi sejarah, produksi tari dan macam-macam. Juga diarahkan untuk mampu mengolah rasa dan pikiran, supaya jernih, tenang. Gampang kok berkesenian. *Kaya'* orang *berak*, ya keluar.

Semudah itu?

Ya, mengapa tidak, yang penting percaya Yang di Atas saya diberi saya kerjakan. Berkesenian itu kan soal *roso*, hati. Tanpa itu, dengan hanya mengandalkan otak, seni jadinya tak berjiwa, steril.

Bagaimana pandangan Anda terhadap seni yang politis?

Saya setuju, karena memang pada dasarnya seni itu sudah mengandung

muatan politis. Karena tumbuh dalam masyarakat, wajar bila kemudian berjalan seiring dan membawa pesan dari khalayak. Dalam menempatkan dirinya lewat kepentingan kepentingan seperti ini tentu saja seni itu harus jujur.

HERY TRIANTO

Bagaimana dengan senimannya sendiri?

Tentu saja ia terlibat pula dengan kepentingan-kepentingan itu, melalui karyanya. Karena seniidentik dengan dirinya, kreasinya sendiri.

Bagaimana dengan alasan politis terjadi pencekalan?

Kesenian itu, kalau diberi batasan-batasan yang sifatnya berat sebelah, ya akan berkurang kebebasannya, dan terhambat pula perkembangannya. Hasilnya pun tidak tuntas. Ini yang kadang-kadang membuat seniman itu frustasi. Saya pribadi sangat mendukung deklarasi manifesto seniman-seniman Yogya, termasuk Butet, Darmanto, Landung, Djaduk, yang menggugat pencekalan karya seni dan menghambat perkembangan seni dengan pajak pertunjukan yang tinggi, misalnya.

Bagaimana ketika dulu di jaman orla, kelompok kesenian dan seniman terbagi dalam dua kelompok, lekra dan manikebu?

Waktu itu saya masuk dalam LKN (Lembaga Kebudayan Nasional), dibawah PNI. Saya sangat tidak suka jika seni dan seniman dikotak-kotakkan menurut kepentingan penguasa.

Kesenian itu, kalau diberi batasan-batasan yang sifatnya berat sebelah, ya akan berkurang kebebasannya, dan terhambat pula perkembangannya. Hasilnyapun tidak tuntas.

Mengamati perkembangan seni dalam masyarakat, Anda melihat ada hambatan-hambatan, misalnya pengaruh dari luar yang sering dipermasalahkan?

Kalau pengaruh luar, ya wajar saja. Siapapun juga bisa terpengaruh. Itu juga yang saya alami setelah saya pulang belajar dari luar negeri. Tapi setelah itu, kalau kita jeli memilah-milah, akhirnya kita sadar kalau budaya yang kita punya itu lebih kaya.

Jadi kalau dikatakan mandeg, sebabnya kenapa?

Ya itu kelemahan kita, malas. Malas menggali apa yang sudah ada, yang sudah kita punya. Seolah olah yang dari luar itu sudah cukup, sudah hebat. Satu contoh, mainan anak-anak itu, sekarang sudah jarang, lima tahun lagi saya kira sudah nggak ada lagi.

Kalau kita jeli dan selektif, ada pengaruh luar yang inspiratif, menimbulkan dorongan-dorongan baru untuk bekerja lebih keras lagi, itu saya rasakan dari pengalaman saya belajar di luar negeri.

Mencintai seni, bagi Bagong berarti terus berusaha mengembangkan sekaligus menumbuhkannya dalam masyarakat dari waktu ke waktu dan memaknainya sebagai ruh yang melekat dengan diri seorang seniman.

Butet: Bapak itu Sangat Golkar...

BAMBANG. P

Sebagai seorang anak sekaligus sesama seniman, hubungan seperti apa yang kemudian terbentuk?

Satu hal yang tak bisa saya elakkan dalam hal hubungan biologis dan psikis, bagamanapun saya anaknya. Saya harus bisa memposisikan diri seproposional mungkin. Saya bisa paham, sebagai seorang ayah, kondisi psikologisnya adalah psikologi kecemasan. Kadang muncul ketika melihat orientasi saya dalam berkesenian. Dia cemas. Padahal kalau dia sedang berposisi sebagai seniman, ya mestinya *nggak* begitu. Dilema dan kontradiksi semacam ini memang sering muncul pada Bapak dan juga pada saya. Kalau saya membantah, artinya saya memposisikan diri sebagai seniman yang kedudukannya sejajar. Kadang kita bisa terlibat dalam dialektika pemikiran, bahkan perbedaan pendapat.

Bagaimana mengontrol agar hubungan antar seniman tidak mengganggu hubungan ayah dan anak?

Ya, dilemanya begitu. Pernah saking tajam konfliknya, saya tidak mau bertemu dengan bapak. Marahnya habis-habisan. Tapi paginya, saya temui dia sebagai anak, tanpa membicarakan konflik tadi, ya cair lagi. Begitu pula bapak. Jadi kita bicara soal-lain, seperti keluarga, lukisan bapak....kesehatan. Hal ini terjadi pula pada Djaduk,

Untuk itu, ia giat memacu kreativitasnya melalui kreasi tari-tarian yang variatif dan sama sekali baru.

"Tarian klasik itu, ya tari tradisional yang sudah jelas pakemnya, aturannya, jadi sudah tidak boleh di ubah lagi. Sudah statis. Statisme dalam tradisi itu yang menghambat dan mengikat seniman, sehingga tidak bisa bebas mengekspresikan dirinya. Karena itulah kemudian digagas tari modern."

Perbedaan mendasarnya dimana?

Seni tari modern itu kan lebih personal sifatnya, karena lahir dari kreasi si seniman itu sendiri, jadi semacam karya individual. Selanjutnya tari modern ini, tatanannya terus berubah dan diperbaharui.

Ketika muncul benturan, apa yang membuat Anda tetap bertahan?

Saya bertahan karena saya yakin kesenian harus terus berkembang. Yang klasik tetap saya pelajari. Tapi kalau saya menggugat seni, ya semau saya. Karya saya ini terus berubah, dipengaruhi pengalaman, lingkungan dan suasana. Pengalaman hidup saya yang terus berkembang mempengaruhi karya seni saya. Yang penting, jangan sampai statis.

Apa Anda melihat ada yang statis dalam perkembangan seni?

Banyak, bahkan termasuk usaha kita mengapresiasi seni. Contoh kongkritnya, ya UGM ini. Universitas tertua di Indonesia, tapi tidak pernah memberikan gelar *honoris causa* kepada seniman. Padahal banyak sekali seniman yang tumbuh dan digodok di Yogya, di lingkungan UGM. Masa kita *keduluan* universitas Singapura, dalam memberi pengakuan kepada seniman kita sendiri. Tidak perlu hadiah materi yang besar, yang penting adalah pengakuan, penghargaan kita terhadap seniman itu sendiri dan terhadap hasil karyanya. Ini akan memicu perkembangan seni.

HERY TRIANTO

juga pada saudara-saudara yang lain. Selain itu biasanya antar seniman ada suasana kompetitif. Begitu pula saya dengan bapak. Saya tidak mau jadi bayang-bayangnya, kesenian saya harus beda, karena ada kompetisi yang membakar gairah.

Ini juga menjadi bagian dari pendidikan yang diterapkan Pak Bagong pada putra-putranya..

Ya, tentu. Dulu pernah waktu kecil saya menyaksikan bapak mengajar muridnya, dan pada saat itu beliau memberi wejangan, jangan mau jadi Bagong-Bagong kecil, jadilah lebih baik dari Bagong. Sebagai seniman harus banyak bergaul, itu yang saya ingat benar. Nah, bapak itu berbicara sebagai seniman yang ingin mendorong kreativitas anak didiknya, bukan sebagai ayah. Kadang dia lupa itu. *Lha* saya ya bergaul kemana-mana. Ketika kemudian ia menawarkan pada saya untuk mengelola padepokan, saya menolak. Saya paham naluri bapak yang ingin anaknya meneruskan apa yang sudah dirintisnya. Itu manusiawi.

Apakah posisi sosial Pak Bagong sebagai seniman berpengaruh dalam mendidik anak?

Sebenarnya sama saja, perbedaannya mungkin pada toleransinya yang besar terhadap anaknya. Dulu bapak *kan* anak didik Ki Hajar Dewantara , jadi konsep Tut Wuri Handayani benar benar dijalankannya. Bapak sama sekali nggak suka ikut campur, mengarah-arahkan, juga dalam pendidikan. Biasanya setelah kebentur, baru di tolong. Jadi kita belajar dari kesalahan. Sampai pada persoalan hidup seperti kawin, saya kawin muda, ya nggak apa-apa.

Penilaian Mas Butet terhadap karya bapak?

Ya ...ini juga bagian dari perdebatan saya dengan bapak. Bapak meyakini bahwa kesenian adalah alat untuk mencari kehidupan, sedangkan bagi saya adalah ekspresi kehidupan saya tidak mau cari makan dari kesenian saya. Ketika saya berkesenian, saya tidak ngomong ini alat untuk mencari kehidupan. Ini alat untuk mengeskpresikan kehidupan saya. Laku atau tidak, tidak masalah. Kehidupan saya sendiri cukup mapan, di luar kesenian. Menurut bapak, ini *nonsense*, bohong. Saya ingin membuktikan pada bapak bahwa teori saya itu benar. Kalau kesenian hanya dijadikan sebagai alat mencari kehidupan, bahaya, karena hanya memperhatikan produktifitas. Yang akan mengabaikan, aspek selektifitas. Artinya, kalau kita katakan bahwa, sesuatu yang bermutu, yang kental, realisasi dari suatu pemikiran. Bagaimana karya yang bagus itu bisa lahir dari sesuatu yang rutin. Produktifitas dan semangat bapak memang tinggi, terus melukis dan mencipta. Tapi

Saya mengamati hal ini, dulu saya pernah lama terlibat sebagai anggota dewan penyantun UGM. Ini tidak hanya di UGM, penguasa-penguasa kita saja, sekarang ini tidak mengerti seni. Mulai dari lurah, camat, walikota, menteri sampai presiden, nggak tahu seni.

Padahal tahun ini dicanangkan sebagai tahun seni dan budaya...

Kalau sekedar mencanangkan sih, bisa setiap hari. Itu *'kan* cuma slogan. Bangsa kita ini kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Bangsa kita ini masih dalam proses mencari, belum benar-benar menemukan budaya Indonesia. Prosesnya sedang berjalan, makin lama makin cepat. Asimilasi budaya misalnya. Di sini kita perlu punya idealisme, mulai dari masing-masing pribadi. Sekarang itu yang kurang, semuanya menempuh jalan pintas. Anak muda sekarang maunya selesai kuliah bekerja dengan gaji besar, hidup mapan. Tanpa idealisme, ya jadinya *unthul-unthul*. Kalau jadi dosen ya dosen yang *unthul-unthul*.

Bagaimana dengan Anda sendiri?

Idealisme seperti ini yang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Saya memilih tinggal di desa, beli tanah masih murah, tenang, punya kelebihan sedikit yang saya wujudkan menjadi padepokan seni.

Kreativitas dalam mengekspresikan pemahaman dan perjalanan hidupnya tidak hanya berwujud dalam gerak tubuh dan sapuan kuas. Periode 70-an dan 80-an, Bagong banyak menulis sajak, yang dibukukan dalam *Kidung*.

...penguasa-penguasa kita saja, sekarang ini tidak mengerti seni. Mulai dari lurah, camat, walikota, menteri sampai presiden, nggak tahu seni.

Hidup sendiri sepeninggal sang istri, ia menjalani hidupnya dengan rutinitas yang cukup padat. Setiap pagi, pk. 7.30 berangkat dari rumahnya di Jl. Singosaren, menuju padepokan di desa Kasihan, Bantul. Biasanya setelah sarapan pagi dilanjutkan dengan melukis. Ia masih mengajar tari, walau frekwensinya sudah berkurang, dan terkadang juga disibukkan dengan kehadiran tamu-tamunya, wartawan, kolektor lukisan, atau peminat seni. Bila lelah, ia memilih bersantai di teras rumahnya yang nyaman, mendengarkan kicau burung-burung piaraannya. Prinsip hidupnya sederhana.

"*Semeleh*.....jadi orang yang semeleh, dalam hidup juga dalam berkesenian. Rileks, tapi bukan berarti malas. Gampang kok. Saya pekerja seni, pencinta seni, yang diberi kelebihan sehingga mampu melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan setiap orang. Anugrah itu saya syukuri. profesi ini. Saya jalani, harapan saya hanya damai. Bagi saya juga bagi seniman-seniman lain, sehingga bisa terus berkarya. Saya masih punya banyak rencana, yang masih dalam perenungan dan pemikiran."□

Eka Rinanda Ridwan
Hery Trianto

paling hanya satu atau dua, dari seratus karya, yang benar-benar terbaik. Saya sendiri, kalau akan melahirkan karya yang kental, biar setahun sekali, nggak masalah, *wong* saya nggak hidup dari kesenian saya *kok*. Maunya saya ya...dari suatu pemikiran yang intens, yang serius akan muncul karya yang 'bunyi', *nempel* dalam sejarah. Tidak asal mencipta.

Lingkungan masa kecil Anda sangat kondusif. Bagaimana pengaruhnya dengan keterlibatan dalam dunia seni?

Lingkungan dimana kita tumbuh itu akan sangat mempengaruhi, karena fasilitas-fasilitas di masa kecil bersinggungan dengan pola pikir. Sejak *mbrojol*, saya sudah mendengar bunyi gamelan, setiap sore melihat orang menari, menyaksikan bapak melukis, ya...beginilah saya sekarang. Ini saya syukuri. Obsesi-obsesi yang terbangun pada masa kecil saya ya...obsesi berkesenian. Tanpa atmosfer seperti ini jadinya akan lain.

Bagaimana pendapat bapak, ketika Anda terlibat dalam perjuangan reformasi?

Bapak itu sangat Golkar, militer, dan terkooptasi. Ia ikut serta dalam program-program pengkultusan Soeharto. Ya, dulu saya ikut saja dalam program-program bapak. Tapi ketika saya sampai pada titik kesadaran, saya mengambil sikap. Dan itu saya tunjukkan dalam pertunjukan-pertunjukan saya, bahwa orientasi kesenian saya ya seperti ini. Mengambil jarak dari keseniannya yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik. Keterlibatan saya itu merupakan satu dilema. Ketika Tempo dibredel tahun '94, saya sudah ingin angkat bicara, tapi pada saat itu bapak dan ibu saya sakit. Sehingga saya memilih tidak terlibat. Tapi sekarang keadaannya kan sudah beda. Akhirnya bapak pun paham, tapi sebelumnya bapak tidak pernah mau menonton, baru dua hari yang lalu bapak bilang, "*Kowe gawe kaset yo...Tak rungokke...*"

Tapi bapak tidak menunjukkan antipati?

Akhirnya bapak mengakui bahwa saya tidak keliru bahkan kemudian bapak membuat menciptakan tari *Sanggit*. Bisa memikirkannya sudah aneh, *wong* temennya banyak yang tentara. Ketika saya manggung di Semarang, paginya, Pangdamnya datang ke Padepokan dan saya diundang tapi saya nggak mau datang. Saya bilang aja sibuk.

Apa yang paling Mas Butet kagumi dari bapak?

Ya etos, etos kerja disiplin dan semangat. Sebagai seniman juga sebagai seorang ayah. Sebagai seniman, ia berusaha mendudukkan diri sebagai mahluk sosial yang konvensional.

Bapak juga sangat memperhatikan keluarga. Satu hal yang saya amati, dulu, saya lihat sendiri, banyak teman-teman bapak yang mengatasnamakan kesenimanannya untuk menelantarkan anak-istrinya. Bapak *nggak* begitu. Tidak mempunyai arogansi sebagai seorang seniman yang sok penting.□

Eka Rinanda Ridwan
Bambang

IPWI

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI

Akreditasi:

S.K. Mendikbud No. 79/D/0/1993

Manajemen Pemasaran
Manajemen Keuangan
Manajemen SDM

Kuliah diselenggarakan dengan **Sistem Satuan Kredit Trimester (SKT).** Metode belajar mengajar adalah **Intensif dan Partisipatif,** dengan memanfaatkan berbagai teknik seperti: diskusi kelompok, pembahasan kasus, tugas kelompok, dan tugas individu. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibina dan dilatih oleh tenaga pengajar profesional, bergelar profesor, doktor, dan master, dari kalangan akademisi maupun praktisi, serta staf profesional yang sangat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

Persyaratan:

@ Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 yang dilegalisir sebanyak 2 lembar (PTS oleh Kopertis)
@ Mengisi formulir pendaftaran dan daftar isian .
@ Pasfoto ukuran:
2 x 3 sebanyak 6 lembar
3 x 4 sebanyak 6 lembar
4 x 6 sebanyak 6 lembar
@ Fotokopi KTP sebanyak 2 lembar
@ Biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00
@ Biaya matrikulasi sebesar Rp 100.000,00
@ Lulus seleksi tertulis/ matrikulasi.

Waktu kuliah

Pagi	09.00-18.00
Malam	18.30-21.30
Intensif Sabtu	09.00-18.00
Minggu	

Info selengkapnya hubungi: Adhi Graha Lt. 14 Jl. Gatot Subroto kav. 56 Jakarta
Telp. 5265266 (Hunting) Fax. 5265270, e-mail: btc@. indo. net. id

KOLOM

TENTANG KEKERASAN

Ajianto
Kepala Litbang Balairung UGM

Kekerasan memang abadi.Menjadi pujaan dan cacian. Abad ke 19,tokoh anarkis rusia Bakunin dalam jargonnya pernah mengatakan :" *Marilah kita menaruh kepercayaan terhadap sumber kreatif abadi dari kehidupan. Dorongan untuk menghancurkan juga merupakan dorongan yang kreatif*". Stalinpun pernah memakai kekerasan sebagai propaganda pembebasannya. Revolusi prancis yang dimulai sekitar tahun 1789 juga memakai kekerasan dalam pembentukan peradaban yang lebih maju.Kaum anarkis seperti Joseph Proudhon, Peterkroptkin sedikit banyak telah memainkan perannya. Amerika serikat, kekerasan juga berperan dalam melakukan transformasi sosial, bahkan lahirnya gerakan alternatif pada tahun 1960-an seperti feminisme, kaum gay, gerakan anti perang dan kebebasan awalnya juga diilhami dari keadaan yang penuh dengan kekerasan. Tetapi di sisi lain kekerasan seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan manusia. Ahimsa, ajaran Mahatma Gandhi sempat menjadi tawaran menarik untuk menentangnya. Begitu pula gerakan moral yang dilakukan Ibu Theresa.

PICTURE OF HARDNESS, AFI

Kekerasan memang dapat muncul dimana saja. Hal ini disebabkan karena permasalahan psikologis dan sosiologis

Dari sisi psikologis, kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain sangat tinggi. sikap tersebut menjadi titik picu awal sebuah kekerasan. Rasa ingin menang, menguasai, populer, pada akhirnya membentuk manusia pada ruang terkotak kotak yang mereka ciptakan sendiri. Ada benarnya jika Karl Marx mengatakan bahwa " *pada dasarnya manusia adalah individu yang serakah*".

Dari sisi sosilologis, Kekerasan juga tercipta karena persoalan struktural. praktek imperialistik, salah satu contoh persoalan tersebut telah melahirkan sistem yang diskriminatif dan menempatkan manusia pada sikap frustasi sosial. Penghisapan, pembunuhan, dan bentuk penindasan lainnya mendorong manusia untuk berontak, dan melakukan kekerasan. Seperti yang dikisahkan pada salah satu bagian memoir Hoakiau Di Indonesia, Pramudya Ananta Toer, tertulis " *persoalan diskriminasi tidak hanya pada persoalan rasialis, tetapi persoalan religi dan sosial pun dapat menjadikan diskriminasi , yang akhirnya menjadi anak yang sah dari sebuah imperialisme."*

Di sisi lain seperti nasionalisme chauvinis, agama dogmatis, fasisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, bahkan humanisme sekalipun, juga memiliki kekerasan dengan bentuknya masing- masing. Bisa jadi semua bentuk aliran dan ide-ide yang terlembaga mengakibatkan kekerasan.

Bangsa Yahudi dikejar dan dibunuh hanya karena dianggap bangsa yang hina oleh ras Aria dan Nordik, terutama pada masa Hitler. Afrika Selatan dan Australia pernah menyingkirkan bangsa asli setempat karena perbedaan warna kulit. Kaum paria mendapat perlakuan tidak adil dari kasta yang lebih tinggi tingkatannya. Feminisme militan yang merendahkan ibu rumah tangga juga berakhir dengan kekerasan.

Dunia tak berubah.Kekerasan abadi. Negeri kita pun tak terelakan dari kekerasan. Gara -gara tidak diberi uang saku seorang anak tega membunuh ibunya. Demonstran harus mendapat pentungan aparat karena dianggap mengganggu ketertiban, pers dibredel, gerakan kerakyatan dicap komunis, perkosaan,kasus santet, bahkan berita tentang kerusuhan sudah tak asing lagi di telinga bangsa kita.

Jika kita lihat lagi lebih jauh , kekerasan sebenarnya berawal dari macetnya proses sosialisasi. Hal ini bisa dipahami karena besarnya muatan kepentingan dari tiap - tiap individu, disamping itu pula peran teknologi juga mempengaruhi proses sosialisasi tersebut.

Semakin canggihnya kemajuan teknologi, disadari atau tidak telah mendorong manusia ke arah kekerasan.Film - film " Hollywood" yang sering terpampang di TV dan layar lebar juga memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam menciptakan rangsangan manusia menciptakan kekerasan.

Di samping itu pula kekerasan juga dapat terjadi akibat budaya. Feodalisme, sebagai salah satu budaya kekerasan yang terus terpelihara sampai sekarang.

Atas nama rasionalisasi tujuan yang lebih " mulia" Kekerasan seringkali dipilih sebagai metode penyelesaian permasalahan. Jika demikian halnya, kekerasan teramat sulit untuk dihindari. Hanya saja yang perlu dicermati adalah sebuah kepentingan atau tujuan apakah dibalik " bungkus " kekerasan dilakukan.

Kekerasan datang dan pergi. Mengisi ruang- ruang kosong yang belum sempat terjamah. Kegelisahan seputar kekerasan terus bergulir. Perdebatanpun tak pernah selesai.❐

Menjadi Seni Komedi

Komedi, dan sejuta tawa. Tanpa disadari menyimpan energi yang kemudian menjadi stimulator pada penontonnya akan realita kehidupan pun merupakan sarana paling efektif untuk menyampaikan pesan sosial. Sekaligus karya seni sastra ini mencatat evolusi serjarah bangsa melalui temanya yang selalu kontekstual.

Bayangkan hidup di dunia tanpa pernah tertawa. Tentu sangat menyedihkan atau bahkan mengerikan. Karena tertawa merupakan salah satu bentuk pelepas ketegangan, di samping sebagai bahasa sosial. Tertawa juga menjadi simbol hakikat manusia (*animal symbolicum*) yang menjadikannya sebagai mahluk sosial (*homo socialis*). Artinya, tertawa mengandung nilai hakiki kemanusiaan, di mana selain sebagai mahluk yang berfikir, manusia juga mahluk tertawa (*homo ridens).* Ini menjadi bukti bahwa manusia sadar akan jiwanya. Banyak makna yang dapat diungkapkan oleh tertawa, dari persoalan kekuasaan, perasaan jijik, sampai luapan kasih sayang. Tentunya, semua itu diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda-beda.

Berbicara tentang tertawa, perhatian kita langsung tertuju pada komedi atau humor yang menjadi sinergi agar orang tertawa. Tertawa yang dihasilkan melalui proses, dan selalu berkonteks sosial. Konteks sosial yang dimaksudkan, secara utuh dan menyeluruh terdapat di dalam komedi yang dipertunjukkan kepada penonton (drama komedi). Unsur penampilan kemudian menjadi hal yang sangat penting sebagai kekuatan yang mengundang tawa, selain unsur-unsur drama lain (plot, watak, wacana, lagu dan gerak) yang dirangkai menjadi seni yang sesuai dengan tuntutan budaya masyarakatnya. Dengan demikian, komedi menjadi sebuah bentuk penyajian dari humor. Sementara humor yang merupakan bagian dari seni sastra ini termasuk ke dalam *folklore* (kisah). Yaitu, bagian dari kebudayaan yang sifatnya lisan dan anonim, seperti cerita rakyat.

Komedi, dari yang terlupa

Sejarah mengenai komedi kurang diketahui. Tetapi pada perkembangan berikutnya, komedi dimaksudkan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap buruk dan aneh. Karena sifatnya yang mencemooh, komedi bisa mengundang tawa. Dalam *poetika,* --studi sastra tertua yang dipelopori oleh Aristoteles--, dijelaskan bahwa komedi menemukan bentuknya yang baku setelah kemunculan para penyair komedi. Mereka bergeser ke bentuk puisi yang dilengkapi dengan unsur-unsur prologia, plot, pemain dan topeng dalam pertunjukannya menjadi bentuk drama. Dari *poetika* tersebut juga diketahui, komedi yang bersumber dari satire *Margites* dengan tragedi yang berasal dari epos *Odysseus* dan *Ilias* ibarat dua sisi dalam mata uang yang sama. Keduanya menjadi sebuah karya yang lebih lengkap dan bernilai tinggi ketimbang epos dan satire biasa karena dapat dinikmati dan dipahami maknanya dengan mudah. Dalam perkembangan selanjutnya, perpaduan ini terus muncul dan akhirnya menggeser kedudukan epos dan satire.

Di Indonesia, terutama di daerah Jawa, komedi berasal dari sebuah tradisi khusus. Tradisi ini menjadi pola bagi para komedian yang --dalam perkembangannya-- tampak terinspirasi oleh dagelan mataram. Di daerah-daerah lain, seni komedi memiliki bentuk dan ciri tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya.

Perkembangan komedi memang sangat ditentukan oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, karena komedi selalu memiliki konteks sosial dan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Perkembangan tersebut menjadi indikator untuk mengetahui keadaan masyarakat dan kondisi yang terjadi.

REPRO: FORUM

Sebuah pertunjukan komedi.
Soal suksesi pun bisa mengundang tawa.

REPRO: FORUM

Dedi Gumelar

"Perkembangan komedi itu menjadi indikator kedewasaan suatu bangsa, apalagi kalau kita sudah bisa menertawakan diri sendiri. Itu sudah sangat dewasa sekali tanpa kita harus merasa malu. Pengaruhnya itu sangat besar," ujar Dedi Gumelar, salah seorang anggota kelompok lawak Bagito.

Supaya komedi bisa berkembang, kedewasaan dari seluruh lapisan masyarakat memang amat dibutuhkan. Teristimewa, *political will* pemerintah dalam mendorong proses kreatif seseorang tanpa larangan-larangan yang sebenarnya bisa mematikan proses itu.

Menurut Prof. Dr. James Dananjaya, komedi dapat muncul dalam kondisi politik yang tertutup, di mana kontrol dan sensor diterapkan secara ketat. Padahal di sisi lain, masyarakat amat membutuhkan katarsis untuk penyalurannya. Maka komedi kemudian bisa muncul dari situasi ini. Manifestasinya bisa dalam bentuk anonim secara spontan, ataupun dalam bentuk sindiran-sindiran halus.

"Ada semacam *gentleman agreement* yang tidak boleh diganggu gugat. Padahal kalau pemerintah bijaksana, hal-hal semacam itu lebih baik dibiarkan saja karena dapat menimbulkan masalah-masalah sosial," papar James yang mendalami *folklore* ini.

Lebih lanjut, James yang juga dosen Antropologi UI ini mengatakan, jika saluran-saluran itu dibuka dan orang bisa menyalurkan aspirasi melalui saluran resmi, maka komedi atau sindiran tidak akan dipakai lagi.

Sementara menurut Andre Hardjana, dilihat dari tradisinya, humor atau komedi dibedakan atas budaya elit dan budaya rakyat. Hanya saja di dalam budaya elit, komedi menjadi terbatas dan seolah-olah tidak mendapat tempat. "Komedi dianggap mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas dibicarakan atau di luar konteks. Dan budaya adiluhung itu hanya terbatas pada konteks hubungan yang bersifat transendental. Pada akhirnya komedi lebih berkembang menjadi budaya rakyat," tutur ahli komedi yang mengajar di Universitas Atmajaya Jakarta.

Ketika ditanya perihal seni komedi yang berkembang menjadi komoditi yang dikomersilkan, Andre Hardjana mengingatkan, "Satu hal yang harus disadari bahwa komedi hanya dapat hidup di negara yang demokratis. Itu artinya bahwa dalam kondisi apapun komedi harus tetap kritis terhadap lingkungannya."

Salah satu yang tampak dari perkembangan komedi adalah munculnya komedi situasi. Bagi James Dananjaya, komedi situasi sebenarnya merupakan konsep lama yang terpola, dan selalu muncul berulang-ulang kali hingga akhirnya menjadi suatu *pop culture*. Meskipun konteksnya adalah hal-hal yang aktual, tetapi komedi situasi tidak bisa bertahan lama seperti halnya *folklore*. Munculnya komedi situasi di tengah masyarakat industrialis sebenarnya merupakan fenomena yang wajar. Sebab, di masa modern saat ini banyak muncul gejala keseragaman (*malady of sameness, our modern malady*), dan otonomisasi yang membuat manusia tidak peka terhadap diri dan lingkungannya. Komedi kemudian hadir menghilangkan kejenuhan, dan mengajarkan manusia agar tanggap, peka, serta tetap menjadi dirinya sendiri.

Orang yang berpendidikan relatif tinggi akan lebih menyukai komedi yang bersifat verbal dan mementingkan rasio

Bisa Menjadi Kontrol Sosial

Berbicara tentang peran dan hakikat yang menyertainya, komedi tidak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi sebagai sebuah seni. Sebagai sebuah ekspresi seni, komedi tidak hanya sekedar memancing tawa atau pelepas ketegangan. Andre Hardjana menjelaskan, "Komedi bisa juga berperan sebagai kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan tingkah laku dan pelanggaran nilai-nilai yang berlaku. Komedi, juga mengasumsikan pentingnya nilai-nilai sosial yang ada. Karenanya, individu dituntut untuk mematuhi nilai-nilai tersebut jika tak ingin dikritik atau dikucilkan. Dalam hal ini, nilai sosial dianggap nilai yang paling benar," ungkapnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh James Dananjaya. Menurutnya, salah satu fungsi komedi itu sebagai kontrol dan protes sosial. Meskipun secara halus dan melalui sindiran, tetapi (komedi-red) dapat dipastikan mengandung unsur politisnya. Di samping itu komedi juga berfungsi sebagai terapi diri (*pshycoteraphy*) untuk dapat saling menertawakan tanpa harus menjadi sensitif dengan kekurangan atau kejelekan diri.

Pada bagian lain, Mi'ing mengungkapkan bahwa komedi dapat berperan sebagai media penyampai pesan dan reflektor. "Segala sesuatu yang bersifat pesan dapat disampaikan karena komedi hanya berperan sebagai medium," ujarnya. Sementara sebagai reflektor, komedi memantulkan kembali apa yang ditangkap dari masyarakat. Sebagai media yang lebih fleksibel, komedi bisa memudahkan orang untuk memahami gejala-gejala yang muncul di masyarakat.

Pada akhirnya, hakikat komedi adalah untuk membangkitkan rasa sosial, menghilangkan *insensitivity*, dan asosial dengan menertawakan keanehan --yang dimaknai dengan kesadaran akan kesamaan harkat dan martabat.

Tertawa dari Prosesnya

Dalam penyajian sebuah komedi, tertawa memang menjadi tujuan utama. Membuat orang tertawa bisa

diartikan sebagai menertawakan orang lain, menertawakan lingkungan, atau bahkan menertawakan diri sendiri. Komedi dapat membuat orang tertawa karena menampilkan cerita kehidupan sebagai gerak dan wacana. Gerak yang muncul dalam komedi cenderung berupa bentuk gerak isyarat (*gesture*), yang seolah keluar dari perasaan dan sikap mental tanpa tujuan tertentu atau gerak yang jujur dan polos. Sementara wacana menjadi sangat penting ketika itu merupakan perpaduan antara kelucuan dan kecerdikan. Maksud-maksud tertentu disampaikan dalam ungkapan-ungkapan yang sudah baku dan banyak dikenal orang.

Mengapa orang bisa tertawa? Dari pengalamannya, Mi'ing mengungkapkan bahwa pesan harus bisa dimengerti oleh *audience*. Penyampaian retorika, lafal, bahasa, intonasi secara jelas bahkan *logical thingking* menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika seseorang paham pada apa yang disampaikan dan terjadi interpretasi yang sama dengan si komedian (ada komunikasi yang terjalin) akan timbul respon berupa tawa terhadap *joke* yang ditampilkan. Di samping itu, seorang komedian perlu menginventarisir aspek dan penguasaannya dalam mencipta sebuah produk komedi.

Memang, pada dasarnya manusia itu memiliki *comic sense* (jiwa komedi) dan itu membuat hidup terasa lebih kaya. Sesuatu yang lucu terjadi di sekitar kita, baik dalam bentuk kata-kata, wujud, perilaku, ataupun peristiwa yang kita lihat, akan dikirim ke otak dan syaraf tertawa. Respon yang kemudian muncul berupa sebuah ledakan tawa. Hal lain yang bisa menjadi indikasi mengapa orang tertawa adalah orang tersebut mengerti apa yang terjadi.

Andre Hardjana menjelaskan, logika humor atau komedi merupakan logika sosial. Untuk memahaminya, kita perlu mengerti logika sosial yang merupakan logika kebudayaan. Sebab, apa yang dikemukakan komedi adalah segala sesuatu yang berlaku di masyarakat. Seorang individu harus berempati dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut agar bisa memahami komedi dalam konteks budaya rakyat.

Karena penangkapan dan pemahaman setiap orang tidak sama, maka untuk mencapai tahap tertawa seseorang harus mengasosiasikan suatu sejarah atau budaya. Hal paling sederhana yang harus dimengerti adalah bahasa, utamanya bahasa lisan. Penguasaan mimik juga dianggap perlu karena mimik merupakan kekuatan yang penting dan lebih universal.

Kepintaran penonton menjadi hal penting agar ia mampu menghubungkan analogi-analogi yang dibangun komedi dengan sesuatu hal atau peristiwa. Ada kecenderungan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan relatif tinggi akan lebih menyukai komedi yang bersifat verbal dan lebih mementingkan rasio. Mereka kurang menyukai komedi yang kental dengan unsur *slapstick*. Yaitu, komedi yang mengandalkan "kekerasan" fisik sebagai bagian dari leluconnya. Tetapi tetap perlu diingat bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadian dan selera seseorang.

"Sebagai manusia kita memiliki rasio dan emosionalitas, dan ini akan mempengaruhi apakah dia akan lebih menyukai hal-hal yang serius atau ringan," ungkap James Dananjaya.

REPRO: AKUTAHU

Prof. Dr. James Dananjaya

Segmen Komedi

Secara umum, komedi tidak memiliki tingkatan karena pada dasarnya, komedi menyangkut hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan universal. Komedi merupakan salah satu media interaksi sosial dalam masyarakat. Hanya saja, di dalam masyarakat itu sendiri kemudian terdapat tingkatan dan perbedaan, baik secara kultural, historis, tingkat pendidikan dan sebagainya. Pada akhirnya, perbedaan ini bukan saja turut mempengaruhi proses apresiasi masyarakat terhadap komedi, namun juga ikut berperan dalam pembagian segmentasi pasar.

Field of experience para komedian juga akan menghasilkan visi yang berbeda, dan ini akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan (differensiasi). Masing-masing komedian pasti akan memiliki karakteristik sendiri. Hal ini diakui Mi'ing, "Bagito telah menentukan *product positioning* terhadap karya yang kami hasilkan, dan kami telah mempunyai segmen yang akan kami bidik. Sebagai komedi modern, kami lebih menitikberatkan pada kekuatan verbal. Berbeda dengan Srimulat yang *all round*. Verbal tapi *slapstick* juga. Tentunya mereka punya segmen yang berbeda pula," paparnya.

Sedangkan James berpendapat, "Segmentasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesenangan masing-masing orang terhadap jenis komedi tertentu."

Apapun bentuk karya komedi yang dihasilkan, makin disadari bahwa komedi merupakan suatu kebutuhan jiwa dari setiap individu. Mereka akan menikmatinya dengan pemahaman masing-masing. Komedi selalu hadir dalam kehidupan untuk memberi warna dan membuka kesadaran pada hakikat manusia. Maka, tidak ada salahnya kalau sesekali kita mencoba untuk mentertawakan diri sendiri sebagai refleksi diri.❐

Radyah Maharastri

Aris, Asep, Bustomi, Irma, Ugoran

Tiupan Solo Flute
Dr. Anggito Abimanyu

Publik Yogya mungkin sudah maklum kalau ekonom dari Jurusan IESP Fakultas Ekonomi UGM ini adalah peniup *flute* yang hebat. Maka tidak mengherankan jika saat wawancara dengan *Kompas*, **Dr. Anggito Abimanyu** berjanji akan tampil pada acara Dies Natalis UGM ke-49 akhir tahun 1998 nanti. Namun pagi itu, tanpa diduga ia tampil sebagai bintang tamu dalam acara '98 *Student Support*. Sebuah konser yang menampilkan kelompok musik asal Universitas Edinburg Austria.

Acara ini merupakan kolaborasi antara kelompok musik mahasiswa Austria dengan mahasiswa UGM. "Musik adalah universal. Makanya tadi malam kita sempat berlatih bersama dengan para pemusik lagu-lagu rakyat Austria ini. Dan mahasiswa UGM tidak kalah," ujarnya di tengah panggung Auditorium Graha Sabha Pramana pertengahan September 1998 lalu.

Konser musik sebagai hiburan bagi mahasiswa Indonesia yang telah lama didera krisis ini diselenggarakan atas kerjasama UGM dengan Kedutaan Besar Austria. Waktunya pun sangat unik, pagi hari, ketika sivitas akademika UGM tengah melangsungkan kegiatan belajar mengajar di kampus masing-masing.

Bukan sebuah kebetulan jika penonton yang hampir memenuhi Auditorium UGM ini mendapatkan suguhan penampilan anggota deklarator penyelamatan ekonomi nasional itu. Karena meski tidak diumumkan lebih dahulu, ia tetap tampil mantap.❐

kru Balairung on-line

"Berjuang tak Hanya Bersuara"

"O...eya...eyo.. kita bangun negeri ini kawan." Begitulah petikan lagu yang dibawakan Kahitna di sebuah hotel berbintang lima di Yogya dalam rangkaian tur 6 kota, Minggu (8/11) lalu. Lagu itu seolah menggugah kembali semangat reformasi kawula muda Yogya.

Membawakan 15 lagu, Kahitna berhasil membius sedikitnya 400 penonton.

Ada yang menarik dari penampilan Kahitna malam itu. Yovie Widianto, salah seorang personil Kahitna, memberi semacam pesan politik. "Berjuang tak hanya bersuara. Bagi kami, tak penting siapa yang jadi presiden. Yang penting masyarakat kita tidak diadu domba terus," ungkap alumnus Fisip Unpad ini.

Kepada Balairung, Yovie mengatakan bahwa kekisruhan yang terjadi saat ini akibat fanatisme kelompok yang berlebihan. Kibordis Kahitna ini berujar, "Masing-masing kelompok tidak punya sikap toleran yang cukup untuk membangun suasana yang lebih baik." *Lho, kok* malah orasi 'Vie?

Irma, Asep, Heri

"Bergerilya itu Enak"

Ceria, bahagia, dan gembira. Barangkali, demikianlah bayangan setiap orang tentang perasaan **Goenawan Mohammad** pada malam *launching* TEMPO di Museum Keramik Jakarta (4/10). Berbagai ucapan dan ciuman selamat bagai air bah mengalir, tak henti-henti dari para undangan dalam dan luar negeri.

Ternyata jawaban dia sebaliknya. "Capek, berat dan melelahkan. Bergerilya itu ternyata lebih enak," ungkapnya kepada *Balairung* saat jeda acara. Entah apa alasannya mengatakan itu. Yang jelas, malam itu

Nyontek itu Belajar Jadi Koruptor Juga

"Butuh waktu lama, setidaknya satu generasi.," kata **Sjamsir Kadir, MBA.**, mengomentari harapan terbangunnya pemerintahan yang bebas dari KKN. Sebagai Dirut Perum Pegadaian yang berpengalaman mengevaluasi kinerja BUMN di Departemen Keuangan, Pak Sjamsir memang paham betul pola KKN di tubuh BUMN.

Menyoal kiat memberantas KKN, Pak Sjamsir berujar, "Yang perlu dibuat lebih dulu memang sistem hukum yang bagus untuk menangkal korupsi dan sejenisnya itu. Juga disiapkan orang-orang pelaksananya, aparat yang berkualitas," lanjutnya.

Pada bagian lain, Pak Sjamsir amat berharap dengan mahasiswa. "Kalian adalah pemimpin-pemimpin pengganti yang korupsi, kolutif dan nepotis itu." Dan demonstrasi, menurutnya adalah sah. "Itu bagian ekspresi kepedulian terhadap rakyat, meski bukan satu-satunya bentuk konkrit dari kepedulian itu," tutur alumnus FE UGM ini.

"Tapi berdemonstrasi menentang KKN, lalu masuk ruang ujian nyontek itu sama saja belajar jadi koruptor juga," tambahnya. ❐

Nur Hidayati

tak hanya milik Goenawan Mohammad dan kru Tempo. Kembalinya Tempo menjadi pengobat rindu para penggemar Tempo, majalah berita mingguan yang telah "menghilang" sejak dibreidel pemerintah Orde Baru, Juli 1994 lalu.❐

M. Bustom dan Asep Mulyana

Optimisme Telegeri Pak Dodi

Telegeri. Barangkali kata ini masih asing bagi sebagian khalayak. Telegeri adalah kegiatan mengoleksi berbagai kartu telepon. Memang belum setenar filateli. Namun tidak berarti butuh waktu lama untuk mengenalkan hobi ini pada masyarakat. Buktinya, banyak yang hadir pada acara peresmian Galeri Telegeri TELKOM di Gedung TELKOM Bandung, 2 Oktober lalu.

Pembukaan Galeri Museum Kartu Telekomunikasi ini, diresmikan Bapak **Dodi Amarudien**, *Vice President* Komunikasi Perusahaan PT. TELKOM. Pada acara ini sekaligus juga dibuka pameran Teknologi Komunikasi, Seminar Telegeri, Lelang Kartu Antik, serta ditutup dengan Panggung Musik Kawula Muda.

Lantas apa kepentingan TELKOM hingga merasa perlu memasyarakatkan kegiatan telegeri? "Kartu telepon itu benda bernilai seni, budaya dan sejarah. Dilihat dari bentuk fisik dan fungsinya, telegeri merupakan sarana telekomunikasi yang praktis, luwes, sekaligus bergengsi. Saya sangat yakin akan makin banyak masyarakat yang menggemarinya," ujar Pak Dodi dengan nada optimis kepada Balairung.

Pada bagian lain, Pak Dodi juga mengaku kecewa. Beliau menunjuk banyaknya anggota masyarakat yang kebingungan mendapatkan fasilitas telepon umum yang baik. Kondisi ini masih menyiratkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fasilitas telekomunikasi umum. Ironis memang.❐

Irfan M, Agoeng W

ANEKDOT

ANDY SENO AJI

Sopir Taxi

Seorang pakar dari Indonesia diundang oleh pemerintah Singapura untuk memberikan ceramah di sebuah perguruan tinggi disana. Dari tempatnya menginap ia naik taxi. Setiap sopir taxi selalu bertanya, "Maaf, Tuan berasal dari negara mana." Dengan bangga ia menjawab, "Jelas dari Indonesia dong." Taxipun cepat-cepat pergi meninggalkannya dengan wajah pucat pasi. Ia pun heran ada apa gerangan dengan dirinya. Begitu ada taxi dan sopir taxi bertanya maka iapun menjawab, "Assalamu 'alaikum saya dari Malaysia." Di dalam taxi matanya tertuju pada sebuah stiker kecil tertempel di kaca depan taxi: Hati-hati Dengan Orang Indonesia, Suka Memperkosa.

Kelik Supriyanto

Anjungan Taman Mini

Setiap hari di tahun 2010 di sebuah anjungan Taman Mini Indonesia Indah selalu penuh dikunjungi wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sayapun ingin tahu ada apa gerangan yang ada di dalam anjungan tersebut dan ikut antri membeli tiket masuk. Begitu masuk ruangan terpampang tulisan besar: Selamat Datang Anda Telah Memasuki Sebuah Museum Hidup Seorang Diktator 32 Tahun Haji Muhammad Soeharto.

Kelik Supriyanto

Prabowo

"Soeharto ya, yang menyuruh kamu menculik para aktivis itu ?", gertak seorang jenderal anggota Dewan Kehormatan Perwira.

"Siap Jenderal. Saya sebenarnya ingin lari darinya tetapi saya tidak kuasa melakukannya."

"Memangnya kenapa," tanya Jenderal yang lain.

"Bagaimana saya dapat lari kalau anak perempuannya selalu mendekap saya terus," jawab Prabowo pasrah.

Kelik Supriyanto

Wiranto

"Selamat ya, anda telah sukses memanfaatkan Habibie untuk mendepak Soeharto. Ngomong-ngomong berguru sama Moerdani, ya," tuduh Fidel Ramos pada Wiranto di telepon.

"Bukankah saya belajar dari anda, tuan Ramos. Anda telah memanfaatkan janda Aquino untuk menggulingkan Marcos. Tetapi kayaknya anda lebih beruntung Tuan."

"Maksud anda ?."

Dengan suara agak melemah Wiranto berucap," Kalau Tuan Ramos telah merasakan empuknya kursi kepresidenan sedangkan saya belum merasakannya."

Kelik Supriyanto

Habibie

"Anak-anak, siapakah Pak Habibie itu?" Tanya seorang guru di depan kelas.

"Menteri teknologi," kata seorang murid.

"Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Siapa yang tahu?"

"Presiden Soeharto kita yang baru!" jawab seorang murid yang lain, dengan wajah pasti.

Dodo Pr.
(Dari sebuah kisah nyata)

AM Saefuddin 1

"Kenapa ada menteri bilang, presiden tidak boleh yang beragama Hindu?" tanya seorang siswa SMA kepada temannya.

"Karena orang beragama itu, orang baik."

Dodo Pr.

AM Saefuddin2

"Kenapa presiden tidak boleh perempuan?" tanya mahasiswa itu lagi.

"Karena surga dibawah telapak kaki ibu."

Dodo Pr.

KOMPAS

Karena Berita bukan hanya cerita
Melainkan kiat kehidupan yang nyata
KOMPAS Mata Hati
Mencerminkan nurani

Karena Berita bisa juga derita
dari yang tak mampu mengadu berkata
KOMPAS Mata Hati
Mencoba menggugah budi

Redaksi/Umum : Jl. Palmerah Selatan 26 - 28, Jakarta 10270 ☐ (021) 5302200, 5347710, 5347720, 5347730
☐ Telex : 65582 KOMPAS IA ☐ Fax : (021) 5486085 ☐ Kotak Pos 4612, Jakarta 12046
☐ Alamat Kawat : KOMPAS JAKARTA
IKLAN :Jl. Gajah Mada 109 - 110A, Jakarta 11140 ☐ (021) 2601611
PROMOSI : Gd. Perintis, Jl. Kebahagiaan 4 - 14, Jakarta 11140 ☐ (021) 2601234, 2601555
Ext. 1250 - 1255 ☐ Fax : (021) 6344473

Membangun Bangsa Cerdas dengan BALAIRUNG

TERIMA KASIH KEPADA ANDA YANG TELAH MENJADI PELANGGAN ABADI:

1.	TONSAH MINANDA, S.H.	DUMAI
2.	PROF. DR. HJ. SOETINAH SOEWONDO	UJUNG PANDANG
3.	A. BUDI PURNOMO, MA	YOGYAKARTA
4.	HARI SANDJOJO, SE	JAKARTA
5.	A. TONY PRASETYANTONO, M.Sc	YOGYAKARTA
6.	MARZUKI USMAN, SE	JAKARTA
7.	Ir. TEBYAN A'MAARI	YOGYAKARTA
8.	KHOIRUL ROSYADI, SS	YOGYAKARTA
9.	Ir. ABDUL HAMID DIPOPRAMONO	JAKARTA
10.	MUSTAJAB, SE	YOGYAKARTA
11.	AMONG KURNIA EBO	YOGYAKARTA
12.	SOEWARDJONO	YOGYAKARTA
13.	ARIEF OETOJO	SURAKARTA
14.	Drs. DJAHRI ARSYAD	JAKARTA
15.	MOE'ALI	JAWA TIMUR
16.	DIDIK SUPRYANTO, SP	JAKARTA
17.	Ir. AGUNG SUPRIHANTO	JAKARTA

Anda ilmuwan, eksekutif, ataupun intelektual muda?
Ingin menjadi pelanggan abadi Balairung?
Kirimkan minimal Rp 100.000,00 ke bagian sirkulasi.
"Setiap edisi terbaru akan kami kirimkan ke alamat Anda"

FORMULIR PELANGGAN ABADI

Dengan ini saya:
Nama :
.....
Alamat :
.....

Bersedia menjadi pelanggan abadi **Majalah *Balairung* UGM**. Untuk itu saya memberikan dana berlangganan sebesar **Rp.**_____
(.....)
melalui via wesel / transfer Tabanas Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah,)atau via wesel ke alamat: Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281, telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171.

Tanggal.....

Pelanggan Abadi

.....

What's BALAIRUNG ?

Campus papers still thrive, but they tend to be tame organs for university public relations rather than an expression of student discontent. Some campus publications have adapted by claiming the political middle ground, displaying commercial nous and journalistic sophistication in both content and lay-out. Gadjah Mada University's **BALAIRUNG**, for example, produced a special edition to celebrate its eight-year (windu) anniversary in 1994. The 128-page glossy magazine was slick and well-produced, marketed through major bookshop chains such as Gramedia, for Rp 3.000,00. It included a lengthy article about; and interview with, prominent leftist author Pramoedya Ananta Toer, seventeen researched essays by student leaders on their vision for Indonesia's future, together with a student analysis of the election of the university's new Rector. The magazine listed on its advisory board not only Amir Effendi Siregar, who in addition to lecturing in the university's highly-regarded journalism program is also a director of *Warta Ekonomi* economic weekly, but also *Kompas*' chief Yakob Utama.

(**Hill, David.T.**,1995, *The Press in New Order Indonesia*. Uwap University of Western Australia Press. Nedlands. Western Australia. pp.116-117)

"... Sebagai majalah mahasiswa BALAIRUNG sudah sangat memadai. Secara visual tampilannya sangat baik, sementara dari isinya ... tak bakal dijumpai pada pers umum."

MOCHTAR LUBIS
BUDAYAWAN, DIREKTUR
YAYASANYAYASAN OBOR INDONESIA

Kedaulatan Rakyat

Mengutamakan
Suara Hatinurani Rakyat
Menjaga
Persatuan dan Kesatuan
Bangsa

sejak kemerdekaan RI,
koran ini selalu
mengedepankan
suara hatinurani rakyat,
hingga kini
tak bergeming dengan
berubahnya jaman.
berperan
sebagai jembatan
yang kokoh
antara
pemerintah dengan rakyat
demi
keutuhan dan kejayaan
republik ini

KANTOR PUSAT ; Jalan Pangeran Mangkubumi 40 - 42 Yogyakarta 55232. Telepon 0274 - 565685 (hunting) Fax. 0274 - 563125
KANTOR PERWAKILAN ● JAKARTA : Jl. Utan Kayu No. 85, telp. (021) 8563515, 8563602 Jakarta Timur 13120 ● KEDU UTARA : Jl. Achmad Yani No. 9, telp. (0293) 63552 dan 62502 Magelang ● SURAKARTA : Jl. Bhayangkara No. 13 (lama No. 42), telp/Fax. (0271) 718015 Surakarta 57141 ● SEMARANG : Jl. Lampersari No. 55, telp. (024) 315769 ● PURWOKERTO : Jl. Achmad Yani No. 14, telp (0281) 37347 ● KEDU SELATAN : Jl. Tentara Pelajar No. 107, Telp. (0275) 23422 Purworejo

Homepage : http//www.kedaulatan-rakyat.com — *e-mail:redaksi@kedaulatan-rakyat.com*

PERTAMINA

VISI

MENJADI PERUSAHAAN
MINYAK DAN GAS BUMI
YANG EFISIEN, UNGGUL,
MAJU DAN MANDIRI

MISI

BERGERAK DALAM KEGIATAN
EKSPLORASI, PRODUKSI, PENGOLAHAN
PEMASARAN NIAGA INDONESIA,
DAN SECARA SELEKTIF
DI DUNIA INTERNASIONAL

COCAIN BINAS HERMAS PERTAMINA